

LEMBAR CODING

OBJEKTIVITAS PEMBERITAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR (PILGUB) DKI JAKARTA 2016 PADA SURAT KABAR KOMPAS DAN KORAN SINDO

(Analisis Isi Berita Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta Pada Surat Kabar Kompas dan Sindo Periode 19 September – 23 Oktober 2016)

Nama Coder : Suci Rahmadani Nst
No coding : 01

❖ Total Berita Harian Kompas

No.	Tanggal	Judul Berita	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur			
			Agus – Sylviana	Ahok - Djarot	Anies - Sandiaga	Ketiga Pasangan Calon
1.	19-9-2016	Ujian Kematangan Demokrasi		✓		
2.	20-9-2016	PDIP-P Putuskan Pasangan Hari Ini		✓	✓	
3.	21-9-2016	Pertarungan Ide Menentukan				✓
4.	22-9-2016	Koalisi Bahas Dua Kemungkinan				✓
5.	23-9-2016	Polisi Pantau Media Sosial		✓	✓	
6.	23-9-2016	Empat Parpol Jagokan Agus Yudhoyono	✓			
7.	24-9-2016	Pilkada DKI Gambaran Pilpres				✓
8.	25-9-2016	Jaga Kedamaian Pilkada 2017				✓
9.	26-9-2016	Panglima Tegaskan Sikap Netral TNI				✓
10.	26-9-2016	Jakarta dan Tiga Poros Kekuasaan				✓
11.	26-9-2016	BNN Telusuri Jejak Narkoba				✓
12.	27-9-2016	Demi Meraih Kemenangan				✓
13.	28-9-2016	Mencari Sosok Bang Ali				✓
14.	1-10-2016	Pasangan Calon Belum Lengkapi Persyaratan				✓
15.	1-10-2016	Kemang Segera Dibongkar		✓		
16.	3-10-2016	Modal Kampanye Andalkan Partisipasi	✓	✓		
17.	5-10-2016	Survei LSI: Elektabilitas Petahana Menurun				✓
18.	6-10-2016	Menanti “Penjaga Nalar” Politik				✓
19.	6-10-2016	KPU DKI Periksa Kelengkapan Berkas Tiga Pasang Kandidat				✓
20.	7-10-2016	Transfer Bagi Hasil Ubah Struktur Anggaran		✓		
21.	7-10-2016	Tim Para Calon Mulai Berstrategi				✓
22.	8-10-2016	Ancaman Pidana Bagi Kampanye SARA		✓	✓	

23.	10-10-2016	Makin Gencar Menyapa	✓		✓	
24.	11-10-2016	Restu Dahulu, Konsolidasi Kemudian		✓		
25.	11-10-2016	Basuki Didesak Berhati-hati		✓		
26.	13-10-2016	Relawan Pendukung Minta Basuki Perbaiki Komunikasi				✓
27.	15-10-2016	Ribuan Saksi Dikerahkan di Pilkada		✓	✓	
28.	15-10-2016	Bareskrim Berjanji Usut Tuntas Pidato Basuki		✓		
29.	18-10-2016	Surat Keterangan E-KTP Diusahakan Bisa Dipakai	✓	✓		
30.	22-10-2016	Pembatalan Calon Mungkin Terjadi				✓
TOTAL:			4	12	5	16

❖ **Total Berita Koran Sindo**

No.	Tanggal	Judul Berita	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur			
			Agus - Sylviana	Ahok - Djarot	Anies - Sandiag a	Ketiga Pasangan Calon
1.	19-9-2016	Penolakan Ahok Makin Meluas		✓		
2.	20-9-2016	Koalisi Siapkan Skenario Hadapi Cagub PDIP				✓
3.	21-9-2016	PDI-P Jagokan Ahok-Djarot, Koalisi Solid Usung Satu Calon		✓	✓	
4.	22-9-2016	SBY Konsolidasi dengan PKB, PAN, dan PPP				✓
5.	22-9-2016	Kebijakan Ahok Dinilai Timbulkan Konflik		✓		
6.	23-9-2016	Koalisi Gagal Satukan Barisan				✓
7.	24-9-2016	Tiga Pasang Kandidat Sama Kuat				✓
8.	25-9-2016	KPU Hanya Andalkan Tes Urine				✓
9.	25-9-2016	Jakarta Butuh Pemimpin Manusiawi				✓
10.	26-9-2016	Pilkada DKI Berpotensi Dua Putaran				✓
11.	27-9-2016	Hindari Saling Hujat di Pilkada				✓
12.	28-9-2016	Parpol Pendukung Ahok-Djarot Berebut Ketua Tim Kemenangan				✓
13.	30-9-2016	DKI Butuh Pemimpin Seperti Ali Sadikin				✓
14.	1-10-2016	Tiga Pasangan Calon Siap Adu Strategi				✓
15.	3-10-2016	Calon Gubernur DKI Mulai Bergerilya				✓
16.	4-10-2016	Dikritik Anies Soal Sungai, Ahok Emosi		✓	✓	
17.	5-10-2016	Elektabilitas Ahok-Djarot Terus Merosot				✓

18.	6-10-2016	Tim Kandidat Beradu Strategi Pemenangan				✓
19.	7-10-2016	Cagub-Cawagub DKI Perkuat Basis Massa				✓
20.	8-10-2016	Cagub Prioritaskan Penanganan Transportasi				✓
21.	9-10-2016	HT:DKI Jakarta Butuh Pemimpin yang Bisa Ciptakan Ketentraman	✓		✓	
22.	10-10-2016	Perindo Siap Kawal Pilkada DKI 2017				✓
23.	10-10-2016	Masyarakat Jangan Terprovokasi Isu SARA				✓
24.	11-10-2016	Aparat Harus Jaga Netralitas		✓		
25.	12-10-2016	Penutupan Diskotek Mille's Sudah Tepat		✓		
26.	12-10-2016	DPR Desak Kapolri Klarifikasi dan Minta Maaf		✓		
27.	14-10-2016	Sembilan Diskotek Terancam Ditutup		✓		
28.	14-10-2016	Sikap MUI Tak Bertendensi Politik		✓		
29.	15-10-2016	Calon Gencar Sosialisasi ke Warga				✓
30.	15-10-2016	Lautan Massa Protes Ahok		✓		
31.	17-10-2016	Cagub-Cawagub Adu Program untuk Rakyat				✓
32.	18-10-2016	Ratusan Gedung di Kawasan Jakarta Tidak Aman		✓		
33.	19-10-2016	Pertarungan Artis di Pilkada DKI Jakarta				✓
34.	19-10-2016	Terima Komputer, Netralitas KPU Bisa Terganggu				✓
35.	21-10-2016	Bareskrim Polri Periksa Staf Ahok		✓		
36.	21-10-2016	Anies-Sandiaga Berani Kontrak Politik				✓
TOTAL:			1	12	2	23

Nama Coder : Layla Qodria

No coding : 02

❖ **Total Berita Harian Kompas**

No.	Tanggal	Judul Berita	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur			
			Agus – Sylviana	Ahok - Djarot	Anies - Sandiaga	Ketiga Pasangan Calon
1.	19-9-2016	Ujian Kematangan Demokrasi		✓		
2.	20-9-2016	PDIP-P Putuskan Pasangan Hari Ini		✓	✓	
3.	21-9-2016	Pertarungan Ide Menentukan				✓
4.	22-9-2016	Koalisi Bahas Dua Kemungkinan				✓
5.	23-9-2016	Polisi Pantau Media Sosial		✓	✓	
6.	23-9-2016	Empat Parpol Jagokan Agus Yudhoyono	✓			
7.	24-9-2016	Pilkada DKI Gambaran Pilpres				✓
8.	25-9-2016	Jaga Kedamaian Pilkada 2017				✓
9.	26-9-2016	Panglima Tegaskan Sikap Netral TNI				✓
10.	26-9-2016	Jakarta dan Tiga Poros Kekuasaan				✓
11.	26-9-2016	BNN Telusuri Jejak Narkoba				✓
12.	27-9-2016	Demi Meraih Kemenangan				✓
13.	28-9-2016	Mencari Sosok Bang Ali				✓
14.	1-10-2016	Pasangan Calon Belum Lengkapi Persyaratan				✓
15.	1-10-2016	Kemang Segera Dibongkar		✓		
16.	3-10-2016	Modal Kampanye Andalkan Partisipasi	✓	✓		
17.	5-10-2016	Survei LSI: Elektabilitas Petahana Menurun				✓
18.	6-10-2016	Menanti “Penjaga Nalar” Politik				✓
19.	6-10-2016	KPU DKI Periksa Kelengkapan Berkas Tiga Pasang Kandidat				✓
20.	7-10-2016	Transfer Bagi Hasil Ubah Struktur Anggaran		✓		
21.	7-10-2016	Tim Para Calon Mulai Berstrategi				✓
22.	8-10-2016	Ancaman Pidana Bagi Kampanye SARA		✓	✓	
23.	10-10-2016	Makin Gencar Menyapa	✓		✓	
24.	11-10-2016	Restu Dahulu, Konsolidasi Kemudian		✓		
25.	11-10-2016	Basuki Didesak Berhati-hati		✓		
26.	13-10-2016	Relawan Pendukung Minta Basuki Perbaiki Komunikasi				✓
27.	15-10-2016	Ribuan Saksi Dikerahkan di Pilkada		✓	✓	
28.	15-10-2016	Bareskrim Berjanji Usut Tuntas Pidato Basuki		✓		

29.	18-10-2016	Surat Keterangan E-KTP Diusahakan Bisa Dipakai	✓	✓		
30.	22-10-2016	Pembatalan Calon Mungkin Terjadi				✓
TOTAL:			4	12	5	16

❖ **Total Berita Koran Sindo**

No.	Tanggal	Judul Berita	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur			
			Agus - Sylviana	Ahok - Djarot	Anies - Sandiag a	Ketiga Pasangan Calon
1.	19-9-2016	Penolakan Ahok Makin Meluas		✓		
2.	20-9-2016	Koalisi Siapkan Skenario Hadapi Cagub PDIP				✓
3.	21-9-2016	PDI-P Jagokan Ahok-Djarot, Koalisi Solid Usung Satu Calon		✓	✓	
4.	22-9-2016	SBY Konsolidasi dengan PKB, PAN, dan PPP				✓
5.	22-9-2016	Kebijakan Ahok Dinilai Timbulkan Konflik		✓		
6.	23-9-2016	Koalisi Gagal Satukan Barisan				✓
7.	24-9-2016	Tiga Pasang Kandidat Sama Kuat				✓
8.	25-9-2016	KPU Hanya Andalkan Tes Urine				✓
9.	25-9-2016	Jakarta Butuh Pemimpin Manusiawi				✓
10.	26-9-2016	Pilkada DKI Berpotensi Dua Putaran				✓
11.	27-9-2016	Hindari Saling Hujat di Pilkada				✓
12.	28-9-2016	Parpol Pendukung Ahok-Djarot Berebut Ketua Tim Kemenangan				✓
13.	30-9-2016	DKI Butuh Pemimpin Seperti Ali Sadikin				✓
14.	1-10-2016	Tiga Pasangan Calon Siap Adu Strategi				✓
15.	3-10-2016	Calon Gubernur DKI Mulai Bergerilya				✓
16.	4-10-2016	Dikritik Anies Soal Sungai, Ahok Emosi		✓	✓	
17.	5-10-2016	Elektabilitas Ahok-Djarot Terus Merosot				✓
18.	6-10-2016	Tim Kandidat Beradu Strategi Pemenangan				✓
19.	7-10-2016	Cagus-Cawagub DKI Perkuat Basis Massa				✓
20.	8-10-2016	Cagub Prioritaskan Penanganan Transportasi				✓
21.	9-10-2016	HT:DKI Jakarta Butuh Pemimpin yang Bisa Ciptakan Ketentraman	✓		✓	

22.	10-10-2016	Perindo Siap Kawal Pilkada DKI 2017				✓
23.	10-10-2016	Masyarakat Jangan Terprovokasi Isu SARA				✓
24.	11-10-2016	Aparat Harus Jaga Netralitas		✓		
25.	12-10-2016	Penutupan Diskotek Mille's Sudah Tepat		✓		
26.	12-10-2016	DPR Desak Kapolri Klarifikasi dan Minta Maaf		✓		
27.	14-10-2016	Sembilan Diskotek Terancam Ditutup		✓		
28.	14-10-2016	Sikap MUI Tak Bertendensi Politik		✓		
29.	15-10-2016	Calon Gencar Sosialisasi ke Warga				✓
30.	15-10-2016	Lautan Massa Protes Ahok		✓		
31.	17-10-2016	Cagub-Cawagub Adu Program untuk Rakyat				✓
32.	18-10-2016	Ratusan Gedung di Kawasan Jakarta Tidak Aman		✓		
33.	19-10-2016	Pertarungan Artis di Pilkada DKI Jakarta				✓
34.	19-10-2016	Terima Komputer, Netralitas KPU Bisa Terganggu				✓
35.	21-10-2016	Bareskrim Polri Periksa Staf Ahok		✓		
36.	21-10-2016	Anies-Sandiaga Berani Kontrak Politik				✓
TOTAL:			1	12	2	23

Lampiran 1

Pengkodean 1

1. Objektivitas berdasarkan *factualness*

Indikator	Kompas			Sindo		
	Jumlah	Total	Persentase	Jumlah	Total	Persentase
Fakta Sosiologis	III III III III	19	63,33%	III III III III II	22	61,11
Fakta Psikologis	III	5	16,67%	III III	8	22,22
Fakta Kombinasi	III I	6	20%	III I	6	16,67
Tidak Ada Keduanya	-	-	-	-	-	-
Total Keseluruhan		30	100 %	Total Keseluruhan	36	100 %

2. Objektivitas berdasarkan *completeness*

Indikator	Kompas			Sindo		
	Jumlah	Total	Persentase	Jumlah	Total	Persentase
Lengkap	III III III III III	25	83,33%	III III III III III III II	32	86,48%
Tidak ada unsur <i>What</i>	-	-	-	-	-	-
Tidak ada unsur <i>Who</i>	-	-	-	-	-	-
Tidak ada unsur <i>When</i>	-	-	-	III	3	8,11%
Tidak ada unsur <i>Where</i>	-	-	-	II	2	5,41%
Tidak ada unsur <i>Why</i>	III	3	10 %	-	-	-
Tidak ada unsur <i>How</i>	II	2	6,67%	-	-	-
Total Keseluruhan		30	100 %	Total	37	100%

3. Objektivitas berdasarkan panjang berita

Indikator	Kompas			Sindo		
	Jumlah	Total	Persentase	Jumlah	Total	Persentase
Panjang	III III III III	25	83,33 %	III III III III III III	29	80,56%
Sedang	III	5	16,67 %	III II	7	19,44%
Pendek	-	-	-	-	-	-
Total Keseluruhan		30	100 %	Total	36	100%

4. Objektivitas berdasarkan relevansi

Indikator	Kompas			Sindo		
	Jumlah	Total	Persentase	Jumlah	Total	Persentase
Relevan	III III III III	18	52,95%	III III III III III	25	59,52%
Tidak terdapat unsur <i>timeliness</i>	-	-	-	II	2	4,77%
Tidak terdapat unsur <i>significance</i>	III	3	8,82%	I	1	2,39%
Tidak terdapat unsur <i>magnitude</i>	III I	6	17,64%	III III	9	21,42%
Tidak terdapat unsur <i>conflict</i>	III II	7	20,59%	III	5	11,90%
Tidak terdapat unsur <i>proximity</i>	-	-	-	-	-	-
Tidak terdapat unsur <i>prominence</i>	-	-	-	-	-	-
Total Keseluruhan		34	100 %	Total	42	100%

5. Objektivitas berdasarkan tipe liputan

Indikator	Kompas			Sindo		
	Jumlah	Total	Persentase	Jumlah	Total	Persentase
Satu sisi	III	5	16,66%	III	4	11,11%
Dua sisi	III I	6	20%	III III	8	22,22%
Multi sisi	III III III III	19	63,34%	III III III III III	24	66,67%
Total Keseluruhan		30	100%	Total	36	100%

6. Objektivitas berdasarkan arah berita

Indikator	Kompas			Sindo		
	Jumlah	Total	Persentase	Jumlah	Total	Persentase
Cenderung memihak kepada Agus-Sylviana	I	1	3,23%	-	-	-
Cenderung memihak kepada Ahok-Djarot	II	2	6,45%	II	2	5,41%
Cenderung memihak kepada Anies-Sandiaga	I	1	3,23%	II	2	5,41%
Tidak memihak kepada ketiga pasangan calon	III III III III III II	27	87,09%	III III III III III III III	33	89,18%
Total Keseluruhan		31	100 %	Total	37	100%

Lampiran 2

Pengcoding 2

1. Objektivitas berdasarkan *factualness*

Indikator	Kompas			Sindo		
	Jumlah	Total	Persentase	Jumlah	Total	Persentase
Fakta Sosiologis	III III III III	19	63,33%	III III III III II	24	66,67%
Fakta Psikologis	III	4	13,33%	III III	7	19,44%
Fakta Kombinasi	III II	7	23,34%	III I	5	13,89%
Tidak Ada Keduanya	-	-	-	-	-	-
Total Keseluruhan		30	100 %	Total Keseluruhan	36	100 %

2. Objektivitas berdasarkan *completeness*

Indikator	Kompas			Sindo		
	Jumlah	Total	Persentase	Jumlah	Total	Persentase
Lengkap	III III III III III	25	83,33%	III III III III III III II	32	86,48%
Tidak ada unsur <i>What</i>	-	-	-	-	-	-
Tidak ada unsur <i>Who</i>	-	-	-	-	-	-
Tidak ada unsur <i>When</i>	-	-	-	III	3	8,11%
Tidak ada unsur <i>Where</i>	-	-	-	II	2	5,41%
Tidak ada unsur <i>Why</i>	III	3	10 %	-	-	-
Tidak ada unsur <i>How</i>	II	2	6,67%	-	-	-
Total Keseluruhan		30	100 %	Total	37	100%

3. Objektivitas berdasarkan panjang berita

Indikator	Kompas			Sindo		
	Jumlah	Total	Persentase	Jumlah	Total	Persentase
Panjang	III III III III III	25	83,33 %	III III III III III III	29	80,56%
Sedang	III	5	16,67 %	III II	7	19,44%
Pendek	-	-	-	-	-	-
Total Keseluruhan		30	100 %	Total	36	100%

4. Objektivitas berdasarkan relevansi

Indikator	Kompas			Sindo		
	Jumlah	Total	Persentase	Jumlah	Total	Persentase
Relevan	III III III III	20	58,83%	III III III III III II	27	64,29%
Tidak terdapat unsur <i>timeliness</i>	-	-	-	I	1	2,38%
Tidak terdapat unsur <i>significance</i>	I	1	2,95%	I	1	2,38%
Tidak terdapat unsur <i>magnitude</i>	III	5	14,70%	III II	7	16,67%
Tidak terdapat unsur <i>conflict</i>	III III	8	23,52%	III I	6	14,28%
Tidak terdapat unsur <i>proximity</i>	-	-	-	-	-	-
Tidak terdapat unsur <i>prominence</i>	-	-	-	-	-	-
Total Keseluruhan		34	100 %	Total	42	100%

5. Objektivitas berdasarkan tipe liputan

Indikator	Kompas			Sindo		
	Jumlah	Total	Persentase	Jumlah	Total	Persentase
Satu sisi	III	5	16,67%	III	4	11,11%
Dua sisi	III	5	16,67%	III III	8	22,22%
Multi sisi	III III III III	20	66,66%	III III III III III	24	66,67%
Total Keseluruhan		30	100%	Total	36	100%

6. Objektivitas berdasarkan arah berita

Indikator	Kompas			Sindo		
	Jumlah	Total	Persentase	Jumlah	Total	Persentase
Cenderung memihak kepada Agus-Sylviana	I	1	3,23%	-	-	-
Cenderung memihak kepada Ahok-Djarot	II	2	6,45%	I	1	2,70%
Cenderung memihak kepada Anies-Sandiaga	I	1	3,23%	III	4	10,81%
Tidak memihak kepada ketiga pasangan calon	III III III III III II	27	87,09%	III III III III III III II	32	86,49%
Total Keseluruhan		31	100 %	Total	37	100%

Lampiran Berita Pilgub DKI Jakarta 2016 di Harian Kompas Periode 19 September-23 Oktober 2016

1. 19 September 2016, halaman 27



Pengisi acara berpose di sela-sela peluncuran Pilkada DKI Jakarta yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (18/9). Pilkada DKI Jakarta 2017 hanya diikuti pasangan dari partai politik. Pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta berlangsung pada 21-23 September 2016.

PILKADA DKI 2017

Ujian Kematangan Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS — Pilkada 2017 menjadi momentum untuk menguji kematangan demokrasi warga Jakarta. Sebab, ada kondisi tidak lazim yang jadi sorotan banyak kalangan.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie menyatakan, pencalonan petahana Basuki Tjahaja Purnama adalah situasi tidak lazim.

"Tak lazim dalam arti tidak ikut kondisi ideal yang sifatnya konvensional. Kita bisa melihat nanti apakah masyarakat Jakarta sudah sangat rasional untuk memilih atau masih dipengaruhi oleh sifat-sifat primordial," katanya saat sambutan pada peluncuran Pilkada DKI Jakarta 2017 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (18/9).

Isu berbungkus suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) ditengarai bakal diembuskan pada Pilkada 2017. Karena itu, selain integritas, para penyelenggara khususnya Komisi Pemilihan

Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga akan diuji dalam situasi ini.

Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno meminta penyelenggara untuk netral, berintegritas, dan profesional. Tak hanya bertindak sesuai aturan, pelaksana dituntut memenuhi etika untuk menjamin pemilu yang bermutu.

Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti menambahkan, meski belum masuk tahap kampanye, pihaknya memantau dan mencatatnya. "Kami mengajak media massa dan semua pihak untuk ikut dalam pengawasan," ujarnya.

Tiga calon

Sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) belum mengumumkan nama calon yang akan diusung.

Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat, Minggu, menyebutkan, tiga nama yang di-

pertimbangkan ialah petahana Basuki Tjahaja Purnama, Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya), dan Budi Waseso (Kepala BNN).

DPP PDI-P akan menggelar rapat khusus sekitar tanggal 20-21 September. "Indikasi kuatnya, ya, petahana," ujar Djarot yang kini juga menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Massa sejumlah organisasi dan tokoh Muslim menggelar silaturahmi akbar bertajuk "Doa untuk Kepemimpinan Ibu Kota" di Masjid Istiqlal, kemarin siang. Tokoh yang hadir antara lain mantan Ketua MPR Amien Rais, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, dan Didin Hafiduddin.

Hadir pula Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab dan Ketua Dewan Penasihat Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) Nachrowi Ramli. Dalam pidato, mereka antara lain meminta jemaah untuk selektif memilih pemimpin pada Pilkada 2017. (DEA/MKN)

PILKADA DKI 2017

PDI-P Putuskan Pasangan Hari Ini

JAKARTA, KOMPAS — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berencana menggelar rapat terkait Pilkada 2017 pada Selasa (20/9). Salah satu yang dibahas adalah penentuan pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

”Dalam rapat akan diputuskan apakah tetap Ahok-Djarot (Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat) atau pasangan lain. Rapat juga merancang bagaimana mekanisme pendaftaran ke KPU (Komisi Pemilihan Umum),” tutur Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat, di Balai Kota Jakarta, Senin (19/9).

Menurut Djarot, rapat secara khusus digelar untuk membahas pilkada di beberapa daerah, khususnya yang menjadi prioritas seperti DKI Jakarta. Selain pasangan calon, rapat membahas teknis pendaftaran, apakah tanggal 21, 22, atau 23 September 2016.

”Soal apakah pakai deklarasi (pasangan calon) atau tidak, itu termasuk yang akan dibahas. Tetapi, secara pribadi, saya inginnya tidak ramai-ramai, langsung saja daftar ke KPU,” ujarnya.

Terkait dengan calon pasangannya, Basuki menyatakan, belum tahu siapa pasangannya.

”(Pilkada) sekarang memang menarik, sampai sekarang bingung siapa yang daftar siapa. Belum pernah ada kejadian, kan? Sabar saja, pendaftaran 21 sampai 23 (September) nanti bakal ketahuan siapa yang mendaftar dan siapa yang tidak,” tutur Basuki di Balai Kota Jakarta, Senin pagi.

Tunggu Yudhoyono

Sementara itu, pengurus DPD Partai Demokrat DKI Jakarta belum menetapkan bakal calon gubernur yang akan maju di Pilkada DKI. DPD Partai Demokrat DKI sudah menyeleksi 14 bakal calon gubernur yang mendaftar. Hasilnya tersisa delapan nama bakal calon gubernur.

Ketua Bidang Penjaringan Pilkada DPD Partai Demokrat DKI Raja Mantan Purba mengatakan, delapan bakal cagub itu di antaranya Sandiaga Uno, Yusril Ihza Mahendra, dan Lulung Lunggana.

Pengurus partai itu masih menunggu keputusan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua umum partai. ”Keputusan sekarang berada di tangan ketua umum partai. Kami pun sedang menunggu itu,” katanya.

Purba menampik Pilkada DKI memiliki posisi strategis dibandingkan dengan pilkada lainnya di Indonesia sehingga pilihan bakal cagub yang diusung pun harus menunggu keputusan ketua umum partai.

”Tidak juga. Ini aturan main yang berlaku di seluruh pilkada di Indonesia, termasuk di Jakarta. Bakal cagub ditentukan ketua umum partai,” kata Purba.

Purba tak bisa memberikan kepastian apakah nama cagub yang dipilih ketua umum itu berasal dari delapan nama bakal cagub yang melalui proses seleksi di DPD Demokrat DKI. Menurut dia, semua itu dapat saja berubah karena keputusan berada di ketua umum partai. ”Kita tunggu saja keputusan ketua umum partai,” ucapnya. (MDN/MKN/DEN)



Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto (kiri) memperkenalkan calon kepala daerah yang akan diusung dalam pilkada serentak tahun 2017 di kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (20/9). Para calon kepala daerah itu adalah (dari kiri) pasangan calon Gubernur Gorontalo Hana Hasanah Fadel Muhammad dan wakilnya, Tony S Junus; calon Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo; calon Gubernur Banten Rano Karno; serta calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan wakilnya, Djarot Saiful Hidayat.

Pertarungan Ide Menentukan

Basuki-Djarot Resmi Dicalonkan PDI-P, Tanda Tangani Kontrak Politik

JAKARTA, KOMPAS — Setelah PDI-P mengumumkan pencalonan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dalam Pilkada 2017, partai lain merapatkan kekuatan untuk memilih calon yang setanding. Pertarungan ide diharapkan menjadi penentu kemenangan.

Pengumuman pasangan calon kepala daerah DKI itu digelar di kantor DPP PDI-P di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (20/9) pukul 20.10. Dalam kesempatan itu, DPP PDI-P secara



Pertarungan Ide Menentukan

(Sambungan dari halaman 1)

kesepahaman (MOU) Tangerang Smart City Partnership di Kota Tangerang, Selasa siang.

Sebelum pengumuman resmi dari PDI-P ini, nama Basuki sudah didukung tiga parpol lain, yakni Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Jumlah suara keempat partai ini di DPRD DKI Jakarta mencapai 52 kursi atau jauh melebihi syarat minimum untuk mengusung pasangan calon kepala daerah, yakni 21 kursi.

Merapatkan barisan

Parpol-parpol lain di luar empat parpol tersebut langsung merapatkan barisan untuk melawan pasangan Basuki-Djarot di DKI. Partai Gerindra, yang mengajukan nama pengusaha Sandiaga Uno sebagai calon gubernur, makin gencar melakukan pendekatan dan lobi politik terhadap koalisi Partai Demokrat, PAN, PKB, dan PPP.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat dihubungi di Jakarta, Selasa malam, mengatakan, pihaknya akan berusaha keras berkompromi dengan partai-partai tersebut agar sebisa mungkin Pilkada DKI diikuti dua pasang calon saja.

Saat ini, lobi-lobi tersebut diambil alih DPP Gerindra, bukan lagi DPD Gerindra DKI, mengingat kondisi perpolitikan di DKI yang makin dinamis. Gerindra akan melakukan kompromi de-

ngan calon-calon yang sedang ditawarkan koalisi Demokrat-PAN-PPP-PKB. Beberapa nama adalah Anies Baswedan, Yusril Ihza Mahendra, dan Saefulhah (Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta).

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan mengatakan, internal partainya mendorong sosok Yusril untuk diusung koalisi. Berdasarkan survei Demokrat, elektabilitas Yusril cukup tinggi.

"Kami masih harus menyatukan semua usulan dari koalisi dan mencocokkan semua. Namun, saya jamin, keputusannya akan mengejutkan dari segala aspek," kata Syarif.

Sandiaga sendiri menyerahkan sepenuhnya keputusan calon wakilnya kepada pimpinan partai. "Bukan saya yang pilih (calon wakil gubernur)," kata Sandi saat jumpa media di Posko Sandi Uno, Selasa, di Jakarta.

Sandi hanya memastikan, ia akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum pada 23 September setelah shalat Jumat.

Sandi mengungkapkan adanya pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Majelis Syura PKS Habib Salim Segaf Al'Jufrie. Mereka berkomitmen tentukan bakal cagub dan cawagub sesuai aspirasi rakyat.

Ketua Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS DKI Syakir Purnomo mengatakan, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS telah

menetapkan Sandiaga Uno-Mardani Ali Sera sebagai pasangan calon. Mardani adalah kader PKS. Mardani bahkan mengatakan mulai menyiapkan berbagai kelengkapan pendaftaran bakal cawagub sejak Senin (19/9). "Saya hanya diminta urus kelengkapannya oleh Pak Sohibul Iman (Presiden PKS). Lalu saya siapkan," kata Mardani, Selasa.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani membenarkan, partai-partai lain akan merapatkan barisan agar pertarungan di Pilkada DKI nanti sama kuat. "Kami terima Sandiaga yang diusung Gerindra, tetapi kami tak mau jika pasangannya dari PKS. Ada beberapa calon yang cocok dipasangkan dengan Sandiaga," ujarnya.

Pertarungan ide

Pihak Istana Kepresidenan mengharapkan terjadi pertarungan ide dan gagasan dalam Pilkada DKI Jakarta. Persaingan antarkandidat pemimpin Ibu Kota diharapkan bukan didasarkan pada persoalan etnisitas dan agama. Semua kandidat diminta menawarkan solusi terbaiknya membangun Jakarta.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Selasa, mengatakan, pemerintah berkewajiban mengawal terwujudnya demokrasi berjalan dengan baik.

Sementara itu, terkait kontrak politik yang ia tanda tangani sesuai pengumuman pencalonannya, Basuki Tjahaja Purnama

mengatakan tak ada yang istimewa dari kontrak politik tersebut.

"Kontrak politiknya sama saja seperti yang lain. Siap membangun masyarakat. Ya sudah, siap bertugas saja," katanya.

Basuki mengatakan, meski didukung PDI-P, statusnya bukan sebagai anggota partai.

Beberapa poin kontrak politik yang harus disetujui Basuki, ia berjanji bekerja sama dengan struktur partai dalam kampanye; Basuki harus mewujudkan konsep Pembangunan Nasional Semesta Berencana dalam membangun Jakarta; dan berkomitmen memimpin masyarakat Jakarta dengan sifat mengayomi sesuai kepribadian Bangsa Indonesia.

Wakil Sekjen PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, kontrak politik tersebut berlaku selama proses pilkada berlangsung hingga selama keduanya memerintah jika kelak menang. "Ini sudah disepakati dan merupakan keinginan baik dari kedua pihak," ujarnya.

(HLN/MKN/DIA/ETA/DEN/PIN/ILO/REK/IAN/AGE/NDY/SON/CO5)

Lihat Video Terkait "PDI-P Resmi Usung Ahok-Djarot" di kompasprint.com/vod/pdipusungahokdjarot

Suarakan komentar Anda mengenai artikel ini dan baca di kompasprint.com

PILKADA

Koalisi Bahas Dua Kemungkinan

JAKARTA, KOMPAS — Hari pertama pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada 2017 yang digelar di 101 daerah, Rabu (21/9), sejumlah bakal calon sudah mendaftar. Namun, sejumlah partai politik juga masih membahas bakal calon yang akan diusung.

Pembahasan bakal calon yang akan diusung ini, semalam, antara lain dilakukan oleh sebagian parpol yang tergabung dalam Koalisi Kekeluargaan di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan yang

Empat Pasangan Mendaftar

HAL 26

digelar untuk membahas calon yang diusung di Pilkada DKI Jakarta ini dihadiri Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, serta Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy.

Dua anggota Koalisi Kekeluargaan lainnya, yaitu Partai

(Bersambung ke hal 15 kol 1-3)



KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) dan Djarot Saiful Hidayat (kanan) mengenakan jas berwarna merah kepada Basuki Tjahaja Purnama setelah pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2017 di KPU DKI Jakarta, Rabu (21/9). Pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat didukung empat partai politik, yaitu PDI-P, Partai Hanura, Partai Nasdem, dan Partai Golkar.

Koalisi Bahas Dua Kemungkinan

(Sambungan dari halaman 1)

Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kadernya tidak terlihat dalam pertemuan itu.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, Koalisi Kekeluargaan akan mencari pasangan terkuat untuk melawan pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat yang diusung koalisi PDI-P, Partai Golkar, Nasdem, serta Hanura dan kemarin telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.

Menurut Arsul, ada dua opsi yang muncul di Koalisi Kekeluargaan, yaitu memasang satu pasang calon atau mengusung dua pasang calon. Dua pasang calon itu dimaksudkan untuk memecah suara dengan skenario pilkada berlangsung dua putaran.

"Jika enam partai yang terpiisah ini tidak bisa sepakat mengusung satu pasang calon, kami tidak akan paksakan untuk itu. Jika ini terjadi, setiap calon yang diusung punya tugas meraih suara sebanyak-banyaknya, supaya perolehan suara petahana tidak lebih dari 50 persen, agar ada putaran kedua," ujar Arsul.

Selanjutnya, koalisi menyepakati, pasangan mana pun yang masuk di putaran kedua, selama bukan pasangan petahana, akan didukung oleh semua partai yang tersisa di Koalisi Kekeluargaan.

Pemenang Pilkada DKI Jakarta adalah pasangan calon yang memperoleh suara minimal 50 persen + 1 dari suara sah.

Ketua Bidang Polhukam DPP PKS Almuzammil Yusuf mengatakan, untuk mengalahkan petahana, Koalisi Kekeluargaan membahas kemungkinan membuka koalisi yang besar pada putaran kedua.

Nama-nama bakal calon yang dibahas Koalisi Kekeluargaan untuk diusung adalah Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Yusril Ihza Mahendra, dan Rizal Ramli. Kemarin juga muncul nama Agus Harimurti Yudhoyono yang disebut-sebut akan didorong Partai Demokrat.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tidak menampik kemungkinan Agus Harimurti Yudhoyono dimunculkan sebagai salah satu calon. Gerindra pun setuju jika Sandiaga Uno, yang resmi diusung oleh partainya, dipasang dengan Agus.

"Namun, yang harus kami rundingkan, siapa yang menjadi calon gubernur," ujarnya.

Sementara itu, saat menerima sejumlah warga asal Tanah Merah, Jakarta Utara, Anies Baswedan menyatakan belum menerima keputusan resmi dari pimpinan partai.

"Biarkan mereka (pimpinan partai politik) bermusyawarah. Kita tunggu saja. Nanti saya respons setelah ditunjuk," kata Anies.

Mendaftar

Kemarin, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengantar pasangan Basuki-Djarot

mendaftar di KPU DKI Jakarta. Turut hadir di acara ini, pengurus tiga parpol pendukung pasangan ini, yaitu Golkar, Hanura, dan Nasdem.

Megawati menyatakan, menggunakan hak prerogatifnya dalam menunjuk Basuki sebagai calon gubernur DKI pada Pilkada 2017. "Kali ini saya menggunakan hak prerogatif saya sebagai Ketua Umum PDI-P dan meneruskan instruksi itu ke semua jajaran struktural ke tingkat bawah juga legislatif di DPRD dan di eksekutif," ujarnya.

Dodi Reza Alex, putra sulung Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, kemarin, juga mendaftar di KPU Musi Banyuasin, Sumsel, untuk ikut pilkada di daerah itu. Dodi yang berpasangan dengan Beni Hernedi diusung 11 partai politik atau menyapu bersih semua kursi di DPRD Musi Banyuasin.

Saat ini, Beni Hernedi adalah Pelaksana Tugas Bupati Musi Banyuasin. Beni menduduki posisi tersebut setelah Bupati Musi Banyuasin sebelumnya, Pahri Azhari, tersandung masalah hukum.

Istri Wali Kota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko, Dewanti Rumpoko, kemarin, juga mendaftar untuk ikut Pilkada Kota Batu. Ia menggandeng Punjul Santoso, Wakil Wali Kota Batu periode 2012-2017.

(AGE/C11/MKN/C05/HLN/IRE/FLO/WER/WIE/HRS/ZAK/ITA/AIN/RAM/ESA/KOR/BAY/GRE/REK)



KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan bakal calon yang diusung Partai Gerindra dalam Pilkada DKI, Sandiaga Uno (kanan), sesuai mengikuti pertemuan tertutup di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (22/9). Pertemuan itu dihadiri para petinggi Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera.

Polisi Pantau Media Sosial

Berbeda Aspirasi Terkait Pilkada DKI, Boy Sadikin Mengundurkan Diri dari PDI-P

JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian Daerah Metro Jaya akan memantau aktivitas di media sosial selama berlangsungnya tahapan Pilkada DKI Jakarta. Pemantauan itu dilakukan untuk mencegah munculnya kampanye hitam ataupun ujaran kebencian terkait Pilkada DKI melalui media sosial.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono, Kamis (22/9), mengungkapkan, Polda Metro Jaya menggelar Operasi Mantap Praja Jaya dari 19 September 2016 hingga 31 Oktober 2017. Operasi tersebut untuk pengamanan seluruh tahapan Pilkada DKI Jakarta hingga pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih.

Awi mengatakan, unit kejahatan siber (*cyber crime*) Polda Metro Jaya melakukan pemantauan selama 24 jam terhadap segala bentuk kampanye hitam ataupun ujaran kebencian terkait Pilkada DKI di media sosial.

"Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Panwaslu DKI. Kalau ditemukan bukti permulaan yang cukup dan ada unsur pidana akan ditindaklanjuti. Namun, jika terkait pencemaran nama baik, maka korban yang harus melapor ke polisi," ujarnya.

Awi menambahkan, polisi juga

akan ditugaskan sebagai tim pengawal untuk mengawal setiap pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) setelah mereka ditetapkan. Tim pengawal itu beranggotakan personel polisi pilihan berdasarkan perintah Kepala Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Moechgiyanto mengatakan, Polda Metro Jaya menggerakkan sekitar 364 personel untuk pengamanan tahapan pendaftaran pasangan calon. Menurut Moechgiyanto, pengamanan tahapan Pilkada DKI saat ini mengedepankan satuan tugas intelijen dan Babinkamtibmas.

Moechgiyanto sendiri hari Jumat (23/9) ini menyerahkan jabatan kepada penggantinya, Inspektur Jenderal M Iriawan,

Mengundurkan diri

Masih terkait Pilkada DKI, ke-

putusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memilih Basuki Tjahaja Purnama sebagai cagub DKI telah membuat salah satu kader PDI-P, Boy Bernardi Sadikin, mengundurkan diri dari partai ber lambang kepala banteng itu. Boy resmi mengundurkan diri sebagai anggota PDI-P melalui surat yang dilayangkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P, Kamis.

Melalui suratnya, mantan Ketua DPD PDI-P DKI itu menjelaskan, dirinya mundur karena memiliki aspirasi berbeda terkait kepala daerah Provinsi DKI. Perbedaan itu, lanjut Boy, akan berakibat negatif pada keutuhan dan soliditas PDI-P dalam menghadapi Pilkada 2017.

Dalam suratnya, Boy juga menyatakan tak ingin jadi beban PDI-P serta dapat secara bebas menyalurkan aspirasi kepada pihak lain yang sesuai hati nurani dan keyakinan pribadinya.

Menanggapi Boy, cawagub petahana, Djarot Saiful Hidayat, menyatakan belum membaca surat Boy. "Namun, yang seperti itu gampang. Kalau tidak suka, ya, keluar," ujar Djarot.

Djarot menambahkan, pihaknya kini fokus pada pembentukan tim pemenangan pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama

dan Djarot Saiful Hidayat.

Djarot memastikan komposisi tim pemenangan dipastikan berubah sejak PDI-P bergabung dalam koalisi pengusung Basuki-Djarot. Sebelumnya, koalisi itu telah menunjuk Nusron Wahid dari Partai Golkar sebagai ketua tim. Dengan jumlah kursi terbesar di DPRD DKI, kata Djarot, PDI-P ingin berperan lebih besar di tim pemenangan.

Siapkan misi

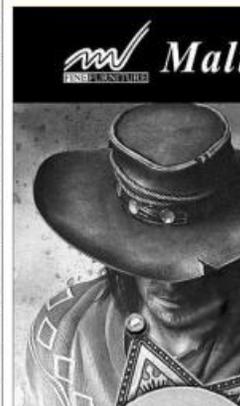
Selain membentuk tim pemenangan, pasangan Basuki-Djarot juga mulai menyusun visi misi dan program yang akan ditawarkan. Menurut Djarot, selain kelengkapan administrasi, visi misi menjadi syarat yang harus dipenuhi terkait pencalonannya.

"Secara umum kami meneruskan program yang telah dimulai Pak Jokowi dan Pak Ahok (Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama). Kami melanjutkan dan menyempurnakannya, seperti program Kartu Jakarta Pintar (KJP) di bidang pendidikan kelak bantuan diberikan hingga tingkat perguruan tinggi," katanya.

Selain pendidikan, kesehatan juga menjadi prioritas pasangan yang diusung PDI-P, Partai Nasdem, Hanura, dan Golkar ini. Menurut Djarot, pendidikan dan kesehatan menjadi fokus prog-

ram untuk mengejar target indeks pembangunan manusia 80 dari 78,9 saat ini.

Sementara cagub yang diajukan Partai Gerindra, Sandiaga Uno, kemarin, menuturkan, program kerja yang ia tawarkan akan fokus pada perubahan pola pikir warga Jakarta. Misalnya, memanfaatkan limbah sampah menjadi barang yang bermanfaat dan menggalakkan kegiatan UMKM. Tujuan program itu untuk memperluas lapangan kerja di Jakarta. (HLN/MKN/WAD/COS)



PILKADA

Empat Parpol Jagokan Agus Yudhoyono

JAKARTA, KOMPAS — Empat partai politik dikabarkan sepakat mengusung Agus Harimurti Yudhoyono, putra sulung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi bakal calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta. Empat partai itu adalah Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Namun, keputusan itu masih bisa berubah karena pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta ditutup pada Jumat (23/9) malam ini.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto hingga semalam masih menggelar pertemuan untuk menentukan calon yang akan diusung. Hadir dalam pertemuan itu, antara lain, Sandiaga Uno yang disebut sebagai calon yang akan diusung di pilkada serta Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul

Polisi Pantau Media Sosial

HAL 27

Iman.

Jika Gerindra dan PKS memutuskan mengusung pasangan sendiri, akan ada tiga pasang calon yang bertarung di Pilkada DKI Jakarta.

Pertemuan di Cikeas

Keputusan diusungnya Agus diambil dalam pertemuan di kediaman Yudhoyono di Cikeas, Jawa Barat, Kamis (22/9). Hadir dalam pertemuan itu antara lain Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PPP M Romahurmuziy.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani se usai mengikuti pertemuan mengatakan, Partai Demokrat mengusulkan satu calon gubernur dan tidak ada partai politik di koalisi yang keberatan dengan sosok tersebut. Dia tidak menampik saat ditanya bahwa

(Bersambung ke hal 15 kol 1-3)



KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Hingga pukul 23.55 WIB sejumlah wartawan dari beberapa media menunggu di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Kamis (22/9). Di tempat tersebut sedang berlangsung pertemuan pengurus koalisi parpol dari Partai Demokrat, PPP, PKB, dan PAN yang membahas calon yang akan diusung dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Empat Parpol Jagokan Agus Yudhoyono

(Sambungan dari halaman 1)

sosok yang ditawarkan Partai Demokrat itu adalah Agus.

"Tapi, segala sesuatu masih memungkinkan. Pendaftaran ditutup Jumat (23/9) malam. Sampai saat itu, komunikasi terus berjalan dan hasil dari komunikasi bukan tidak mungkin akan memengaruhi komposisi calon yang sudah dibicarakan. Apa pun bisa terjadi," kata Arsul.

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Suparno mengatakan, kepastian untuk mengusung Agus yang kini menjadi Komandan Batalyon Infanteri Mekanis 203/Arya Kemuning di Tangerang, Banten, sebagai bakal calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta mencapai 90 persen.

Sementara itu, saat disinggung nama Agus sebagai bakal calon gubernur, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan mengatakan, "Doakan saja ya. Nomor satu yang penting sudah oke, nomor dua itu gampang."

Terkait bakal calon wakil gubernur pendamping Agus, masih ada beberapa nama yang beredar. Mereka antara lain Deputy Gubernur DKI Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Sylviana Murni,

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah, dan Bupati Batang (Jawa Tengah) Yoyok Ryo Sudibyo.

Hingga semalam, koalisi empat partai itu masih membicarakan bakal calon wakil gubernur yang tepat. Mereka juga masih berupaya berkomunikasi dengan Gerindra dan PKS untuk membuka komunikasi hingga cukup memunculkan satu pasang calon di Pilkada DKI sebagai pesaing pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Sementara itu, kemarin pagi, Sandiaga Uno bertemu dengan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. "Kami sepakat bahwa kita bersama-sama berkomitmen membangun Jakarta dan memenangkan Jakarta," kata Sandi.

Mendaftar

Andika Hazrumy, anak mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, kemarin mendaftar sebagai bakal calon Wakil Gubernur Banten. Ia mendampingi Wahidin Halim, Wali Kota Tangerang periode 2003-2013 yang menjadi bakal calon gubernur. Wahidin-Andika menjadi pasangan pertama yang mendaftar

di KPU Banten.

Sementara itu, Mesak Manibor maju dalam pilkada di Sarmi, Papua. Pengadilan Tipikor Jayapura telah memvonis bebas Mesak dari dakwaan penyalahgunaan APBD Kabupaten Sarmi tahun 2012-2013 sebesar Rp 4,5 miliar untuk perbaikan dan pembangunan pagar rumah.

Namun, Kejaksaan Tinggi Papua tengah mengajukan kasasi atas putusan pengadilan tersebut. "Proses kasasi atas kasus Mesak adalah utang bagi kami. Kami akan kejar terus penyelesaian kasus ini hingga tuntas," ujar Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Fachrudin Siregar.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Robert Horik mengatakan, setiap bakal calon bisa mencalonkan diri selama belum ada putusan hukum yang *inkracht* atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

(AGE/C11/C05/MKN/HLN/WHO/ESA/FLO/KOR/AIN/BAY/ WER/FRN/WIE/GRE)



Lihat Video Terkait "Demokrat Sepakat Bergabung dalam Koalisi" di kompasprint.com/vod/demokratkoalisi



Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, Jumat (23/9), mendaftar sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta (kiri). Agus dan Sylviana diusung Partai Demokrat, PAN, PKB, dan PPP. Pada hari yang sama, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (kanan) juga mendaftar sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Mereka diusung Partai Gerindra dan PKS.



PON JABAR 2016

Penyelenggaraan Baik meski Banyak Soal

BANDUNG, KOMPAS — Meski di lapangan terjadi beberapa keributan dan ketidaklaksanaan dari sejumlah kontingen, Minggu (20/9) malam, KPU Jabar menilai penyelenggaraan PON Jabar 2016 sangat lancar. Terkait masalah ketidakterlaksanaan penilaian oleh wasit, Kemopora, KONI Pasat, dan Panitia Besar PON memisahkan hal itu ke pengurus pusat cabang olahraga. "Saya menilai penyelenggaraan PON sudah berjalan dengan baik. Kalau ada hal-hal yang kurang, itu sudah diawasi oleh PB PON. Kalau ada kekurangan, itu di luar kemampuan penyelenggara," kata Imam sesuai mengesampingkan rapat evaluasi PON, Jumat (23/9), di Bandung, Jawa Barat. Rapat yang berlangsung satu jam itu dihadiri jajaran Kemopora, KONI Pasat, PB PON, Kepolisian Daerah Jabar, dan Komando Daerah Militer III Silwangi.

Pilkada DKI Gambaran Pilpres

Kontestasi Diprediksi Berlangsung Ketat

JAKARTA, KOMPAS — Munculnya tiga poros kekuatan pada pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 merupakan refleksi dari sisa pertarungan pada pemilihan presiden terdahulu. Tiga poros itu menjadikan Pilkada DKI Jakarta sebagai batu uji sekaligus persiapan ke Pemilihan Presiden 2019.

Pada hari terakhir pendaftaran pasangan calon pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017-2022, Jumat (23/9) malam, ada dua pasang bakal calon mendaftar ke

(Bersembung ke hal 15 kol 4-7)

PROFIL CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA

 <p>Basuki Tjahaja Purnama Usia: 58 Lahir: Bandung, 29 Juni 1966 Pendidikan: • Teknik Geologi, Fakultas Teknik Mineral, Universitas Trusmi (1989) • Magister Manajemen Teknik, Trilogi Manajemen Prasetia Mula (1994)</p>	 <p>Djarot Saiful Hidayat Usia: 60 Lahir: Cirebon, 30 Oktober 1955 Pendidikan: • Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya (1980) • S-2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (1995)</p>	 <p>Agus Yudhoyono Usia: 38 Lahir: Bandung, 22 Agustus 1978 Pendidikan: • Akademi Militer (2000) • Master Strategic Studies of Institute of Defense and Strategic Studies (2002) • Master of Public Administration, National Defense University (2011), Singapura (2006) • Master of Public Administration, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, AS (2010) • United States Army General and General Staff College (2014-2015)</p>	 <p>Sylviana Murni Usia: 58 Lahir: Bandung, 11 Oktober 1958 Pendidikan: • Akademi Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember • S-2 Manajemen Aparatur, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1991) • S-3 Manajemen Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri (1992)</p>	 <p>Anies Baswedan Usia: 47 Lahir: Kuningan, 7 Mei 1969 Pendidikan: • Manajemen Bisnis, University of South Madia • Master of Public Policy, University of Maryland, College Park • PhD in Public Science, Northumbria University, University</p>	 <p>Sandiaga Uno Usia: 47 Lahir: Palembang, 23 Juni 1969 Pendidikan: • Bachelor of Business Administration, Wichita State University (1990) • Masters of Business Administration, George Washington University (1992)</p>
---	---	--	---	--	---

Pilkada DKI

(Sambungan dari halaman 1)

KPU DKI Jakarta. Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusung putra Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Agus Harimurti Yudhoyono, yang menggandeng Sylviana Murni. Pencalonan ini membuat Agus mundur dari TNI dan Sylviana mundur dari pegawai negeri sipil di Pemprov DKI Jakarta.

Sementara itu, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Sebelumnya, Rabu lalu, pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang diusung PDI-P, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura mendaftarkan diri.

Munculnya tiga pasang bakal calon di Pilkada DKI ini tidak lepas dari keberadaan tiga tokoh politik Indonesia saat ini. Mereka adalah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menggunakan hak prerogatif sebagai Ketua Umum PDI-P untuk memilih pasangan Ahok-Djarot dan mengantar pasangan itu mendaftar ke KPU DKI Jakarta. Presiden ke-6 RI Yudhoyono memimpin rapat partai koalisinya dan melepas pasangan Agus-Sylviana mendaftar ke KPU DKI. Sementara Prabowo berperan aktif dalam menggejolak pasangan Anies-Sandiaga.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris di Jakarta menuturkan, "turun gunungnya" Megawati, Yudhoyono, dan Prabowo merupakan sisa-sisa persaingan dari

Pilpres 2004, 2009, dan 2014. Pada Pilpres 2004, Yudhoyono berkompetisi dengan Megawati. Pada 2009 Yudhoyono kembali berhadapan dengan Megawati yang menggandeng Prabowo. Sementara pada Pilpres 2014, Presiden Joko Widodo yang diusung Megawati berhadapan dengan Prabowo.

Menurut Haris, kini tiga poros itu masing-masing berusaha mendapat insentif dari Pilkada DKI untuk menghadapi Pilpres 2019. Pasalnya, DKI Jakarta merupakan daerah yang strategis, baik dari sisi daya tarik media massa maupun sumber kekuatan ekonomi.

Deklarasi damai

Gun Gun Heryanto, pengajar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, melihat kompetisi di Pilkada DKI Jakarta merupakan pertarungan dari kekuatan politik yang sudah punya perencanaan strategis hingga Pilpres 2019.

Kompetisi di Pilkada DKI Jakarta, kata Gun Gun, berpotensi berlangsung ketat dan berlangsung dalam dua putaran. Pasalnya, untuk menang dalam Pilkada DKI, harus mendapat suara 50 persen + 1 dari suara sah.

Peneliti senior PARA Syndicate, Jusuf Suroso, mengingatkan, perhelatan Pilkada DKI Jakarta bukan hanya soal menang dan kalah, melainkan juga momentum membangun demokrasi.

Terkait hal itu, Ketua KPU Juri Ardiantoro mengingatkan semua pihak harus mampu menjaga suasana kondusif Pilkada DKI Jakarta. Apalagi, DKI Jakarta merupakan barometer Indonesia. "Nanti ada deklarasi damai dan pakta integritas yang harus ditandatangani para calon untuk menjaga perdamaian dan kelancaran pilkada," katanya.

Pertimbangan

Ketua Umum PPP M Roma-

JADWAL PILKADA GUBERNUR DKI JAKARTA

Putaran 1

- 3-7 Agustus 2016: Penyerahan syarat dukungan perseorangan
- 21-23 September 2016: Pendaftaran pasangan calon
- 21 September-5 Oktober 2016: Verifikasi pasangan calon
- 24 Oktober 2016: Penetapan pasangan calon
- 25 Oktober 2016: Pengundian dan pengumuman nomor urut
- 28 Oktober 2016-11 Februari 2017: Kampanye dan debat publik
- 12-14 Februari 2017: Masa tenang dan pembersihan alat peraga
- 15 Februari 2017: Pemungutan dan penghitungan suara
- 16-27 Februari 2017: Rekapitulasi suara
- 10-12 Maret 2017: Penetapan pasangan calon terpilih tanpa sengketa
- Mengikuti jadwal MK: Sengketa hasil pilkada
- Paling lama 3 hari setelah putusan MK: Penetapan pasangan calon terpilih setelah putusan MK

Putaran 2

- 4 Maret 2017: Penetapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur putaran II
- 5 Maret-19 April 2017: Rekapitulasi daftar pemilih
- 4 Maret-15 April 2017: Sosialisasi
- 6-15 April 2017: Kampanye
- 6-15 April 2017: Penajaman visi dan misi
- 16-18 April 2017: Masa tenang dan pembersihan alat peraga
- 19 April 2017: Pemungutan dan penghitungan suara
- 20 April-1 Mei 2017: Rekapitulasi suara
- 5-6 Mei 2017: Penetapan pasangan calon tanpa sengketa
- Mengikuti jadwal MK: Sengketa hasil pilkada
- Paling lama 3 hari setelah putusan MK: Penetapan pasangan calon terpilih setelah putusan MK

Sumber: Litbang "Kompas"/IWN/LUP, disarikan dari KPU DKI Jakarta



INFOGRAFIK GUNUNG

hurmuzyi mengatakan, partainya bersama Partai Demokrat, PKB, dan PAN mengusung Agus-Sylviana karena pasangan itu prospektif dan fresh.

"Mereka juga ideal, kombinasi (Agus) seorang militer yang adalah lulusan terbaik di angkatannya dan dipadu (Sylviana) birokrat yang berpengalaman," katanya.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menambahkan, Agus dan Sylviana akan mengusung slogan "Jakarta untuk Rakyat".

Prabowo menyatakan, Gerindra dan PKS memutuskan mengusung Anies-Sandiaga karena mereka diyakini mampu membawa DKI ke arah yang lebih baik adil dan sejahtera.

Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, ada tiga hal utama yang menjadi pedoman pemilihan calon, yaitu integritas, kapabilitas, dan konstituen yang dimiliki para calon.

Pilkada serentak 2017 akan berlangsung di 101 daerah. Dari data KPU hingga pukul 22.45, tercatat ada 181 pasang bakal calon yang mendaftar mengikuti kontestasi di 70 daerah. Data ini belum final karena pendaftaran hari terakhir pada Jumat akan berlangsung hingga pukul 24.00.

(GAL/REK/MKN/SAN/C1/C05/IRE/ONG)



Suarakan komentar Anda mengenai artikel ini dan baca di kompasprint.com

Jaga Kedamaian Pilkada 2017

Ekonomi Jangan Terganggu

JAKARTA, KOMPAS — Semua pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjaga Pemilihan Kepala Daerah 2017 berjalan aman dan damai. Pilkada jangan sampai malah menggerogoti pembangunan ekonomi yang sudah mulai terjaga.

Pembakaran tiga sepeda motor, sebuah kendaraan roda empat, dan penyerangan posko tim pemenangan milik bakal calon bupati Mappi, Papua, Stefanus Kaisma, di Jalan Kalimantan, Distrik Obaa, Jumat (23/9) malam, menjadi peringatan bagi setiap pasangan bakal calon kepala daerah yang akan berlaga pada Pilkada 2017.

Terkait kondisi di Kabupaten Mappi, Kepolisian Resor Mappi, Sabtu, menetapkan status Siaga Satu agar konflik pada awal tahapan pilkada itu tidak semakin meluas. Kepala Polres Mappi Ajun Komisaris Besar Wartono mengatakan, pihaknya menyiapkan 200 personel untuk mengantisipasi konflik dalam pilkada.

Jaga kesantunan

Peneliti senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, mengingatkan, momentum pembangunan politik dan ekonomi saat ini harus dijaga, terutama di Jakarta sebagai barometer pembangunan di Indonesia.

Pilkada DKI Jakarta 2017 dinilai punya potensi untuk menggerogoti modal sosial bangsa Indonesia yang selama ini pluralis. Hal itu ditandai dengan mulai hadirnya benih-benih sentimen primordial, terutama terkait suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang dijadikan instrumen membangun kekuasaan.

Pembiaran terhadap penyebaran sentimen primordial akan membahayakan iklim demokrasi yang sudah berjalan baik. Apalagi momentum pembangunan di bidang politik dan ekonomi sudah cukup terjaga selama ini. Diharapkan penyelenggara Pilkada 2017 dan aparat penegak hukum

menindak tegas berbagai penyebaran sentimen primordial, terutama dari media sosial.

"Kehadiran sentimen primordial yang tak rasional harus diredam, misalnya yang berasal dari sosmed. Para calon gubernur juga harus bertanggung jawab ikut menjamin Pilkada 2017 sebagai pertarungan antargagasan, bukan penyebaran isu tak rasional," ujar Kristiadi.

Ikrar Nusa Bhakti, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), juga berharap tiga pasangan bakal calon gubernur DKI Jakarta dapat menghadirkan pilkada damai dan jauh dari keributan. Pelaksanaan pilkada yang aman dan damai tak hanya jadi tanggung jawab ketiganya, tetapi juga keikutsertaan warga agar tak mudah terpengaruh.

"Perjalanan demokrasi dan kedewasaan masyarakat Jakarta menjadi penentu. Pernyataan keras di sosmed mungkin akan terjadi, tetapi cukup itu menjadi bunga-bunga dalam demokrasi," ujar Ikrar.

Dari New York, Amerika Serikat, sebagaimana dilaporkan wartawan *Kompas*, **Anita Yosihara**, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengingatkan semua pihak untuk mengedepankan kesantunan dalam politik. Para kandidat dan pendukung harus menghormati demokrasi. "Semua harus menghormati demokrasi, harus *wise* (bijak) berbiacara," ujar Kalla sesuai pidato di Sidang Majelis Umum Perseberkatan Bangsa-Bangsa di New York, AS.

Kesantunan dalam menyampaikan pendapat atau pernyataan penting karena dalam politik

(Bersembung ke hal 15 kol 1-2)



FOTO-FOTO: KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Tiga pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta mengikuti tes kesehatan sebagai syarat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017. Mereka datang secara berurutan ke Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Dr Mintohardjo, Jakarta, Sabtu (24/9). Pertama yang hadir adalah pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat (foto atas). Setelah itu, disusul pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni (foto tengah). Terakhir tiba adalah pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (foto bawah).

Jaga Kedamaian Pilkada 2017

(Sambungan dari halaman 1)

selalu akan ada aksi dan reaksi. Pernyataan dan tindakan yang dilakukan oleh satu kandidat atau pendukung selalu menimbulkan reaksi dari kandidat sekaligus pendukung lainnya.

Saat ini di DKI Jakarta ada tiga pasangan bakal calon. Selain Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang diusung PDI-P, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura, juga ada Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni yang diusung Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Calon ketiga adalah Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera.

Ketiga pasangan itu kemarin menjalani tes kesehatan jasmani. Pada Minggu ini, ketiganya juga menjalani tes psikologi. Tes psikologi digelar di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr Mintohardjo dan kantor Badan Narkotika Nasional untuk tes narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.

Saat mengikuti tes kesehatan di RSAL Dr Mintohardjo, Basuki-Djarot tiba paling awal, pukul 06.27. Setengah jam kemudian datang Agus-Sylviana, kemudian disusul Anies-Sandiaga pukul 12.56. Suasana keakraban terasa di antara ketiganya dengan melakukan swafoto.

Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno berharap tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) DKI Jakarta menyampaikan hasil pemeriksaan ke KPU paling lambat Rabu (28/9).

Keikutsertaan TNI

Terkait dengan keikutsertaan sejumlah perwira TNI dalam Pilkada 2017, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengakuinya.

Menurut dia, ada sejumlah perwira TNI ikut dalam Pilkada 2017 di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Mereka sudah mengajukan izin kepada Kepala Staf TNI AD sesuai ketentuan.

"Saya belum dapat data jumlah pastinya, tetapi itu ada di Jabar dan Jateng. Laporan langsung dan permohonan izin diajukan ke Kepala Staf Angkatan yang memproses. Mereka harus mengundurkan diri dari kedinasan dan tidak boleh kembali ke kesatuan kalau kalah," kata Gatot Nurmantyo saat jumpa pers.

Pernyataan Gatot Nurmantyo sejalan dengan suratnya Nomor ST/983/2016 tanggal 9 Agustus 2016, yang menegaskan bahwa anggota TNI yang akan maju dalam pilkada harus mundur dari TNI dan tidak dapat kembali jadi anggota TNI jika tidak terpilih.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menegaskan, setiap pasangan bakal calon kepala daerah yang berasal dari instansi kedinasan, seperti TNI, harus menyertakan surat keterangan pemberhentian. Karena itu, bagi anggota TNI yang gagal memenangi pilkada, mereka sudah tertutup untuk kembali ke dinas militer.

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, mengingatkan pentingnya kaderisasi di partai politik. "Partai gagal melahirkan pemimpin daerah. Hampir semua pasangan kandidat diisi figur yang tak berasal dari kadernya sendiri," kata Lucius.

Hingga Sabtu petang, data KPU menunjukkan 252 bakal calon sudah mendaftar guna mengikuti kontestasi di 85 daerah.

(SAN/OSA/ONG/MKN/
FLO/ESA/RAM/KOR)



Suarakan komentar Anda mengenai artikel ini dan baca di kompasprint.com

PILKADA

Panglima Tegaskan Sikap Netral TNI

JAKARTA, KOMPAS — Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan kembali sikap netral TNI dalam pemilihan kepala daerah. Panglima TNI juga menyatakan, prajurit TNI yang mengundurkan diri karena ikut bertarung dalam pemilihan kepala daerah tak bisa kembali lagi ke TNI, apa pun hasil pilkadinya.

Gatot mengatakan telah mengumpulkan semua panglima komando daerah militer dan menginstruksikan bahwa TNI hanya berpihak pada keamanan dan keberhasilan pilkada. "Saya juga tugasikan kepada para panglima dan prajurit paling bawah untuk menemukan sedini mungkin kalau ada anggota TNI yang terindikasi tidak netral," kata Gatot di Jakarta, Minggu (25/9).

Gatot berharap pesta demokrasi seperti pilkada dilaksanakan dengan gembira. "Karena ini pesta demokrasi, mari kita gembira dalam menyambutnya, kemudian pahami visi dan misi calon kepala daerah yang dipilih, sesuai dengan harapan masyarakat," kata Gatot.

Pada pilkada serentak tersebut TNI akan melakukan pengamanan jalannya pesta demokrasi sesuai dengan aturan yang tertuang dalam undang-undang. TNI akan melakukan pengamanan berdasarkan permintaan dari kepolisian.

"TNI akan memberikan bantuan dengan mem-BKO-kan pasukan kepada kepolisian atas permintaan. Jadi, kalau kami diminta, tetapi tidak mengerahkan, berarti melanggar undang-undang," kata Gatot lagi.

Menurut Panglima TNI, prajurit TNI dan pegawai negeri sipil di lingkungan TNI yang mengundurkan diri karena ikut pilkada tidak bisa kembali lagi ke TNI. Ketentuan itu, menurut Gatot, telah diatur secara jelas dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/983/2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang ketentuan dan tata acara pemilu pilkada bagi semua anggota TNI dan PNS di lingkungan TNI.

Bagi anggota TNI dan PNS yang akan mencalonkan diri untuk pilkada, surat pengunduran diri agar diajukan saat ia telah ditetapkan sebagai calon peserta pilkada secara resmi. Surat pengunduran tersebut juga tidak bisa ditarik kembali. Setelah itu, TNI akan mengeluarkan surat yang berisi keputusan pemberhentian sebagai PNS/TNI. Surat itu harus diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai peserta pilkada. (EDN)

PILKADA

Jakarta dan Tiga Poros Kekuasaan

Money is the Mcmansion in Sarasota that starts falling apart after 10 years. Power is the old stone building that stands for centuries.
— Francis Underwood, House of Cards

"Ini pilkada kayak pilpres, ya," seloroh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/9). Celetukannya ditanggapi tawa sejumlah pemimpin partai politik yang menjadi tamunya.

Malam itu, Yudhoyono mengundang para pimpinan partai politik koalisi Kekeluargaan ke kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, untuk berkolaborasi membicarakan kemungkinan mengusung satu pasangan bakal calon untuk menantang pasang-an petahana pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Basuki Tjahaja Purnama-Saiful Hidayat.

Malam itu, ada enam partai politik yang memiliki kursi di DPRD DKI Jakarta yang belum menentukan bakal calon yang mereka usung pada pilkada. Enam partai yang awalnya disebut dengan Koalisi Kekeluargaan itu adalah Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

"Selama ini, kesannya Koalisi Kekeluargaan lambat dalam memutuskan pasangan calon kami. Itu tidak keliru. Kami memang menunggu sampai Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan mengambil keputusan, lalu kami finalisasi," kata Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani.

Sehari sebelumnya atau pada Selasa, PDI-P mengumumkan mengusung Basuki-Djarot bersama Golkar, Nasdem, Hanura. Keputusan PDI-P itu mendorong partai politik yang tersisa untuk merapatkan barisan. Cita-citanya, melahirkan satu pasangan calon agar perlombaan Pilgub DKI Jakarta berlangsung *head-to-head*.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Presiden PKS Mohamad Sohbiul Iman, dan perwakilan kedua partai itu tidak terlihat sama sekali di Ci-

keas, Rabu malam itu.

Namun, berdasarkan informasi yang diterima *Kompas*, hari itu secara diam-diam Prabowo sebenarnya juga datang ke Cikeas. Kedatangannya hampir bersamaan dengan para petinggi partai politik yang lainnya.

Kebabatan

Dalam pertemuan di Cikeas tersebut, Prabowo mengajukan nama Sandiaga Uno untuk dijadikan calon gubernur, dan menawarkan calon yang akan diusung koalisi empat partai (Demokrat, PPP, PAN, dan PKB).

Namun, pembicaraan antara Prabowo dan Yudhoyono tidak mencapai titik temu. Pasalnya, Yudhoyono saat itu berkecukuh menyorongkan Agus Harimurti Yudhoyono, putranya, sebagai calon gubernur. Sementara Gerindra berkecukuh Sandiaga menjadi calon gubernur.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Desmond J Mahesa menuturkan, "Gerindra sebenarnya tidak masalah jika Sandiaga dijadikan Wakil Gubernur. Justru Gerindra yang ingin jangan sampai ada tiga pasang calon. Cukup dua saja. Namun, calon pasangannya jangan Agus."

Karena tidak mencapai titik temu, Prabowo beranjak dari Cikeas. Ia langsung menuju kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, dan memanggil Sohibul Iman.

Secara terpisah, Rabu malam itu, Gerindra dan PKS menggelar rapat tersendiri. Poros kolaborasi di Pilgub DKI yang awalnya dicita-citakan cukup dua buah pun terpecah menjadi tiga koalisi.

Koalisi Demokrat, PPP, PKB, dan PAN yang dipimpin Yudhoyono (Demokrat) akhirnya



RIWATY/LASTI KURNIA

Boneka manusia
Monas beraksi mengingatkan warga untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta. Aksi ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi Pilkada DKI Jakarta yang digelar di kawasan Hari Tanpa Kendaraan Bermotor di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (4/9).

mengusung Agus Yudhoyono-Sylviana Murni. Sementara itu, Koalisi Gerindra-PKS yang digawangi Prabowo mengajukan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Adapun koalisi PDI-P, Partai Golkar, Hanura, dan Nasdem mengusung pasangan petahana, Basuki Tjahaja Purnama-Saiful Hidayat.

Titik persuaran

Selama penentuan pasangan bakal calon yang akan diusung di Pilkada DKI Jakarta ini, suasana seperti pemilu presiden. Berbeda dengan 100 daerah peserta pilkada lainnya. Dalam Pilkada DKI Jakarta, para ketua umum partai politik ikut turun tangan mengambil alih kerja lobi-lobi politik. Konsolidasi pun dilakukan di rumah ketua umum setiap partai politik yang

menjadi pemimpin koalisi. Selama sepekan terakhir, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat (tempat kediaman Megawati Soekarnoputri), Cikeas (kediaman Yudhoyono), dan Hambalang/Jalan Kertanegara (kediaman Prabowo), menjadi tiga titik persuaran politik pada Pilkada DKI Jakarta.

Sebagaimana dikatakan oleh anggota Kongres Amerika Serikat, Francis Underwood, dalam serial televisi *House of Cards* hesitan Netflix, kekuasaan bertahan lebih lama daripada uang, bagaikan bangunan tua yang terbuat dari batu. Kekuasaan seorang pemimpin politik lambat laun bisa meredup. Namun, jika dikelola dengan baik, kekuasaan itu tidak akan menghilang, akan tetap ada bagaikan bangunan yang kokoh.

Kemunculan tiga poros kolaborasi, yang masing-masing diketuai Megawati, Yudhoyono, Prabowo, dalam Pilgub Jakarta menunjukkan hal tersebut. Dari waktu ke waktu, poros kekuasaan politik di Indonesia tidak banyak berubah. Titik pusat kekuasaan masih saja berputar di tiga tempat, yakni Teuku Umar, Cikeas, dan Hambalang/Kertanegara.

Kediaman Megawati di Teuku Umar, selama 10 tahun—dari 2004-2014—menjadi simbol kekuatan oposisi terhadap Yudhoyono, yang menjabat Presiden selama dua periode dan disimbolisasikan dengan Puri Cikeas. Hingga saat ini Teuku Umar masih menjadi pusat perpolitikan nasional, terutama karena PDI-P kini menjadi partai pengusung utama Jokowi-Kalla.

Puri Cikeas, yang pernah menjadi titik keramaian perpolitikan Indonesia sekitar 2004-2014 sempat lebih sepi ketika Yudhoyono tak lagi menjabat presiden. Namun, melalui momentum Pilkada DKI Jakarta, Cikeas kembali mewarnai pemberitaan di media massa. Pendopo di kediaman Yudhoyono itu kembali diramaikan oleh awak media massa yang memburu berita.

Sembunyi menunggu pengumuman pasangan Agus Yudhoyono-Sylviana Murni, Kamis (22/9) dini hari, Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukrianto mengatakan, setelah sekian lama, Cikeas akhirnya kembali ramai.

"Episentrum politik saat ini kembali di Cikeas, seperti semasa tahun 2004, ramai sekali,"

celetuknya.

Adapun Hambalang dan Kertanegara, kediaman Prabowo, sempat menjadi saksi Pemilu Presiden 2014 yang cukup dinamis. Hambalang menjadi simbol Koalisi Merah Putih (KMP) yang saat itu bersaing dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang berpusat di Teuku Umar. Setiap pemimpin di tiga poros koalisi itu kini memang tidak lagi menjabat sebagai penguasa negara. Megawati adalah presiden kelima, Yudhoyono adalah presiden keenam, Prabowo sempat menjadi calon presiden ketujuh. Namun, dalam Pilkada DKI Jakarta kali ini, kekuasaan dan atraksi politik mereka bertiga selaku pemimpin partailah yang menentukan arah perpolitikan lokal di Jakarta.

(AGNES THEODORA)



FOTO: FOTO: KOMPAS/ALIF ICHWAN

Pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (kiri) datang pertama diikuti pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno (tengah) dan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni (kanan) ke kantor Badan Narkotika Nasional di Cawang untuk mengikuti tes bebas narkoba, Minggu (25/9). Pada hari yang sama, ketiga pasangan bakal calon ini juga mengikuti tes psikologi di RSAL Mintohardjo, Jakarta Pusat. Tes tersebut bagian dari persyaratan yang harus dipenuhi para kandidat yang akan berlaga dalam Pilkada 2017.

BNN Telusuri Jejak Narkoba

Pasangan Calon di Pilkada DKI dan Bekasi Jalani Tes Psikologi

JAKARTA, KOMPAS — Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta menelusuri kemungkinan penggunaan narkoba dalam kurun enam bulan terakhir pada pasangan calon gubernur/wakil gubernur DKI 2017-2022. Calon yang tersandung masalah narkoba bisa diganti dengan nama lain.

Pemeriksaan bebas narkoba pada ketiga pasangan kandidat dilakukan di kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Cawang, Minggu (25/9).
Petugas mengambil sampel berupa urine dan 50 miligram rambut. Selain itu, petugas juga melakukan wawancara singkat dengan setiap kandidat.
Kepala BNN Provinsi DKI Wahyu Adi mengatakan, rambut perlu diambil untuk tes narkoba karena rambut bisa menyimpan jejak penggunaan zat terlarang hingga enam bulan ke belakang. Sementara darah ataupun urine hanya menyimpan jejak penggunaan zat terlarang dalam hitungan hari.

"Baik contoh rambut maupun urine akan diuji di laboratorium. Hasilnya bisa muncul 27 September," ujar Wahyu.
Selain uji bebas narkoba, ketiga pasangan calon juga menjalani tes psikologi di RSAL Mintohardjo. Sehari sebelumnya, mereka mengikuti tes kesehatan yang juga diadakan di RSAL.
Dalam tes psikologi yang berlangsung sekitar tiga jam, setiap calon menjalani tes tertulis dan wawancara.
Beragam pertanyaan diajukan kepada mereka untuk mengetahui karakter dan kepribadian masing-masing.
Pertanyaan-pertanyaannya antara lain alasan menjadi gu-

bernur DKI, cara mengendalikan diri pada situasi mendesak, dan proses pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah.
Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sumarno mengatakan, proses verifikasi calon melalui tes kesehatan, tes psikologi, dan uji bebas narkoba sudah selesai. Hasil verifikasi secara keseluruhan akan diumumkan pada 29 September.
"Seandainya ada calon yang tidak memenuhi syarat, ada waktu untuk parpol mencari calon pengganti. Prosedur serupa tetap dilakukan (untuk calon pengganti)," kata Sumarno.
Menurut jadwal Komisi Pemilihan Umum, 24 Oktober merupakan hari penetapan pasangan calon.
Pilkada Bekasi
Lima bakal pasangan calon peserta Pilkada Kabupaten Bekasi juga menjalani tes psikologi, Minggu. Tes diadakan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta.
Setelah tes kesehatan, Senin ini, semua pasangan dijadwalkan

mengikuti tes kesehatan dan uji bebas narkoba.
Dua bakal pasangan calon dari jalur perseorangan yang mengikuti tes psikologi kemarin ialah pasangan Obon Tabroni-Bambang Sumaryono dan In Farihin-KH Mahmud Al Hafiz.
Adapun tiga pasangan lainnya yang diusung parpol ialah Meiliana Kartika Kadir-Abdul Kholik (diusung PDI-P, PPP, PKB, dan PBB), Neneng Hasanah Yasin-Eka Supria Atmaja (Golkar, PAN, Hanura, dan Nasdem), serta Sa'duddin-Ahmad Dhani (PKS, Gerindra, dan Demokrat).
Seusai mengikuti tes, Ahmad Dhani mengaku minum obat sakit kepala. "Saya, kan, sudah lama enggak ujian, terakhir tahun 1991," katanya seraya tersenyum.
Adapun Sa'duddin mengapresiasi adanya tes psikologi pada pilkada serentak kali ini karena pada pilkada sebelumnya hanya tes kesehatan. Sa'duddin dan Dhani optimistis dapat melewati tes psikologi, tes kesehatan, dan uji bebas narkoba.
Adapun calon petahana Bupati

Bekasi Neneng Hasanah Yasin mengaku tidak mengalami kesulitan dalam menjalani tes psikologi. "Lebih banyak soal kejiwaan, bagaimana cara menghadapi masalah dan lainnya. *So far so good* (sejauh ini lancar)," ucap Neneng.
Meiliana Kartika Kadir menilai, tes psikologi ini lebih banyak untuk mengetahui kepribadian, inteligen, dan karakter pasangan calon.
"Tidak susah-susah sekali, sih," ungkap Meiliana.
Ahmad Junaedi, salah satu anggota tim penguji dari Himpunan Psikologi Indonesia Jawa Barat, mengungkapkan, tes psikologi berupa tes tertulis dan wawancara tersebut dilakukan untuk mengetahui kesehatan mental, cara berpikir, cara berkomunikasi, dan cara menyelesaikan pekerjaan dari tiap-tiap pasangan calon.
"Kami belum tahu apakah tes ini bisa menggagalkan pasangan calon untuk maju atau tidak. Yang jelas hasilnya akan kami sampaikan kepada KPU," ujar-

nya.
Ketua KPU Kabupaten Bekasi Idham Kholik menambahkan, pihaknya memilih RSPAD Gatot Subroto sebagai lokasi tes kesehatan dan psikologi karena telah teruji dan memiliki peralatan yang lengkap untuk keperluan tes.
RSPAD Gatot Subroto juga menjadi lokasi tes kesehatan para calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu Presiden 2014.
Selanjutnya, kata Idham, KPU akan memeriksa berkas pendaftaran bakal pasangan calon. Jika dianggap memenuhi syarat, pasangan calon akan ditetapkan pada 24 Oktober.
KPU akan mengadakan pengundian nomor urut pasangan calon pada 25 Oktober.
(ILO/HLN/Co5)

Lihat Video Terkait "Cagub dan Cawagub DKI Jakarta Menjalani Tes Narkoba di BNN" di kompasprint.com/vod/cagubdikitesbn

KONSULTAN POLITIK

Demi Meraih Kemenangan...

Konsultan politik berperan penting dalam pemilihan kepala daerah. Selain membantu memenangkan calon kepala/wakil kepala daerah, hasil kerja mereka juga jadi parameter partai politik saat menentukan calon yang akan diusung di pilkada. Biaya tinggi untuk bayar mereka, tak jadi kendala demi kemenangan.

Partai Nasdem merupakan salah satu partai yang menilai penting peran konsultan politik. Setiap pemilihan kepala daerah (pilkada), Nasdem mengharuskan bakal calon kepala/wakil kepala daerah yang hendak diusung, menyertakan hasil survei tingkat elektabilitas dirinya bersama pasangannya. Hasil survei ini harus dikeluarkan oleh konsultan politik yang direkomendasikan partai.

Hasil survei itu menjadi parameter utama dalam menentukan calon kepala/wakil kepala daerah yang akan diusung di suatu daerah. Semakin tinggi elektabilitas calon, kian tinggi pula peluangnya diusung Nasdem.

Strategi ini, menurut Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Nining Indra Saleh, Senin (26/9), di Jakarta, terlihat hasilnya pada pilkada serentak tahun 2015. Dari 269 daerah yang menggelar pilkada pada tahun itu, Nasdem berhasil menang di 138 daerah.

Bakal calon harus mengeluarkan uang sendiri untuk menggunakan jasa tersebut. Menurut Nining, hal itu sekaligus untuk menunjukkan keseriusan calon mengikuti pilkada.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menuturkan, partainya juga membebaskan biaya survei kepada calon. Bedanya, untuk survei pra penetapan calon oleh partai, PPP membiayai dulu survei. Setelah PPP menetapkan calon yang akan diusung, calon itu wajib mengembalikan uang survei ke partai. "Partai punya uang dari mana kalau harus membiayai survei?" ujarnya.

Ketua Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Golkar Yorrys Raweyai mengatakan kas partai digunakan untuk membiayai survei. Namun, survei tidak untuk semua daerah. Papua, misalnya, dikeskualifikasi karena kondisi geografi yang berat sehingga menyulit-

kan survei.

Ratusan juta

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, survei elektabilitas calon membutuhkan biaya hingga ratusan juta rupiah. Biaya survei dengan 400 responden, antara Rp 110 juta hingga 150 juta. Tarif survei dengan 800 responden, Rp 200 juta-Rp 250 juta. Tinggi-rendahnya biaya ini bergantung pada tingkat kesulitan di daerah untuk survei.

Selain survei, konsultan politik ini menawarkan jasa lainnya di pilkada seperti strategi untuk menghadapi calon lainnya dan menghidupkan jaringan calon. Yunarto menolak menyebutkan biaya yang harus dikeluarkan calon jika menyewa paket lengkap, tidak sebatas survei. Namun, dengan melihat tarif sekali survei, sudah bisa terbaca besarnya biaya yang harus dikeluarkan calon untuk menggunakan jasa politik konsultan selama pilkada.

Namun, hal itu menyurutkan keinginan sejumlah kandidat untuk menggunakan konsultan politik. "Antusiasme calon menggunakan konsultan politik masih terasa," ujar Yunarto. Namun, ia menolak menyebutkan jumlah kliennya.

Minat tertinggi, lanjut Yunarto, adalah untuk melakukan survei elektabilitas calon. Pasalnya, partai memakai hasil survei itu sebagai salah satu pertimbangan untuk menentukan calon yang akan diusung. Selain itu, konsultan politik juga dinilai penting untuk menyajikan data pembandingan dari data yang disajikan tim sukses. Kehadiran konsultan juga dibutuhkan untuk memberikan panduan dalam penerapan strategi kampanye oleh tim sukses.

CEO Cyrus Network Hasan Nasbi juga mengatakan masih tingginya antusiasme calon menggunakan konsultan politik.



Foto-foto para tokoh terpasang dalam rilis sebuah lembaga survei terkait elektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (21/8). Pilkada DKI akhirnya resmi diikuti tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Bahkan, tidak hanya untuk Pilkada 2017. Sejumlah orang yang berniat maju di Pilkada 2018, bahkan sudah bersiap memesan jasanya.

Ukur kemampuan

Rusli Habibie dan Idris Rahim, termasuk salah satu bakal calon yang menggunakan jasa konsultan politik untuk bertarung di Pemilihan Gubernur Gorontalo, pada tahun depan. Ishak Liputo, tim sukses Rusli Habibie-Idris Rahim menuturkan, pasangan yang diusung Partai Golkar ini menyewa jasa konsultan politik Saiful Mujani.

Ishak Liputo, tim sukses Rusli Habibie dan Idris Rahim mengatakan peran jasa konsultan politik penting untuk mengukur kemampuan pasangan dalam beberapa periode menjelang hari pemilihan. Konsultan politik dapat mengukur kebutuhan rakyat sebuah wilayah dan tema kampanye yang

cocok.

Menurut Ishak, jasa konsultan politik Saiful Mujani telah digunakan saat survei pasangan calon jauh sebelum pendaftaran sebagai peserta pilkada, yakni pada 6 Agustus lalu. Mengenai jumlah uang dibayar kepada konsultan politik, Ishak tidak tahu-menahu.

Fadel Muhammad, tim sukses pasangan Hanna Hasanah dan Tony Yunus yang diusung PDI-P dan PPP di Pilkada Gorontalo, mengatakan, menggunakan jasa konsultan dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Terkait jasa tersebut, Fadel mengatakan telah membayar jasa konsultan dari UNG sebanyak Rp 70 juta. "Mereka kami bayar dari pendaftaran hingga hari-H pilkada. Kami rasa, memanfaatkan jasa politik orang daerah lebih jitu sebab mereka

yang mengenal karakter masyarakat," katanya.

Namun, ada juga pasangan bakal calon yang tak menggunakan jasa konsultan politik di pilkada ini. Mantan Bupati Bau-bau di Sulawesi Tenggara Amirul Tamim (2003-2013) yang kini menjabat Anggota Komisi II DPR, salah satunya. Dua kali mengikuti pilkada, dia tidak pernah memakai jasa konsultan politik karena tarifnya yang mahal.

"Gaji saat menjadi kepala daerah hanya Rp 6 juta. Jika dikalikan masa jabatan selama lima tahun, berarti total Rp 360 juta. Artinya kalau pakai konsultan politik, untuk melakukan survei saja, bisa menghabiskan sepertiga gaji selama lima tahun," ujarnya.

Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo mengatakan sulit untuk

mengharapkan gaji kepala/wakil kepala daerah dapat menutup biaya politik yang dikeluarkan selama pilkada. Di sinilah keberadaan donatur sering kali dimanfaatkan oleh calon. Namun, para donatur itu biasanya menuntut balas jasa ketika calon yang didukungnya memenangi pilkada. Balas jasa yang diminat donatur itu, misalnya berupa proyek-proyek pemerintah.

Kondisi ini seharusnya bisa dicegah karena menjadi awal dari praktik korupsi. Caranya, dengan mengoptimalkan pengawasan dana kampanye calon saat pilkada dan pengawasan kepada kepala/wakil kepala daerah saat mereka menjabat. "Jika pengawasan optimal, pemimpin daerah akan ragu melakukan jual-beli pengaruh sejak saat pilkada," ujar Adnan Topan.

(AGE/APA/GAL/ZAL/DRD)

PILKADA DKI

Mencari Sosok Bang Ali

Semarak kontestasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta resmi dimulai. Tiga pasangan calon lahir dari tiga poros kekuatan politik. Pada 15 Februari 2017, rakyat akan menjadi penentu dalam perjalanan penuh tantangan mencari sosok pemimpin yang dicintai dan mencintai rakyat.

Spanjang 1966-1977, Ali Sadikin menjadi sosok gubernur DKI Jakarta. Sampai sekarang, sosoknya masih sering dijadikan patokan figur pemimpin yang dicintai rakyat. Kede-katannya dengan penduduk Jakarta tidak diragukan sehingga ia diberi sapaan akrab "Bang Ali".

Dalam otobiografinya, *Membenahi Jakarta Menjadi Kota yang Manusiawi*, Bang Ali menceritakan kenangannya saat berpisah dengan rakyat Jakarta di ujung masa jabatannya. Perpisahan itu memang mendapat perhatian luas. Berbulan-bulan menjelang serah terima jabatan Bang Ali, media massa penuh dengan berita mengenai Bang Ali dan bagaimana nasib Jakarta sepeninggal dia.

Pada peringatan 450 tahun Jakarta, di Minggu pagi, saat iring-iringan menuju kantor balai kota, berbondong-bondong orang mengikuti Bang Ali dan istrinya. Masyarakat menyebarkan Bang Ali dan meminta bersalaman sebelum ia meletakkan jabatan. Bang Ali menuliskan, ia tidak mampu menahan perasaannya waktu itu. "Tidak terasa, mata saya sudah basah," katanya.

Demikian pula saat Bang Ali merayakan ulang tahun ke-50 di ujung masa baktinya. Hari itu, 7 Juli 1977, dia didatangi berbagai lapisan masyarakat di Balai Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tiba-tiba seorang laki-laki berpenampilan sederhana muncul membawa bungkusan besar dari bambu yang berisi kue tar sebagai tanda terima kasih setelah kampungnya di Johar Baru diperbaiki.

Bukan hanya kedekatan dengan rakyat, sosok Bang Ali juga berkesan karena ketegasan, keramahan, dan konsistensi. Di masa-masa berat, ia mengubah wajah Jakarta yang ambruk, penuh sampah, rawan banjir, sarang mafia, dan rentan krisis menjadi kota yang layak disebut ibu kota negara.

Februari 2017 mendatang, rakyat Jakarta akan memilih pemimpin baru. Ada tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang bertarung dari tiga poros kekuatan politik yang berbeda. Mereka adalah pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (PDI-P, Golkar, Nasdem, Han-

ra), pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni (Demokrat, PPP, PKB, PAN), dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Gerindra, PKS).

Permasalahan Jakarta saat ini tentu sudah banyak berubah dibandingkan era Bang Ali. Namun, nilai-nilai kepemimpinan yang dibutuhkan di DKI Jakarta tetap sama, yaitu ketegasan, tanggung jawab, konsistensi antara ucapan dan perbuatan, dan keramahan serta kedekatan dengan rakyat yang dipimpinya.

Dalam acara *Satu Meja* bertajuk "Mencari Pemimpin Jakarta" di Kompas TV, Selasa (27/9) dini hari, sosok Bang Ali kembali disebut sebagai patokan figur pemimpin oleh para calon.

Hadir sebagai pembicara dalam acara yang dipandu Pemimpin Redaksi Harian *Kompas* Budi-

man Tanurejdo itu adalah Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan, Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah, serta Direktur Eksekutif Poltracking Institute Hanta Yuda.

Adu kelebihan

Para kandidat yang akan bertarung di pilkada mendatangi beberapa kali menyebut kepemimpinan Bang Ali sebagai referensi kepemimpinan di Jakarta. Anies Baswedan, misalnya, pernah mengatakan ingin menghidupkan kembali gaya kepemimpinan Bang Ali untuk mewujudkan Jakarta yang lebih baik. PDI-P selaku pengusung Basuki Tjahaja Purnama menilai kepemimpinan Basuki selama memimpin Jakarta menyerupai ketegasan dan keberanian Bang Ali.

Hanta Yuda mengatakan, setiap calon pasti memiliki referensi tertentu. Membandingkan diri dengan figur-figur pemimpin besar menjadi salah satu strategi untuk mencitrakan kesan positif dan menjul karakter personal. "Tetapi, semua akan kembali pada selera publik, selera rakyat. Akhirnya, pemilih yang menentukan," katanya.

Pertarungan di pemilihan gubernur mendatang tergantung pada kemampuan ketiga pasangan calon beserta mesin partainya untuk berada strategi dan menjul kelebihan setiap figur di depan rakyat untuk menyelesaikan masalah Ibu Kota yang

masih saja menumpuk.

Berdasarkan survei Poltracking Institute, tingkat kepuasan publik Jakarta terhadap pemerintahan Basuki-Djarot selama ini cukup tinggi, yakni 68 persen. Hal itu, ujar Hanta, bisa menjadi kekuatan bagi pasangan Basuki-Djarot.

Ahmad Basarah mengatakan, bukti kerja Basuki-Djarot selama menjabat nyata dilihat oleh publik. "Kami tinggal mengapitalisasi tingkat kepuasan publik itu menjadi elektabilitas, lalu memperbaiki kekurangan sekarang, seperti menjadi pemimpin yang kalau bicara lebih santun dan sopan, membangun komunikasi yang lebih intensif dengan rakyat, yang lebih mengayomi," kata Basarah.

Namun, pihak penantang juga memiliki keuntungan dan kelebihan yang sama kuat dengan mencitrakan diri sebagai sosok antitesis dari petahana saat ini.



KOMPAS/BADITTA HELABUMI

Polisi berjaga di depan kantor KPU DKI Jakarta pada hari pertama pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Rabu (21/9). Pilkada DKI Jakarta diikuti tiga pasangan calon dari tiga koalisi partai.

Pasangan Anies-Sandiaga, menurut Hidayat Nur Wahid, merupakan kebalikan dari pemertua petahana saat ini. Anies memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Ia mendirikan Gerakan Indonesia Mengajar untuk menjamin pendidikan berkualitas hingga ke seluruh pelosok Indonesia.

"Bicara korupsi yang marak, Anies merupakan sosok yang sa-

ngat anti korupsi. Jika kaitannya dengan kesantunan pemimpin dalam berkomunikasi, mereka berdua sangat santun," papar Hidayat.

Adapun pasangan Agus-Sylviana ingin memanfaatkan lingkungan masyarakat Jakarta yang tidak puas dengan pemerintahan saat ini serta kelompok yang puas, tetapi tidak akan memilih kembali Basuki-Djarot. Menurut

Syarief Hasan, sepak terjang Basuki-Djarot saat ini masih jauh dari harapan rakyat.

Sosok Agus yang berlatar militer pun dinilai mampu melahirkan kepemimpinan yang tegas, konsisten, dan bertanggung jawab terhadap janji-janjinya.

Paula Becker dan Jean Raveloson dalam *What is Democracy* menuliskan, baik-buruk

kepemimpinan atau pemerintahan, tergantung pada rakyat. Pemimpin atau legislator yang berkualitas hanya akan lahir dari para pemilih yang juga berkualitas. Kini, perjalanan mencari sosok seperti Bang Ali yang tegas, disiplin, berani, dan ramah berada di tangan rakyat Jakarta. Selamat merayakan pesta demokrasi. (AGNES THEODORA)



KOMPASTV

SENIN PUKUL 22.00

INDONESIA FM 92,0 JAKARTA

JUMAT PUKUL 19.00

hypermarket

Low prices and more

PERIODE PROMOSI 28-30 SEPTEMBER 2016
BERLAKU DI JABODETABEK, KARAWANG, CILEGON & SERANG

<p>DISKON 20%</p> <p>SANIA Minyak Goreng Ref. 2.1L TANPA HICARD RP 22.900 <small>Maka 7 pcs/karton/konsumen/hari</small></p> <p>Rp 20.900 DENGAN HICARD</p>	<p>VALUE PLUS</p> <p>VALUE PLUS BPS Beras IR 64 5 Kg</p> <p>Rp 55.590</p>
<p>DISKON 5% DENGAN HICARD</p> <p>MAMY POKO 548, M40, L36, XL30, XXL 28</p> <p>Rp 69.000</p>	<p>DISKON 10%</p> <p>INDOMIE Goreng Rendang 91 TANPA HICARD RP:</p> <p>Rp 73.650</p>
<p>DISKON 20%</p> <p>SEMUA KOPI (MEREK TERTEUTU)</p> <p>Rp 16.900</p>	<p>DISKON 20%</p> <p>S26 PROMISE Box 700 gr</p> <p>Rp 124.990</p>

PILKADA DKI 2017

Pasangan Calon Belum Lengkapi Persyaratan

JAKARTA, KOMPAS — Hingga kemarin, mayoritas pasangan calon belum melengkapi seluruh syarat pendaftaran. Batas waktu untuk melengkapi persyaratan adalah 4 Oktober.

Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta Sumarno menyatakan, hampir semua pasangan calon belum melengkapi syarat-syarat calon dan pencalonan seperti surat keterangan catatan kepolisian, surat bebas pajak lima tahun, dan surat pailit dari pengadilan negeri.

Pada pukul 10.00 hari ini, KPU DKI Jakarta mengundang pasangan calon, pimpinan partai pengusung, dan tim pendukung dalam pleno terbuka di Kantor KPU DKI Jakarta. Tujuannya untuk menyampaikan hasil verifikasi dan syarat yang harus dilengkapi. Hasil tes kesehatan, psikotes, bebas narkoba, dan persyaratan lainnya juga akan diumumkan hari ini.

Kepala Humas Badan Narkotika Nasional Slamet Pribadi mengatakan, hasil pemeriksaan langsung diserahkan kepada KPU setempat. Slamet menambahkan, sejumlah pasangan calon diperiksa di BNN pusat karena keterbatasan alat di daerah. Pemeriksaan bebas narkoba dengan sampel rambut belum bisa di-

lakukan di BNN wilayah. Sampel rambut dinilai lebih akurat karena mampu mendeteksi konsumsi narkoba 2-3 bulan lalu.

Dihubungi secara terpisah, bakal calon wakil gubernur Sandiaga Uno optimistis seluruh berkas persyaratan telah dilengkapi. Dia juga telah mendapat tanda bukti laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari KPK. "Setahu saya dari tim, sudah lengkap semua. Tinggal menunggu informasi dari KPU," katanya.

Sementara itu, bakal calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama mengaku belum mengajukan cuti selama masa kampanye yang dimulai 25 Oktober. Dia mengaku masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Pasal 70 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Basuki juga enggan membahas tim pemenangannya. Ia menyerahkannya kepada parpol pendukung.

Adapun pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni belum memberikan konfirmasi hingga pukul 19.00.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta aparat pemerintah netral pada pilkada serentak.

(NDY/MDN/C05)

Kemang Segera Dibongkar

Pemprov Diminta Hormati Gugatan di PTUN

JAKARTA, KOMPAS — Setelah Bukit Duri, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membebaskan lahan dari hunian di Kemang, Jakarta Selatan, dan Bidaracina, Jakarta Timur. Pembebasan lahan di Kemang untuk pelebaran Kali Krukut, sedangkan di Bidaracina untuk sodetan Ciliwung.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, sesuai mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau proyek transportasi massal cepat (MRT) di Dukuh Atas, Jumat (30/9), menegaskan, dari hasil inventarisasi ditemukan 505 bangunan yang melanggar di Kemang. Bangunan ini yang akan dibongkar untuk pelebaran Kali Krukut.

"Kami akan 'keruk' 505 rumah untuk melebarkan Kali Krukut. Semuanya bangunan tak berizin. Bukan pengrusakan. Ini pembongkaran," katanya.

Jika kemudian ada bangunan dengan status hak milik, lanjut Basuki, itu tetap akan ditinjau. Namun, tindakan yang diambil dalam waktu dekat ini dikhususkan untuk membongkar bangunan yang melanggar di sepanjang bantaran Kali Krukut.

"Setelah dibongkar, di area bantaran itu akan langsung dipasang *sheet pile* (turap beton)," katanya.

Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi mengatakan, rapat teknis untuk pengerukan Kali Krukut digelar Senin pekan depan.

Pelanggaran aturan antara lain karena bangunan berdiri melewati garis sempadan kali.

Dari pengamatan, bantaran Kali Krukut di kawasan Kemang didominasi tembok pembatas yang dibangun para pemilik gedung. Tembok-tembok tersebut dibangun tepat di bibir sungai sehingga bantaran Kali Krukut

sulit diakses.

Gedung-gedung tersebut terdiri dari hotel, kafe, kompleks apartemen, ataupun pusat perbelanjaan. Lokasinya tersebar di beberapa kelurahan.

Sebelumnya, warga di sejumlah perkampungan di sepanjang Kali Krukut di Kecamatan Mampang Prapatan juga sudah menerima informasi akan adanya rencana normalisasi bantaran Kali Krukut.

Hingga saat ini belum ditentukan waktu pelaksanaan ataupun target yang akan dicapai dalam penertiban bantaran Kali Krukut di Kemang ini. Kepala Satpol PP Jakarta Selatan Ujang Harmawan mengatakan, waktu dan langkah penertiban secara rinci masih akan dibahas dalam rapat teknis pekan depan.

Proses gugatan

Untuk Bidaracina, menurut Basuki, Pemprov DKI sedang memperbaiki peta terkait luas lahan di Bidaracina yang terkena proyek sodetan Kali Ciliwung.

"Setelah peta diperbaiki, akan diajukan surat keputusan (SK) yang baru. Setelah itu, pembebasan lahan akan dilakukan dengan konsinyasi," ujarnya.

Rencana pengrusakan itu digulirkan meskipun gugatan kelompok (*class action*) warga Bidaracina terhadap Pemprov DKI terkait pembebasan lahan tempat tinggal mereka masih berlangsung di Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat. Warga memperkarakan keputusan Pemprov DKI yang memilih tempat tinggal mereka untuk proyek sodetan.

Sebelumnya, pada April, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memenangkan gugatan warga Bidaracina terkait perubahan luas lahan yang terjadi tanpa musyawarah dengan warga. Perubahan itu dituangkan dalam dua SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 81 Tahun 2014 dan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 2779 Tahun 2015. Kedua SK ini menjadi obyek gugatan.

Pada SK No 81/2014, areal lahan untuk sodetan seluas 6.090 meter persegi. Luas ini bertambah menjadi 10.030 meter persegi seperti dituangkan dalam SK No 2779/2015.

Astryani (36), warga Bidaracina, mengungkapkan, sebelum mengrusakan Bidaracina, sebaiknya Gubernur DKI kembali membaca Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah. Sejak dua SK pengadaan tanah untuk sodetan Kali Ciliwung itu dikeluarkan saja warga tak pernah diajak musyawarah.

"Dua SK pengadaan lahan untuk proyek sodetan itu pun keluar tanpa didahului konsultasi dan sosialisasi kepada warga seperti diatur dalam Perpres No 71 Tahun 2012. Terbukti PTUN memenangkan gugatan kami," ujarnya.

Menurut Astryani, sebaiknya Pemprov DKI menghormati proses hukum yang berlangsung. Sebab, gugatan kelompok warga Bidaracina masih berlangsung. "Sebagai kepala daerah, Gubernur pastinya paham sistem administrasi negara. Seharusnya dia menghormati proses hukum yang berjalan," katanya.

(IRE/MDN/DEA)

PILKADA

Modal Kampanye Andalkan Partisipasi

JAKARTA, KOMPAS — Partisipasi aktif para relawan tampaknya menjadi andalan para calon gubernur dan pasangannya dalam mengumpulkan modal untuk berkampanye serta menjangkau dukungan massa. Strategi ini paling tidak sudah ditunjukkan oleh bakal calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Agus Harimurti Yudhoyono.

Juru bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas, Minggu (2/10), menyatakan, Teman Ahok akan bergabung dalam tim pemenang gabungan partai politik pengusung, yakni PDI-P, Nasdem, Hanura, dan Golkar. Dengan demikian, aktivitas Teman Ahok berubah dari relawan pengumpul KTP menjadi relawan pemenang pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Amalia menambahkan, pengumpulan dana masih mengandalkan penjualan cendera mata, selain kegiatan lain, seperti konser musik dan festival. Promosi dilakukan melalui situs internet yang diluncurkan ulang pada Sabtu lalu. "Kami menjaga konsep partisipasi yang selama ini dibangun Teman Ahok," ujarnya.

Selain dilaporkan kepada penyelenggara pemilu, hasil penggalangan dana juga dilaporkan secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Berbaur di HBKB

Pada Minggu pagi, Agus Yudhoyono didampingi sang ayah, Susilo Bambang Yudhoyono, ibu Ani Yudhoyono, dan istrinya, Annisa Larasati Pohan, berbaur ber-

sama warga DKI Jakarta dalam acara hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Sylviana Murni, bakal calon wakil gubernur pasangan Agus, turut hadir di acara itu.

Agus juga bertemu puluhan orang yang tergabung dalam Agus Fans Club dan KaribAgus. Kelompok pendukung ini dibentuk *swadaya* dan dipastikan berperan penting selama masa pilkada. "Mereka akan bantu kenalkan saya kepada warga DKI. Target pemilih pemula dan wanita sangat rasional," kata Agus.

Tim pemenangan nantinya terdiri atas koalisi Partai Demokrat, PAN, PPP, dan PKB. Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli menambahkan, tim pemenangan Agus-Sylvi belum resmi terbentuk. Anggota tim tidak dipilih menurut perolehan kursi. "Ada banyak tokoh yang terlibat, termasuk nonpartai," katanya.

Syarat belum lengkap

Agus Yudhoyono masih harus melengkapi beberapa syarat calon dan pencalonan. Persyaratan itu harus diserahkan ke KPU DKI Jakarta paling lambat 4 Oktober. Salah satu syarat yang belum dilengkapi adalah laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi. (MKN/C05)



Lihat Video Terkait
"Cagub DKI Jakarta
Saling Sindir"
di kompasprint.com/vod/cagubsalingsindir

PILKADA DKI 2017

Survei LSI: Elektabilitas Petahana Menurun

JAKARTA, KOMPAS — Survei Lembaga Survei Indonesia menunjukkan elektabilitas calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama kian menurun. Hal itu menyusul munculnya calon gubernur Agus Harimurti Yudhoyono dan Anies Rasyid Baswedan.

Penurunan elektabilitas itu juga terkait kebijakan Basuki dalam penataan kawasan bantaran sungai dengan penggusuran tak disukai warga. Merosotnya elektabilitas Basuki ini membuat Pilkada DKI Jakarta 2017 diprediksi berlangsung dua putaran.

Anggota tim peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI), Adjie Alfaraby, Selasa (4/10), mengatakan, hingga Maret, tingkat elektabilitas Basuki mencapai 59,3 persen. Namun, pada Juli, hasil survei menunjukkan elektabilitasnya turun menjadi 49,1 persen. Pada Oktober, survei terakhir yang dilaksanakan LSI dengan *random sampling* itu menunjukkan elektabilitas Basuki merosot menjadi 31,4 persen.

"Dengan kondisi dukungan yang terus menurun ini, ada kemungkinan calon petahana dapat menang ataupun kalah," katanya.

Dua kompetitor petahana, yakni Anies yang disandingkan dengan Sandiaga Salahudin Uno

dan Agus yang berpasangan dengan Sylviana Murni, memiliki elektabilitas yang hampir seimbang. Elektabilitas Anies-Uno 21,1 persen, sedangkan Agus-Sylviana 19,3 persen.

Tingkat golongan putih atau pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya pada pelaksanaan pilkada sebesar 28,2 persen.

Dengan dukungan petahana yang menurun, kata Adjie, hampir pasti pilkada berlangsung dua putaran karena tak ada yang unggul mutlak di atas 50 persen pada putaran pertama.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menanggapi dingin hasil survei tersebut. Basuki mengaku tak ingin pusing dengan survei-survei elektabilitas yang dipublikasi menjelang Pilkada 2017.

"Terima kasih. (Dengan adanya survei itu) Artinya saya tidak perlu keluar duit sudah ada hasil survei. Sekarang tinggal Teman Ahok dan partai-partai (pengusung) bekerja lebih keras," kata Basuki di Balai Kota Jakarta, Selasa sore. (MDN/MKN)



Lihat Video Terkait
"LSI Perkirakan Pilkada
Jakarta Berlangsung Dua
Putaran"
di [kompasprint.com/vod/
lspilkadadki](http://kompasprint.com/vod/lspilkadadki)

PILKADA 2017

KPU DKI Periksa Kelengkapan Berkas Tiga Pasang Kandidat

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta Sumarno menyatakan, tiga pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur telah melengkapi persyaratan. KPU kini memeriksa kelengkapan dan keaslian berkas sebelum menetapkan pasangan calon pada 24 Oktober.

Menurut Sumarno, kecil kemungkinan adanya pasangan yang gagal sebab mereka dinyatakan lolos syarat yang dinilai paling substansial, yaitu tes kesehatan, psikotes, dan bebas narkoba. "Semua syarat harus kembali diperiksa karena lengkap belum tentu benar," kata Sumarno, Rabu (5/10), di Jakarta.

Semua bakal calon mengajukan naskah visi dan misi serta struktur tim pemenangan pada hari terakhir pelengkapan berkas, yakni Selasa lalu.

Nantinya, semua pasangan calon harus menandatangani dokumen deklarasi kampanye da-

mai.

Dihubungi terpisah, bakal calon wakil gubernur Sandiaga Uno secara tegas melarang anggota tim pemenangan menggunakan unsur primordialisme dalam kampanye konvensional atau digital. Mereka yang terbukti melanggar aturan akan dilaporkan ke kepolisian.

Hal senada disampaikan Nachrowi Ramli selaku Ketua Tim Pemenangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni seusai rapat konsolidasi DPD Partai Demokrat DKI Jakarta. Ia menyebutkan, kader partai dan tim pemenangan harus menghindari isu berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta menghindari fitnah.

Perkenalkan diri

Nachrowi menyampaikan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meng-

amanatkan agar tim pemenangan bekerja keras memperkenalkan Agus-Sylvi, termasuk program kerjanya, kepada masyarakat. Hal itu karena Agus yang merupakan orang baru dalam dunia politik dan namanya baru muncul menjelang pendaftaran Pilkada DKI.

Agus pun yakin bisa menjadi harapan baru bagi Jakarta. "Saat bertemu dengan masyarakat, kami tak hanya memperkenalkan figur kami, tetapi juga program kerja kami," ujar Agus.

Adapun pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengungkap sejumlah program kerja, antara lain menggenjot pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta menggiatkan Kartu Jakarta Pintar. Pembuatan kebijakan berbasis partisipasi masyarakat.

"Kami menawarkan kebijakan yang berpihak pada semua kelas, terutama masyarakat menengah ke bawah, dan mereka yang ber-

ada di garis kemiskinan, tuturnya.

Sementara itu, Teman Ahok selaku relawan pendukung pasangan Basuki T Purnama-Djarot Saiful Hidayat memutuskan tidak bergabung dalam tim sukses yang dibentuk koalisi partai PDI-P, Nasdem, Golkar, dan Hanura. Namun, Teman Ahok tetap bekerja membantu kampanye, antara lain menggalang dana lewat penjualan souvenir.

Juru bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas, Rabu, menyatakan, struktur tim sukses berisi nama perseorangan, sementara Teman Ahok merupakan sebuah gerakan, tim, atau organisasi. "Kami mendaftarkan diri sebagai organisasi relawan di bawah tim sukses, bukan nama perseorangan, setara dengan relawan lain. Tugas kami jelas, yakni memelihara suara warga yang telah dipercayakan ke Teman Ahok dalam pengumpulan KTP

lalu," ujar Amalia.

Pilgub Banten

Terkait Pilkada Banten 2017, Polres Kota Tangerang Kabupaten menyiapkan 700 personel gabungan dari Polresta, polsek, dan Polda Banten untuk pengamanan di wilayah kerjanya.

Kepala Polresta Tangerang Kabupaten Komisaris Besar Asep Edy mengatakan, pengamanan diperketat terutama di titik rawan, yakni Pasar Kemis yang merupakan kawasan padat penduduk. Penjagaan keamanan secara khusus akan dilakukan di Lapas Jembe.

Pilgub Banten diikuti dua pasang calon, yakni Wahidin Halim-Andika Hazrumy yang diusung Golkar, Demokrat, Gerindra, PKB, PKS, Hanura, dan PAN, serta Rano Karno-Embay Mulya Syarif yang diusung PDI-P, PPP, dan Partai Nasdem.

(PIN/MKN/MDN/C05)

Transfer Bagi Hasil Ubah Struktur Anggaran

Penetapan APBD DKI Jakarta Tahun 2017 Terancam Molor

JAKARTA, KOMPAS — Realisasi transfer dana bagi hasil yang tak sesuai rencana mengubah struktur keuangan DKI Jakarta dua tahun terakhir. Sebagian kegiatan terpaksa ditunda atau dikurangi porsi dananya karena pendapatan berkurang. Termasuk belanja langsung yang dibutuhkan warga.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dalam sidang paripurna di DPRD DKI Jakarta, Kamis (6/10), menyatakan, penurunan rencana pendapatan pada perubahan APBD (APBD-P) 2016, antara lain, karena ada selisih besaran sisa lebih penggunaan anggaran (silpa). Pada APBD 2016, silpa ditetapkan Rp 7,93 triliun, tetapi realisasinya berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan hanya Rp 4,93 triliun.

"Selain itu, ada pergeseran dana bagi hasil (DBH) tahun 2015, sebagian ditransfer pada 2016, dan DBH 2016 sebagian ditransfer pada 2017," kata Basuki dalam sidang dengan agenda jawaban Gubernur DKI atas pandangan

fraksi-fraksi DPRD DKI itu.

Pada sidang sehari sebelumnya, sejumlah fraksi menyoroti penurunan rencana pendapatan pada APBD-P 2016. Penurunan itu berpengaruh pada tertundanya sejumlah proyek yang dibutuhkan warga, seperti rehabilitasi gedung sekolah, pembangunan rumah susun, dan pembangunan pompa air.

Basuki menyatakan, rehab total 44 gedung sekolah ditunda karena kegagalan lelang penghapusan aset dan keterbatasan waktu pelaksanaan. Padahal, penghapusan telah dimulai sejak 22 Februari 2016. Meski demikian, pembangunannya akan diusul kembali pada APBD 2017.

APBD 2017

Fraksi PDI-P, PKS, Hanura, dan Nasdem menyoroti pengurangan anggaran untuk pembebasan lahan untuk rumah susun. Menurut Basuki, sesuai target rencana pembangunan jangka menengah daerah, target pembangunan rusun yang akan dicapai pada akhir 2017 adalah 2.443 unit. Sesuai perkiraan, realisasi rusun yang rampung dibangun akhir 2016 adalah 2.359 unit dan kontrak tahun jamak yang berakhir 2017 sebanyak 3.150 unit.

Basuki menyatakan, pompa akan tetap dibangun tahun ini. Pompa di Cipulir dan Petogogan, misalnya, dilaksanakan oleh PD Pasar Jaya dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Penetapan APBD-P 2016 molor dari tenggat. Namun, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Triwisaksana dalam sidang itu menyatakan, sidang paripurna pengesahan dijadwalkan pada 12 Oktober 2016.

Situasi itu juga mengancam

penetapan APBD 2017. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyatakan, pihaknya berkir surat kepada Kementerian Dalam Negeri, antara lain menanyakan mekanisme penetapan APBD oleh pelaksana tugas (plt) gubernur. "Kami bertanya tugas apa saja yang bisa dikerjakan seorang plt. Kami berharap penetapan APBD 2017 tepat waktu, setidaknya akhir Desember 2016," ujarnya. (MKN)

HANYA



Tim Para Calon Mulai Berstrategi

Masih Banyak Pemilih yang Belum Bersikap

JAKARTA, KOMPAS — Tim pemenangan pasangan calon di DKI Jakarta mulai berstrategi menghadapi masa kampanye yang akan berlangsung 3,5 bulan. Penggalangan dana segera dilakukan. Model kampanye juga akan disiapkan, termasuk menarik partisipasi warga serta menggerakkan relawan.

Pendanaan kampanye bagi pasangan calon gubernur Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni akan dilakukan setiap partai pendukung, yakni Partai Demokrat, PAN, PPP, dan PKB. Tak ada pengumpulan dana dalam satu rekening.

Ketua I Tim Pemenangan Agus-Sylvi, Eko Hendro Purnomo, Kamis (6/10), mengatakan, untuk pemenangan Agus-Sylvi dibagi dua tim pemenangan. Pertama, tim gabungan di Wisma Proklamasi. Kedua, tim pemenangan oleh setiap parpol pendukung yang sekretariatnya di setiap kantor dewan pimpinan wilayah (DPW) parpol.

"Setiap parpol menghimpun dana. Dana itu yang digunakan oleh setiap parpol pendukung untuk kampanye berupa dialog kepada masyarakat," katanya.

Selaku Ketua DPW DKI PAN, Eko menyampaikan, pihaknya membuka PAN Rising, pengumpulan dana untuk kampanye Agus-Sylvi, baik sumbangan dari individu maupun perusahaan.

Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang diusung Gerindra dan PKS mempersiapkan strategi penggalangan dana kampanye dengan gerakan lima puluh ribu (Galibu). Warga yang ingin mendukung dapat menyumbangkan uang Rp 50.000 ke nomor rekening yang akan diumumkan nanti.

Ketua Tim Pemenangan Pasangan Anies-Sandiaga, Mardani Ali Sera, Kamis, mengatakan, Galibu merupakan cara untuk membentuk *public engagement*. Idenya, warga bersama-sama ikut membangun Jakarta.

"Penggalangan akan dimulai setelah pasangan calon ini sudah resmi ditetapkan Komisi Pemilihan Umum, penamaan paslon, dan pengambilan nomor urut. Kalau sekarang, kan, belum resmi," kata Mardani.

Ia mengatakan, upaya itu dilakukan untuk mengajak warga

turut serta membangun Jakarta, bukan hanya selama masa kampanye. Nantinya, uang yang disumbangkan akan dilaporkan secara rutin.

Khusus untuk pembiayaan kegiatan tim pemenangan, menurut Mardani, tidak diambil dari Galibu, tetapi murni dari pasangan calon.

Sementara itu, Ruhut Sitompul, juru bicara tim sukses Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, mengatakan, saat ini partai pengusung pasangan, yakni PDI-P, Nasdem, Golkar, dan Hanura, sedang bekerja. Tokoh relawan, termasuk Teman Ahok, juga diajak pidato dan menjadi juru kampanye.

Ia mengatakan, pasangan petahana ini sudah membuktikan kinerjanya, antara lain menerjunkan pekerja penanganan prasarana sarana umum dan perbaikan pelayanan publik. Prestasi petahana ini akan jadi kampanye andalan pasangan ini.

"Saya akan total. Kalau harus nongkrong di rumah warga untuk kampanye, saya juga akan bawa jagung rebus untuk ngobrol dengan warga. Apalagi, kami juga punya satu juta KTP," ujarnya.

Adapun pendanaan pasangan ini juga akan disokong Teman Ahok selaku relawan pendukung Basuki-Djarot. Penggalangan dana, antara lain, dengan penjualan souvenir.

"Swing voters"

Sementara itu, lembaga survei Populi Center merilis hasil survei bertema "Arah Suara Pemilih Pilgub DKI", kemarin. Survei yang digelar 25 September-1 Oktober 2016 terhadap 600 responden itu menemukan bahwa angka pemilih yang belum bersikap (*swing voters*) dan pemilih yang belum memutuskan (*undecided voters*) masih tinggi.

Saat ketiga pasangan ditarungkan, angka pemilih yang belum memutuskan sebesar 12,5 persen

dan 2,7 persen tidak menjawab. Adapun saat pertanyaan terbuka *top of mind*, siapa tokoh yang akan dipilih menjadi gubernur DKI Jakarta 2017-2022, jumlah *swing voters* naik jadi 25,5 persen. Artinya, para pasangan calon masih bisa meraup peluang dari para pemilih tersebut.

Direktur Populi Center Usep S Ahyar mengatakan, tingginya angka pemilih yang belum memutuskan itu bisa dipengaruhi karena pilkada masih dalam tahapan awal. Seluruh pasangan calon belum memaparkan visi dan misi masing-masing.

Secara keseluruhan, keinginan warga untuk memilih tinggi, sekitar 91 persen. Padahal, KPU hanya menargetkan partisipasi politik 75 persen.

Adapun elektabilitas pasangan Basuki-Djarot masih tinggi, yakni 45,5 persen, diikuti Anies-Sandiaga 23,5 persen, dan Agus-Sylvi 15,8 persen.

Ketika ditanyakan pilihan tersebut sudah mantap atau masih mungkin berubah, sebesar 52,3 persen responden sudah mantap. Sebanyak 34,7 persen mengaku masih berubah dan 13 persen menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Survei ini diadakan dengan metode pengambilan sampel *multistage random sampling*. Tingkat kepercayaan survei tersebut 95 persen, dengan *margin of error* 4 persen. Survei dibiayai oleh kas internal Yayasan Populi Indonesia.

Sementara itu, Sekretaris Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDI-P Sierra Prayuna melaporkan pemberitaan di sebuah media *online* yang menyebutkan PDI-P menerima mahar dari Basuki sebesar Rp 10 triliun. Laporan disampaikan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya, Kamis. "Ini berita yang mengandung unsur kebohongan, fitnah, dan membunuh karakter partai kami," katanya.

(UTI/MDN/DEA/WAD)

Lihat Video Terkait
"Elektabilitas Bakal Cagub
Jakarta di Tiga Lembaga
Survei"
di [kompasprint.com/vod/
peranglembagasurvei](http://kompasprint.com/vod/peranglembagasurvei)



Ancaman Pidana bagi Kampanye SARA

Penyelenggara Diminta Netral dan Bekerja Profesional

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta bakal memidanakan pelanggaran kampanye yang menghina suku, agama, ras, dan antar-golongan atau SARA. Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pelanggaran ketentuan itu diancam hukuman penjara dan denda.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Mimah Susanti, Jumat (7/10), menyatakan, sesuai Pasal 69 (b) UU No 10/2016, materi kampanye dilarang menghina SARA. Sanksi pelanggaran aturan itu ada pada Pasal 187. Pelanggar diancam hukuman 3-18 bulan penjara atau denda Rp 600.000-Rp 6 juta.

Namun, lanjut Mimah, sepanjang pasangan calon belum ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu belum bisa mengenakan sanksi pidana. Secara terpisah, Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno meminta seluruh penyelenggara, termasuk petugas di tingkat kecamatan, kelurahan, ataupun tempat pemungutan suara, untuk netral, berintegritas, dan bekerja profesional. Tak hanya bertindak sesuai aturan, para pelaksana dituntut memenuhi etika untuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang bermutu, termasuk bebas isu SARA.

Sementara itu, dalam diskusi analisis hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) di Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat, anggota tim peneliti LSI, Ardian Sopa, menyampaikan, bakal calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama hanya dapat mempertahankan dan meningkatkan dukungan selama dia dapat menjaga dirinya dari isu-isu

primordialisme, seperti agama.

Menurut Ardian, di mata responden, Basuki masih dipandang bersih dari korupsi, termasuk dalam kasus Rumah Sakit Sumber Waras. "Pilkada ini, kan, sangat terkait dengan citra. Dengan keputusan pemilih yang masih dipengaruhi sentimen agama, sebaiknya Basuki menjauhi pernyataan yang bisa menjeratnya dalam blunder masalah agama," tuturnya.

Saling melaporkan

Dalam perkembangan lain, tiga kelompok berbeda saling melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait rekaman video Basuki saat berpidato di Kepulauan Seribu, 28 September. Laporan bahkan juga dibuat ke Polda Sumatera Selatan.

Di Polda Metro Jaya, Forum Anti Penistaan Agama dan Angkatan Muda Muhammadiyah, yang datang secara terpisah, melaporkan dugaan pelecehan yang dilakukan Basuki dalam pidatonya itu. Sementara di Sumatera Selatan, menurut Kepala Kepolisian Daerah Sumsel Inspektur Jenderal Djoko Prastowo, Jumat, Basuki dilaporkan oleh MUI Sumsel.

Namun, secara terpisah, para advokat yang tergabung dalam Komite Advokat Muda Ahok Djartot (Kotak Adja) balik melapor-

kan akun Facebook dengan nama SY, yang pertama kali mengunggah video pidato Basuki yang telah diedit.

Menurut Ketua Kotak Adja, Muanas Alaidid, rekaman video Basuki yang asli telah dipotong dan ditambahi kalimat yang provokatif.

Sementara itu, bakal calon gubernur DKI Anies Baswedan melanjutkan kunjungan ke sejumlah wilayah untuk mengumpulkan dukungan suara pemilih. Jumat kemarin, Anies *blusukan* dan menandatangani kontrak politik dengan warga Guji Baru di bantaran Kali Sekretaris, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Dalam kunjungan itu, Ketua Pengurus Anak Cabang PDI-P

Kebon Jeruk M Ranto menyatakan, sebagian besar pendukung PDI-P di wilayahnya memutuskan mendukung pasangan Anies-Sandiaga Uno.

"Kami sejak awal meminta PDI-P mencalonkan Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya) sebagai gubernur DKI. Namun, parpol malah mengusung Basuki. Kami kecewa dan memutuskan mendukung Sandiaga Uno," ungkapnya.

(MKN/MDN/WAD/DEA/RAM)



Lihat Video Terkait "Strategi Tarik Simpati Bakal Cagub DKI" di kompasprint.com/vod/manuvercagubdki

HANYA DI

HARGA

Hemat
Rp 1.309

DAGING RENDANG
PAKET /100gr



SEPERTI IKLAN
TV

9.999

Hemat
Rp 6.790

MILIK GORONG
Fortun

Maks 2
Pc/Pelangga



Spanduk sosialisasi Pilkada DKI Jakarta ditempel di tembok di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (9/10). Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta bakal memidanakan pelanggar larangan kampanye yang menghina suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA). Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pelanggar ketentuan itu diancam hukuman penjara dan denda.

Makin Gencar Menyapa

Agus Lari Pagi di Ragunan, Anies "Blusukan" di Manggarai

JAKARTA, KOMPAS — Para bakal calon gubernur DKI Jakarta makin gencar menyapa warga Jakarta dengan berbagai cara. Agus Harimurti Yudhoyono memilih aktivitas lari pagi untuk bersosialisasi dengan warga. Sementara Anies Baswedan terus mengunjungi kantong-kantong permukiman miskin yang warganya takut terkena penggusuran.

Minggu (9/10) pagi, Agus berlari di area Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan. Dia datang sekitar pukul 07.00 bersama belasan orang berkaus hitam bertuliskan AHY #JakartaUntukRakyat.

Di tengah-tengah berlari, Agus sesekali berbincang dengan pengunjung dan pedagang di kebun binatang itu. "Saya butuh olahraga dan butuh juga masyarakat," kata Agus yang memang hobi berolahraga lari.

Dia berencana lari rutin setiap akhir pekan di tempat-tempat

berbeda sebelum masa kampanye dimulai. Menurut dia, interaksi langsung dengan warga menjadi bekal utama untuk menyempurnakan visi dan misinya.

Pada hari yang sama, bakal calon gubernur yang diusung Partai Gerindra dan PKS, Anies Baswedan, berkeliling ke Kampung Magesen, Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan. Di sana, Anies mendengarkan suara warga yang khawatir digusur.

Di hadapan masyarakat, Anies menjanjikan penataan kota yang berkeadilan jika ia terpilih nanti.

"Masalah ini bukan soal digusur atau tidak, tetapi soal keadilan. Saat kami menjadi gubernur dan wakil gubernur, kami ingin bukan hanya kotanya yang maju, melainkan juga warga yang bahagia," katanya, yang hadir di tempat itu atas undangan pendukungnya di RW 005, 006, 007, dan 012 Kelurahan Manggarai.

Anies datang ke kampung itu dengan menaiki salah satu ojek berbasis aplikasi tanpa didampingi calon wakilnya, Sandiaga Uno.

Sepanjang meninjau gang-gang sempit di empat RW tersebut, perjalanan Anies diiringi musik rebana.

Banyak warga mengeluh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sambil meminta agar kampung tersebut tak digusur.

Salah satu simpatisan pasangan Anies-Uno, Fadli Anggi Setiawan (32), mengatakan, warga

di tempat khawatir kampung mereka digusur karena lahan yang mereka tempati berstatus tanah milik PT Kereta Api Indonesia. Kekhawatiran ini meningkat di tengah banyaknya penggusuran yang terjadi selama ini.

Jumat lalu, Anies juga blusukan dan menandatangani kontrak politik dengan warga Guji Baru di bantaran Kali Sekretaris, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Tunggu kampanye

Saat ditanya mengenai detail visi dan misinya, Agus Yudhoyono berjanji menyampaikan semua itu secara gamblang saat masa kampanye dimulai, 28 Oktober.

Selain itu, Agus juga memilih tidak membuat kontrak politik dengan warga atau kelompok tertentu. Menurut dia, kontrak itu secara alami terbentuk saat dia disumpah sebagai gubernur.

(IRE/COS)

ANGKU
Tra

JAKART
meningka
portasi u
Jakarta
layanan
dulu tran
konsep
transjak
ngan ko
Men
Transp
karta)
(8/10)
bus-b
karta
te-ha
trans
dah,
tark
ma
" kar
op
m
n
g

PDI-P

Restu Dahulu, Konsolidasi Kemudian

Diiringi rintik hujan yang membasahi Kota Blitar, Jawa Timur, Senin (10/10), 10 bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Pilkada 2017 duduk bersila dan bersimpuh di depan makam Presiden Pertama RI Soekarno. Ditemani putri Soekarno yang juga Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, mereka mohon doa restu.

Kesepuluh calon kepala daerah itu adalah pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Saiful Djarot Hidayat (DKI Jakarta), Domingus Mandacan (Papua Barat), Rano Karno-Embay Mulya (Banten), Hana Hasanah-Tony Yunus (Gorontalo), Ali Baal Masdar (Sulawesi Barat), dan Rustam-Irwansyah (Bangka Belitung).

Ziarah ke makam Bung Karno menjadi tradisi PDI-P menjelang agenda politik besar, seperti pilkada dan pemilu. Megawati mengatakan, dengan berziarah ke makam Bung Karno, para calon kepala daerah itu diharapkan dapat menghayati dan mengimplementasikan makna kepemimpinan dan nilai-nilai dasar Pancasila.

"Bung Karno dan Pancasila mengajarkan kita untuk bertoleransi dalam hal beragama dan bersosialisasi antarsuku, ras, dan golongan. Jika hal seperti itu tidak terus digaungkan, demokrasi kita bisa mundur," katanya. "Tadi saya meminta doa restu, berharap ke depan pilkada berlangsung lancar. Ada banyak hal yang harus saya teladani untuk menjadi pemimpin kelak," kata Hana Hasanah, se usai ziarah.

Sementara Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Soekarno sebagai pencetus Pancasila mampu menggabungkan prinsip keagamaan dan ketuhanan dengan keadilan sosial. Ia mengaku sejak dulu ingin mengunjungi makam Bung Karno. "Saya mau ziarah, mau mengamalkan contoh teladan. Selayaknya orangtua, Bung Karno bisa sedih kalau anak-anaknya tak patuh," katanya.

Bantah spekulasi

Setelah sekitar setengah jam



Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri berziarah ke makam Presiden pertama RI Bung Karno di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Senin (10/10). Mega berziarah ke makam ayahandanya bersama bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan sejumlah bakal calon gubernur daerah lainnya, seperti Rano Karno (Banten). Tampak pula di antara mereka Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

di situs makam Bung Karno, Megawati dan para calon meluncur ke pendopo Bupati Blitar, Rijanto. Di tempat ini, juga berkumpul para kepala daerah di Jatim yang diusung PDI-P.

Para kepala daerah ini kemudian mendeklarasikan dukungan terhadap para calon gubernur/wakil gubernur. Selain untuk memenangkan para bakal calon gubernur/wakil gubernur, deklarasi dukungan itu juga sebagai komitmen untuk mendorong kerja sama antarkepala daerah ketika kelak para bakal calon itu memimpin daerahnya. Deklarasi dukungan itu ditanandatangani Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Lewat deklarasi itu, PDI-P seolah ingin membantah spekulasi yang belakangan beredar, khususnya tentang perpecahan dan ketidakharmonisan di internal partai karena keputusan ketua umum dan pengurus

pusat mencalonkan figur tertentu.

Sebagai contoh, pencalonan Basuki sempat memunculkan pertanyaan sejumlah kader. Sesaat setelah pasangan calon Basuki-Djarot diumumkan, pengurus Dewan Pimpinan Daerah PDI-P DKI Jakarta Boy Sadikin mengundurkan diri dari keanggotaan PDI-P karena tidak setuju atas pencalonan itu.

Beberapa pengurus anak cabang PDI-P di Kebon Jeruk, Jakarta, baru-baru ini juga menyatakan, wilayahnya mengalihkan dukungan untuk pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Isu tidak sedap juga sempat beredar terkait hubungan antara Basuki dan Risma, pasca dinamika pra-pencalonan keduanya untuk kursi DKI Jakarta.

Kunjungan dan deklarasi dukungan di Blitar itu juga seolah

membantah spekulasi lain bahwa dukungan politik terhadap Basuki-Djarot mulai goyah, setelah muncul sejumlah hasil survei yang menunjukkan elektabilitas pasangan petahana itu terus merosot.

Megawati menegaskan, sebagai ketua umum telah memutuskan mencalonkan Basuki dan calon gubernur lainnya sehingga keputusan itu sudah selayaknya dipatuhi oleh semua kader dan pengurus. "Ketika saya membaca ke KPUD, seluruh jajaran sudah mengerti, ini perintah ketum untuk memenangkan 101 daerah, termasuk untuk DKI Jakarta," katanya.

Megawati seolah berusaha menegaskan hal itu melalui interaksinya dengan Basuki selama kunjungannya sehari ke Blitar. Dari antara enam calon gubernur yang mengikuti rombongan ziarah, seperti biasanya, Basuki tetap menonjol dan menjadi fo-

kus perhatian.

Sejak awal berkumpul di ruang tunggu Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Basuki tidak pernah terlihat jauh dari Megawati. Ia selalu berada di dekat Megawati.

Bahkan, dalam perjalanan dua jam dari Blitar menuju Bandara Abdurachman Saleh, Malang, Basuki satu mobil dengan Megawati.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengakui, rangkaian acara kunjungan ke Blitar juga untuk konsolidasi dan mempertemukan tiap pasangan calon yang diusung PDI-P.

"Para kandidat harus dibiasakan berinteraksi dan bekerja sama sejak masih bakal calon sampai nanti jadi gubernur. Demi menjamin keberhasilan program pemerintah pusat, para kepala daerah pun harus kompak," kata Hasto. (AGE/WER)

Basuki Didesak Berhati-hati

Megawati: Isi Kampanye dengan Persaingan Program dan Konsep

JAKARTA, KOMPAS — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang juga calon petahana dalam Pilkada DKI 2017, meminta maaf atas perkataannya saat berpidato di Kepulauan Seribu, 27 September. Sejumlah pihak pun mendesak Basuki lebih berhati-hati berbicara di depan publik.

"Saya sampaikan kepada semua umat Islam atau kepada pihak yang merasa tersinggung, saya sampaikan permohonan maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam," kata Basuki di Balai Kota Jakarta, Senin (10/10).

Pernyataan Basuki dalam dialog dengan warga Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, itu menuai perdebatan serius di media sosial beberapa hari belakangan.

"MUI (Majelis Ulama Indonesia) DKI juga sudah menyurati saya, mengecam keras dan minta saya untuk fokus kepada kemaslahatan umat. Minta untuk tidak menyinggung penafsiran-penafsiran agama yang sensitif. Untuk

itu, saya mohon maaf," ujarnya. Di Blitar, Jawa Timur, Senin, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri meminta Basuki lebih berhati-hati saat berucap di depan publik.

Menurut dia, para pasangan calon kepala daerah yang bertarung diminta bersaing dengan bersih sehingga isu menyangkut suku, agama, ras, antar-golongan (SARA) harus dihindari untuk menghindari perpecahan.

Dalam acara yang mengumpulkan sejumlah calon kepala daerah yang diusung PDI-P dalam Pilkada 2017 itu, Megawati menegaskan bahwa pertarungan dalam ajang pilkada seharusnya bersifat perang gagasan dan prog-

ram, bukan isu SARA.

"Sebagai negara berbasis Pancasila, kita seharusnya sudah final menutup isu-isu semacam itu. Mari bermain cantik, yang diisi dalam kampanye nanti adalah persaingan program dan konsep," kata Megawati.

Dalam kesempatan itu, ia meminta Basuki tak terlalu mudah memberi pernyataan secara publik. "Saya bilang ke Ahok (panggilan akrab Basuki), jangan mau kalau sekarang ada wartawan mau *doorstop* (mencegat wawancara). Stop, jangan mau, karena pernyataannya bisa berujung jadi negatif," kata Megawati, yang duduk di sebelah Basuki.

Seusai Megawati memberikan pernyataan, Basuki mengulurkan tangan hendak meraih mikrofon dan ikut berkomentar. Namun, Megawati ikut mengulurkan tangan untuk menghadang tangan Basuki. Sontak seluruh hadirin tertawa lepas.

Melapor balik

Dalam perkembangan lain, pe-

milik akun Facebook yang mengomentari video pidato Basuki tersebut, Buni Yani, melapor ke Polda Metro Jaya, Senin. Kuasa hukum Buni, Aldwin Rahadian, yang mewakili puluhan advokat dari Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) DKI, mengatakan, kliennya balik melaporkan M Guntur Romli karena menyebut Buni provokator.

Menurut Aldwin, laporan sebelumnya bahwa kliennya menyunting video Basuki adalah mengada-ada. "Klien kami tak menyunting video. Buni adalah warga negara yang ingin mengkritisi pemerintah atau pemimpinnya," ujar Aldwin.

Menurut Buni, video tersebut muncul di linimasa akun Facebook-nya. "Saya tidak punya kemampuan menyunting (video), tidak punya waktu, dan tidak punya kepentingan. Saya mem-bela kebebasan berpendapat yang dijamin UU, siapa pun yang memaknai isu SARA akan saya kritisi," tandasnya.

Mengomentari hiruk-pikuk

seputar pidato Basuki tersebut, bakal calon gubernur DKI Agus Harimurti Yudhoyono mengimbau warga Jakarta tak mudah terprovokasi selama masa pilkada. Menurut dia, masyarakat seyogianya melihat setiap persoalan dengan akal sehat dan rasional serta menghindari informasi berbau SARA.

"Sangat memprihatinkan kalau itu terjadi karena kita semua pada akhirnya 'merah putih'," kata Agus sambil menunjuk logo bendera Merah Putih di lengan kanan kaos hitam yang ia kenakan, Minggu (9/10). Menurut Agus, penghormatan atas keberagaman menjadi kunci untuk menghindari berbagai polemik.

(MKN/WAD/WER/AGE/COS)



Lihat Video Terkait
"Basuki Tjahaja Purnama Minta Maaf Terkait Penistaan Agama"
di kompasprint.com/vod/ahokmintamaaf

PILKADA DKI

Relawan Pendukung Minta Basuki Perbaiki Komunikasi

JAKARTA, KOMPAS — Relawan Jaringan Swadaya Warga Jakarta Raya, yang mendukung bakal pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, meminta supaya Basuki memperbaiki pola komunikasinya kepada publik.

Dalam jumpa pers di Gedung Juang di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/10), Ketua Umum Jaringan Swadaya Warga Jakarta Raya (Jawara) Mulyadi Guntur mengatakan, pernyataan Basuki di Kepulauan Seribu pada 27 September telah membuat suasana Pilkada DKI memanas.

Isu-isu SARA mulai dimainkan, baik di media sosial maupun kalangan elite politik. Warga simpatisan Jawara pun khawatir lainnya isu tersebut akan memecah belah dan merusak harmoni di masyarakat.

"Seperti kita ketahui, kemarin, Pak Ahok (panggilan akrab Basuki) sudah minta maaf kepada publik soal pernyataannya di Kepulauan Seribu. Sekarang, soal kasus pidananya biarlah diproses secara hukum di kepolisian," ujar Mulyadi. Jawara sendiri adalah jaringan relawan pendukung pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama pada Pilkada DKI 2012.

Jawara juga mengimbau warga Jakarta dan para relawan pendukung Basuki-Djarot lebih menjaga harmoni di masyarakat. Menurut Mulyadi, para relawan yang terdiri dari nelayan, petani, dan buruh itu konsisten mendukung Basuki-Djarot karena menganggap program pasangan petahana itu sangat berdampak di masyarakat.

tukan masa depan Jakarta lima tahun ke depan.

Saat Anies berkeliling, terdengar seruan warga meminta agar kampungnya tak digusur. Warga mengaku khawatir ikut kena gusur setelah melihat berita pengusuran di Jakarta di televisi.

Ketua RT 012 RW 008 Petamburan Susanto mengatakan, sebenarnya belum pernah ada informasi konkret tentang rencana pengusuran di sana.

Anies mengatakan, arah pembangunan dan penataan Jakarta ke depan harus bisa membahagiakan setiap warganya. Tak hanya membahagiakan mereka yang mampu, tetapi juga kalangan masyarakat bawah, termasuk warga Kampung Petamburan. "Warga Jakarta jangan sampai terus-menerus dihantui pengusuran," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.



Warga Jakarta jangan sampai terus-menerus dihantui pengusuran.

Anies Baswedan

Sehari sebelumnya, Selasa (11/10), bakal calon gubernur DKI yang diusung Partai De-

dukung Basuki-Djarot karena menganggap program pasangan petahana itu sangat berdampak di masyarakat.

Kampung miskin

Pada hari yang sama, bakal calon gubernur DKI yang diusung Partai Gerindra dan PKS, Anies Baswedan, kembali melakukan sosialisasi dan meminta dukungan ke kampung miskin Jakarta. Setelah ke Guji Baru, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dan Magesen, Manggarai, Jakarta Selatan, Anies kemarin mendatangi Kampung Petamburan di Jakarta Pusat yang juga tengah dihantui isu penggusuran.

Anies datang ke Kampung Petamburan tanpa didampingi calon wakilnya, Sandiaga Uno. Ia mengaku hadir ke sana memenuhi undangan pendukungnya di RW 005 dan RW 008 Petamburan. Seperti kunjungan ke kampung-kampung sebelumnya, Anies berkeliling ke gang-gang sempit diiringi musik rebana.

Seusai berkeliling, Anies menggelar audiensi dengan warga di Masjid Al-Munawar, Petamburan. Ia mengingatkan warga bahwa Pilkada DKI tidak hanya untuk memilih sosok calon yang disukai, tetapi juga menen-

Sehari sebelumnya, Selasa (11/10), bakal calon gubernur DKI yang diusung Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, juga "blusukan" menemui rakyat kecil di Rusunawa Sindang, Koja, Jakarta Utara.

Di sana, Agus berdialog dengan warga terkait berbagai permasalahan yang dihadapi di rumah susun sederhana sewa itu. Sumi (48), penghuni lantai dasar Blok Kakap Rusunawa Sindang, menuturkan, sewa unit rusun itu mencapai Rp 390.000 per bulan.

"Saya tinggal di sini dari tahun 2002. Awalnya cuma bayar Rp 100.000, sekarang sudah sampai *segitu*. Mana penghasilan tidak menentu setiap bulan," ujar ibu tiga anak yang membuka toko kelontong ini.

Agus, yang tak didampingi calon wakilnya, Sylviana Murni, mengaku akan menampung keluhan dan harapan warga terkait biaya sewa, tunggakan, ataupun fasilitas sosial yang ada.

Meski begitu, calon yang juga didukung PPP, PKB, dan PAN ini belum menjawab gamblang soal solusi yang akan ia tawarkan. Menurut dia, pihaknya baru akan mengkaji permasalahan secara utuh. (JAL/WAD/IRE/DEA)

Ribuan Saksi Dikerahkan di Pilkada

Pengawasan di TPS Diperketat

JAKARTA, KOMPAS — Puluhan ribu saksi akan dikerahkan masing-masing tim pasangan calon gubernur-wakil gubernur untuk mengawasi setiap tahapan pemungutan suara dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Langkah itu diharapkan mencegah kecurangan yang merugikan pasangan calon.

Partai pendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno menyiapkan lebih dari 45.000 saksi. Ketua Dewan Pimpinan Daerah DKI Partai Gerindra M Taufik mengatakan, para saksi disiapkan dari struktur partai pendukung, yaitu Gerindra dan PKS. Mereka akan disebar di tiap tempat pemungutan suara (TPS), di tingkat kecamatan, kota dan kabupaten, hingga provinsi.

"Jumlah pengawas diperbanyak (dari pemilu atau pilkada lalu). Biasanya dua orang per TPS, sekarang tiga. Ditambah dengan relawan yang tanpa bayar, jadi mungkin sampai 10 orang mengawasi untuk kami di tiap TPS," katanya, Jumat (14/10).

Dengan 15.059 TPS di DKI Jakarta, jumlah saksi di tingkat TPS saja mencapai 45.177 orang. Para saksi harus memenuhi syarat, antara lain, terdaftar di daftar pemilih tetap di wilayah yang diawasi. Mereka dibayar dengan sistem honor dan menurut rencana dilatih setelah penetapan nomor calon, 25 Oktober.

Menurut Taufik, peningkatan pengawasan ini karena adanya indikasi kemungkinan kecurangan. Jumlah saksi diperbanyak sebagai cadangan untuk menggantikan saat saksi lainnya harus pergi sehingga TPS tak pernah kosong dari pengawasan.

Jumlah saksi yang besar diakui akan memperbesar anggaran partai untuk pelaksanaan Pilkada DKI.

"Tetapi, ya, memang sudah tanggung jawab kami. Kami pernah punya pengalaman buruk dicurangi. Sudah terbukti sebelum-sebelumnya. Ada rombongan orang dari luar TPS didatangkan ikut *nyoblos*," katanya.

Mendekati masa kampanye, Anies dan Sandiaga turun ke sejumlah tempat untuk sosialisasi. Sandiaga mengatakan, saat ini pihaknya tengah mematangkan strategi kampanye dan biayanya.

Basis-basis relawan dan simpatikan Anies-Sandiaga disiapkan setidaknya di 2.700 lokasi di DKI.

Juru Bicara Anies-Sandiaga Alexander Yahya Datuk mengatakan, Sandiaga telah mengeluarkan biaya Rp 29,3 miliar dari dana pribadi untuk periode so-

sialisasi November 2015-September 2016 ini.

26.000 saksi

PDI-P menyiapkan 26.000 saksi untuk mengawasi TPS saat pemungutan suara. Tiap-tiap TPS diawasi dua saksi.

Eriko Sotarduga, Juru Bicara Tim Pemenangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, mengatakan, PDI-P sedang menjalankan *training on trainer* berjenjang untuk calon saksi.

Para saksi akan dibekali kemampuan untuk melaporkan temuan dan pelanggaran di TPS. Mereka juga akan melaporkan kecurangan-kecurangan selama pemungutan dan penghitungan suara kepada Bawaslu.

"Kami masih menghitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk dana saksi parpol. Nanti itu semua akan dilampirkan dalam transparansi anggaran di KPU DKI," kata Eriko.

Parpol pengusung, yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, dan Hanura, juga mulai menyiapkan logistik kampanye seperti kaos dan alat peraga kampanye sembari menunggu nomor urut resmi dari KPU DKI. Sarana dan prasarana diadakan secara gotong royong. Namun, belum ada rincian dana untuk kebutuhan ini.

Eriko menambahkan, bakal pasangan calon petahana itu masih fokus bekerja dan menyelesaikan tugas di DKI Jakarta. Apalagi, keduanya berniat untuk tidak mengajukan cuti. Saat ini, gugatan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur tentang cuti petahana sedang berproses di Mahkamah Konstitusi.

Nantinya, jika gugatan di MK tentang aturan cuti itu tidak dikabulkan, Basuki-Djarot juga berkomitmen untuk kampanye secara damai. Tim sukses berharap pesta politik DKI ini menjadi kegembiraan politik, bukan alat perpecahan yang tidak diinginkan.

Sebagai petahana, Basuki-Djarot juga akan mempertahankan program yang dinilai sudah baik dan efektif. Adapun program yang belum optimal akan dievaluasi dan disempurnakan.

(IRE/DEA)

UNJUK RASA

Bareskrim Berjanji Usut Tuntas Pidato Basuki

JAKARTA, KOMPAS — Badan Reserse Kriminal Polri menegaskan akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan penghinaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Sejumlah pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama, meminta masyarakat tenang dan menyerahkan kasus ini diproses hukum.

"Kami sudah menerima laporan pengaduan serta sudah memeriksa para saksi dan minta bukti. Kami juga akan memeriksa Pak Ahok (panggilan akrab Basuki) sesuai permintaan Saudara. Mohon doa restu saudara," ujar Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Inspektur Jenderal Ari Dono Sukmanto di hadapan massa demonstran yang memadati kawasan Monumen Nasional di depan kantor sementara Bareskrim di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Jumat (14/10).

Ari menyampaikan pernyataan itu setelah pertemuan tertutup sekitar 45 menit dengan 10 wakil demonstran di ruangan

kerjanya. Di antara 10 wakil demonstran itu tampak Habib Muhsin dari Front Pembela Islam (FPI), Bachtiar Nasir dari Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia, serta aktivis Ratna Sarumpaet.

Sebelumnya, se usai shalat Jumat di Masjid Istiqlal, massa yang sebagian besar berpakaian putih bergerak menuju kantor sementara Bareskrim Polri. Sesampai di tempat itu, Habib Rizieq dari FPI naik ke atas truk berpengeras suara dan berorasi. Pada saat pertemuan tertutup berlangsung, mantan Ketua MPR dan tokoh Muhammadiyah, Amien Rais, ikut berorasi.

Dari kantor Bareskrim, massa bergerak ke Balai Kota Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan. Unjuk rasa yang berlangsung sekitar 3,5 jam itu secara umum berlangsung aman walau sempat diwarnai pelemparan botol plastik dari arah kerumunan massa ke arah Balai Kota Jakarta.

Aksi demo melumpuhkan Jalan Medan Merdeka Timur dan

(Bersambung ke hal 15 kol 1-3)

KOMPAS, SABTU, 15 OKTOBER 2016



KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Sejumlah organisasi massa (ormas) keagamaan berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta, Jumat (14/10). Aksi tersebut digelar berkaitan dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap oleh para pendemo melecehkan salah satu agama. Aksi berjalan dengan tertib.

Bareskrim Berjanji Usut Tuntas Pidato Basuki

(Sambungan dari halaman 1)

Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa tidak hanya dari Jakarta dan sekitarnya, tetapi juga dari kota yang jauh, seperti Cirebon, Tegal, bahkan Jambi.

Di tengah massa, Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan dan Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana turun langsung mengamankan aksi unjuk rasa dengan berboncengan sepeda motor.

Massa dari sejumlah organisasi masyarakat itu menuntut polisi mengusut rekaman video pidato Basuki di Kepulauan Seribu, 27 September lalu, yang dinilai menghina agama Islam.

Wakil Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan, Kamis lalu, menilai pernyataan Basuki itu masuk kategori penistaan kitab suci dan menghina ulama. Pernyataan itu punya konsekuensi

hukum sehingga harus diselesaikan melalui proses hukum.

Tetap tenang

"Permintaan maaf Basuki sudah baik, tetapi penegakan hukum harus tetap berjalan untuk menegakkan rasa keadilan. Ini bukan sekadar masalah pribadi, melainkan keteledoran seorang pemimpin agar tak menjadi preseden buruk dan tak terulang di masa yang akan datang," kata Amirsyah. Ia pun meminta masyarakat tetap tenang dan tidak main hakim sendiri karena kasus ini ditangani penegak hukum.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj. Menurut Said Aqil, peristiwa ini jadi alarm bagi semua pihak agar menjaga sikap dan tutur kata, terlebih pemimpin.

"Ini pelajaran berharga bagi semua pihak, tak hanya bagi Basuki. Hati-hati dalam mengelu-

arkan pernyataan karena bisa menimbulkan akibat yang tak terduga. Apalagi jika pernyataannya terkait agama. Perdamaian tentu tetap dikedepankan, tapi proses hukum sebaiknya tetap dijalankan," ujar Said, kemarin.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengimbau masyarakat tetap tenang, mengedepankan sikap damai dan akhlak mulia, serta menyerahkan penanganan kasus ini secara hukum. "Yang terpenting rawat kebersamaan sebagai keluarga besar bangsa," ujarnya.

Ditemui terpisah di Balai Kota Jakarta, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama kembali menegaskan, dirinya sama sekali tak bermaksud menghina Al Quran ataupun Islam. Ia mempersilakan siapa pun berunjuk rasa karena itu merupakan hak warga. Selain tak ada maksud menista, dirinya telah meminta maaf.

(IAN/MKN/WIE/RAM/C05/C09)

Surat Keterangan E-KTP Diusahakan Bisa Dipakai

KPU dan Disdukcapil Harus Pastikan Tak Ada Pemilih Ganda

JAKARTA, KOMPAS – KPU DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta terkait penggunaan surat keterangan sementara dalam Pilkada DKI 2017. Surat keterangan itu dikeluarkan sebagai pengganti blangko KTP elektronik.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Edison Sianturi, Senin (17/10), mengatakan, dari total 7.389.290 penduduk DKI yang wajib KTP, sudah 98,3 persen yang melakukan perekaman data KTP elektronik (e-KTP) hingga awal pekan ini.

"Kalaupun belum memegang fisik e-KTP (karena keterbatasan blangko e-KTP), kami memberikan surat keterangan kepada mereka. Format surat keterangan itu persis sesuai format yang diinstruksikan Kementerian Dalam Negeri," ujar Sianturi.

Surat keterangan itu bisa dipakai untuk berbagai keperluan, seperti urusan perbankan, pekerjaan, juga sekolah. Namun, kata Sianturi, surat keterangan belum bisa digunakan untuk memakai hak pilih. Karena itu, butuh

koordinasi antara Disdukcapil dan KPU.

Senada dengan itu, Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan, KPU segera berkoordinasi dengan Disdukcapil DKI terkait surat keterangan sementara untuk pilkada. Ia berharap surat keterangan sementara itu mencantumkan domisili dan bisa digunakan dalam pilkada.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif menyatakan, perekaman dan pencetakan e-KTP idealnya rampung sebelum pengumuman daftar pemilih tetap, 10 Desember 2016.

Selain menuntaskan perekaman dan pencetakan e-KTP, Syarif mengatakan, Disdukcapil dan KPU perlu memastikan tidak ada e-KTP ganda.

Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta

Selatan Sapto Wibowo mengatakan, pihaknya belum menerima petunjuk teknis dari Disdukcapil terkait surat keterangan sementara. Sejauh ini pihaknya baru menerima surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri tentang surat keterangan sudah merekam e-KTP, yang dapat dipakai untuk syarat pengajuan pelayanan publik, termasuk pemilihan umum.

Di Kabupaten Bekasi, Pemkab melayani perekaman data e-KTP pada hari Sabtu dan Minggu. Kepala Disdukcapil Kabupaten Bekasi Alisyahbana mengungkapkan, perekaman data e-KTP pada akhir pekan itu dilayani di seluruh kantor kecamatan dan kantor Disdukcapil Kabupaten Bekasi pukul 08.00-16.00. Hingga kini 424.919 warga Kabupaten Bekasi belum melakukan perekaman data e-KTP.

Warga yang sudah merekam data diberi surat keterangan sementara karena blangko e-KTP habis. "Surat itu dapat dijadikan dasar untuk terdaftar sebagai pemilih," ucapnya.

PPP

Sumarno menyatakan, parpol tidak dapat mencabut atau me-

revisi pasangan calon yang didukung. "Adanya isu perubahan dukungan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) tidak menggagalkan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni menjadi pasangan calon," ucapnya.

Dukungan ke pasangan lain itu dideklarasikan Ketua DPP PPP Djan Faridz di kantor PPP Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin sore. Djan menyatakan dukungan bagi pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Deklarasi dihadiri Basuki, Djarot, dan partai pendukung Basuki-Djarot.

Sebelumnya, PPP dari kubu Romahurmuziy telah resmi mendukung Agus-Sylvi dan mendaftarkan dukungan tersebut ke KPU.

"Enggak ada urusan dengan itu (PPP kubu Romi). Yang jelas, pasukan kami akan jadi tim sukses Basuki-Djarot," kata Djan.

Sementara itu, Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abdul Aziz meminta agar pasangan Basuki-Djarot tidak menanggapi dukungan PPP kubu Djan Faridz. Sebagai partai politik, PPP hanya mendukung Agus-Sylvi.

(HLN/MDN/ILO/MKN/IRE/C05)



Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno (kedua dari kanan); didampingi Komisioner KPU DKI Jakarta, Moch Sidik dan M Fadillah, serta Sekretaris Martin Nurhusin (kanan ke kiri); memberikan keterangan pers tentang jadwal penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada DKI Jakarta di kantor KPU DKI Jakarta, Jumat (21/10). Penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta akan dilaksanakan pada Senin (24/10), dilanjutkan dengan pengundian nomor urut pasangan calon, Selasa (25/10).

PILKADA DKI JAKARTA

Pembatalan Calon Mungkin Terjadi

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta secara resmi menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Senin (24/10). Setelah penetapan, calon yang terbukti melanggar aturan masih mungkin digururkan.

"Setelah penetapan, (jika) terjadi hal-hal yang menyebabkan calon tidak memenuhi syarat, calon dapat didiskualifikasi atau dibatalkan penatapannya," kata Ketua KPU DKI Sumarno saat jumpa pers, Jumat (21/10), di kantor KPU DKI Jakarta.

Sumarno menegaskan, calon batal ditetapkan jika tersangkut perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap, misalnya terbukti melakukan politik uang atau tindak kejahatan dengan ancaman penjara lebih dari 4 tahun. Sanksi diskualifikasi juga diberikan bagi calon yang menolak cuti selama masa kampanye serta kampanye di media cetak atau elektronik. Aturan pembatalan calon itu merujuk pada Pasal 88 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016.

Penetapan tiga pasang calon digelar pada Senin pukul 16.00 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Sehari setelahnya akan dilakukan pengundian dan pengumuman nomor urut di Jakarta International Expo, Jakarta Pusat, pukul 18.00. Saat penetapan, pasangan calon hadir bersama tim kampanye dan pendukung.

KPU DKI Jakarta juga mengatur ketentuan kampanye melalui media sosial. Pasangan calon harus mendaftarkan akun media sosial paling lambat sehari sebelum masa kampanye, yakni 27 Oktober. Pantauan kampanye dilakukan langsung oleh KPU DKI, Bawaslu, dan Polda Metro Jaya.

"Pendaftaran akun itu penting. Hal tersebut untuk menghindari kampanye media sosial yang bersifat penghinaan, fitnah, dan SARA," ujar Sumarno.

Sabtu pekan depan, KPU DKI Jakarta juga menggelar Deklarasi Kampanye Damai ketiga pasang calon di silang barat Monumen Nasional, Jakarta Pusat.

Imbauan untuk mengutamakan etika berpolitik juga disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Komitmen para kandidat dalam menjunjung tinggi etika berpolitik akan membuat kondusif situasi DKI Jakarta.

Dinamika yang muncul belakangan ini, menurut Wapres, bukan karena gesekan kelompok mayoritas terhadap minoritas, melainkan lebih karena persoalan etika berpolitik. "Saya meminta semua pihak menjaga ketenangan. Imbauan ini berlaku untuk semua pihak. Mereka harus mampu menjaga situasi yang berkembang saat ini," katanya di Kantor Wakil Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, kemarin.

Persoalan SARA, menurut

Wapres, tidak perlu dibawa ke ruang publik. Namun, jika hal itu tidak dapat dihindari, sebaiknya dibicarakan di ruang privat. Dalam demokrasi, membicarakan hal itu tak dipersoalkan selama di ruang privat. "Silakan saja berdiskusi bahwa dia suka si A, si B, bebas-bebas saja," katanya.

Di Indonesia, lanjut Wapres, beberapa kali muncul pemimpin dari kalangan minoritas. Menurut dia, tak ada gejolak serius ketika pemimpin itu mengemban tugas di wilayahnya. Ia menegaskan, persoalan pilkada bukan persoalan agama, melainkan menyangkut etika berpolitik. Wapres mencontohkan Agustin Teras Narang yang pernah menjadi Gubernur Kalimantan Tengah, Cornelis yang menjadi Gubernur Kalimantan Barat, dan Rudolf Pardede yang pernah menjadi Gubernur Sumatera Utara.

Pemutakhiran data

Moch Sidik dari Pokja Pemutakhiran Data Pemilih KPU DKI mengatakan, pemutakhiran data pemilih tetap direncanakan selesai 6 Desember. Saat ini, Panitia Pemungutan Suara di 267 kelurahan masih melakukan pencocokan dan penelitian. Warga yang belum masuk daftar pemilih dapat mendatangi tempat pemungutan suara satu jam sebelum ditutup.

"Warga takkan kehilangan hak

pilih selama mereka memiliki KTP elektronik dan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil," ujarnya.

Warga yang tak memiliki KTP elektronik atau surat keterangan, tetapi data mereka terekam di Disdukcapil, lanjutnya, tetap dapat memilih. Meski begitu, warga diimbau merekam data KTP elektronik sebelum 24 November atau setelah daftar pemilih sementara dikeluarkan. (NDY/COS)

ma Hi
KAMPUNG KOPIL PUNCA
ETROPOLITA

1. 19 September 2016, halaman 10

Penolakan Ahok Makin Meluas

JAKARTA – Penolakan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk memimpin kembali Ibu Kota semakin meluas. Tokoh-tokoh dan masyarakat menggelar berbagai aksi tolak Ahok di beberapa lokasi kemarin.

Di Jakarta Utara, Forum RT/RW menggelar rapat akbar dengan tema "Memilih Pemimpin Santun dan Prorakyat". Sejumlah tokoh hadir di antaranya mantan Ketua MPR Amien Rais, mantan Menkumham Yusril Ihsa Mahendra, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Priyanto, dan Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik.

Yusril mengimbau warga Jakarta bersatu memunculkan satu pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) DKI untuk menghadapi Ahok. Jika terjadi dauputaran, semua suara harus bersatu nantinya. "Dengan kebersamaan, pergantian rezim yang memerintah saat ini dengan rezim yang demokratis, sah, dan konstitusional dapat

lebih mudah," ujarnya kemarin.

Hal senada juga disampaikan Amien Rais. Menurutinya, Jakarta sebagai ibu kota sangat berbahaya bila dipimpin oleh orang yang tidak peduli dengan rakyat kecil dan sombongnya setinggi langit, sehingga dengan dipilihnya pemimpin yang arogan dan tak berkepentingan maka masyarakat bisa menjadi korban. "Dia (Ahok) hanya berpikir pada konglomerat pemodal, orang kecil tuduhina," katanya.

Sesuai menghadiri Forum RT/RW, Amien Rais, Yusril, dan tokoh lainnya mendatangi silaturahmi akbar dan doa bersama untuk kepemimpinan Jakarta di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Ketua Forum Komunikasi Anak Betawi Nachrowi Ramli menu-

turkan, berkumpulnya semua elemen masyarakat untuk bersatu berjuang melawan Ahok. "Jakarta mestinya menang kalau tidak ada yang berkhianat," katanya.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid juga mengajak segenap umat muslim untuk tidak golput pada Pilkada DKI 2017. "Merdeka harus memilih, umat Islam harus memilih, jangan golput," tandasnya.

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik mengatakan, partainya sangat berkomitmen dalam upaya menolak Ahok. Langkah ini dilakukan sejak tahun lalu ketika Gerindra mengajukan pemakzulan Ahok. Sementara menjelang Pilkada DKI, Gerindra telah melakukan dua cara yakni menggagalkan Ahok dan bersepakat tidak mendukung Ahok. "Ini merupakan bagian dari pertobatan Gerindra," ujar wakil ketua DPRD DKI Jakarta itu.

Kepada pengurus RT/RW, dia meminta untuk menyosialisasikan ke warganya agar tak lagi memilih Ahok yang dinilai arogan. Apalagi selama ini Ahok

"Bisa dicek banyak sekali perumahan, gedung perkantoran, dan mal-mal di Jakarta yang melanggar aturan ruang terbuka hijau. Tapi Ahok nyaris tak bertaji menghadapi kelompok ini."

ADI PRAYITNO
Pengamat Politik
Universitas Islam Negeri Jakarta

dianggap tak paham fungsi dari RT dan RW, termasuk soal serapan anggaran DKI yang masih rendah.

Menurut dia, bukan tak mungkin bila nantinya Ahok terpilih lagi akan banyak permukiman yang terganggu. Termasuk soal dugaan pemilih gelap, dia menyarankan masya-

rakat lebih berhati-hati karena tak menutup kemungkinan akan ada KTP dadakan.

Selain di Jakarta Pusat, aksi penolakan Ahok juga terjadi di kawasan Kota Tua, Finangsa, Taman Sari, Jakarta Barat, kemarin. Mereka berorasi menyampaikan kecewaan terhadap kepemimpinan Ahok yang dinilai arogansi dan emosional.

Kemudian, massa bergerak ke Kampung Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara untuk menggelar musyawarah besar. "Meski ada hadangan dari aparat, itu tak menyurutkan niat kami untuk menjegal Ahok," kata koordinator aksi Ratna Sarumpaet.

Dia juga mendesak KPUDKI untuk menambah aturan pemilihan gubernur, salah satunya tidak memilih calon yang tengah berkasus di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mengenai relokasi warga korban penggusuran, Ratna menilai Ahok dan Pemprow DKI melakukan kebohongan. Pasalnya, rusunawa yang menjadi tempat relokasi tercatat tak aman. Ini terbukti dari kasus

yang menimpa Ilham, 4, di Rusunawa Rawa Behok, Cakung, Jakarta Timur. Ilham tewas diduga akibat kondisi rusun yang tak layak. "Rusun itu khusus untuk yang masih lajang, tapi kalau yang sudah berkeluarga jangan harapan," ucapnya.

Menyikapi penolakan yang meluas, dalam sebuah kesempatan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, penolakan itu adalah hak semua orang. "Itu hanya karena perbedaan konsep dan pemikiran, siapa pun boleh menolak," ujarnya.

Ahok juga mengingatkan kepada siapa saja, termasuk Amien Rais, agar tidak menggunakan masjid sebagai sarana berpolitik.

Sesuai imbauan dari Majelis Ulama Indonesia bahwa khotbah yang menjadi salah satu bagian ibadah tidak boleh dipolitikasikan untuk menyerang lawan politik.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta Adi Prayitno menilai sejak awal Ahok sudah gagal membangun komunikasi politik dengan warga Jakarta,

terutama warganya akan digusur. Mungkin saja Ahok benar dan sesuai aturan dalam penggusuran, namun cara Ahok yang main berangus tanpa dialog memang membuat Ahok dituding sebagai pemimpin arogan.

Di sisi lain publik menilai Ahok tidak tegas menyikapi gedung-gedung liar di Jakarta. "Bisa dicek banyak sekali perumahan, gedung perkantoran, dan mal-mal di Jakarta yang melanggar aturan ruang terbuka hijau. Tapi Ahok nyaris tak bertaji menghadapi kelompok ini," ujarnya.

Hal inilah yang membuat Ahok dianggap pemimpin yang hanya tajam ke orang miskin dan melemah lawan kelompok atas. Dalam konteks penggusuran, Ahok mesti belajar banyak ke Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang menggunakan pola-pola komunikasi persuasif ke rakyatnya. Risma juga banyak menggusur di Surabaya, namun Risma tak pernah dicap sebagai pemimpin sombong.

● **bima setiyadi/
yan yusuf/
r ratna purnama**

Koalisi Siapkan Skenario Hadapi Cagub PDIP

JAKARTA – Koalisi Kekeluargaan menyiapkan skenario pasangan calon untuk menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Ini merespons calon gubernur (cagub) dari PDIP yang rencananya diumumkan hari ini.

Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Kekeluargaan seperti Gerindra, PKS, Demokrat, PPP, PKB, dan PAN mulai bermanuver mencari pasangan calon ideal. Apalagi pendaftaran calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) DKI semakin dekat, yakni 21-23 September 2016.

Ketua Tim Penjaringan Cagub Partai Gerindra Syarif me-

ngatakan, partainya hingga kini masih solid terhadap kesepakatan Koalisi Kekeluargaan, di mana tidak mendukung petahana dan menunggu keputusan resmi PDIP menetapkan cagub. Artinya, bila PDIP tidak meng- usung Ahok, partai dalam Koalisi Kekeluargaan akan me- rapat ke PDIP dengan menyodorkan Sandiaga Uno sebagai cawagubnya.

Namun, apabila PDIP mendukung Ahok-Djarot, koalisi akan menerapkan *plan B*, di mana Sandiaga menjadi cagub dengan wakilnya ditentukan oleh Sandiaga ketika Koalisi Kekeluargaan tidak menemui kesepakatan dalam memutuskan satu dari tiga cawagub, yakni Sekda DKI Saefullah, Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan DKI Sylviana Murni, serta kader PKS Mardani Ali.

Dia mencontohkan Sandiaga-Saefullah. Jika partai dalam Koalisi Kekeluargaan mayoritas memilihnya, pasangan calon tersebut sudah pasti didaftarkan. Namun, bila lebih kecil dan tidak ada kesepakatan hingga Kamis (22/9) malam, tiga sosok itu akan ditentukan

”Tidak tunggu PDIP. Pastinya kami akan mengumumkan pasangan calon sebelum Jumat (23/9),”katanya.”

ABDUL AZIS
Ketua DPW PPP DKI Jakarta

oleh Sandiaga. ”Kami akan mendaftarkan pada Jumat (23/9) pukul 10.00 WIB,” ujar Syarif di Gedung DPRD DKI Jakarta kemarin.

Gerindra yang saat ini makin

mesra dengan PKS mewacanakan Sandiaga-Mardani. Hal ini membuat Partai Demokrat, PPP, dan PKB berencana membentuk poros alternatif. Menurut Syarif, jika poros alternatif sepakat mengusung pasangan calon sendiri, Gerindra justru mengharapkannya.

Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) PKS DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengaku tidak khawatir PDIP yang akan mengusung Ahok-Djarot. Hal itu merupakan dinamika politik seperti halnya poros alternatif yang tengah menggodok mantan Menkumham Yusril Iha Mahendra, mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli, dan mantan Mendikbud Anies Baswedan. ”Gerindra dan PKS tetap

akan mengusung Sandiaga-Mardani Ali,” ucapnya.

Meski demikian, PKS dan Gerindra terus mengomunikasikan Sandiaga-Mardani ke partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Kekeluargaan.

Ajakan bersatu dari Gerindra dan PKS direspons negatif oleh Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abdul Azis. Menurut dia, PPP, Demokrat, dan PKB tingkat DPP sudah sepakat bersatu menjadi poros alternatif meng-

usung pasangan calon sendiri. Berdasarkan informasi di- himpun, ada peluang Yusril yang akan dipasangkan dengan Saefullah atau Sylviana Murni. ”Tidak tunggu PDIP. Pastinya kami akan mengumumkan pasangan calon sebelum Jumat

(23/9),”katanya.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan, PDIP hari ini akan mendeklarasikan pasangan calon. Meski masih dirahasiakan, nama Ahok-Djarot paling menguat di hariterakhir sebelum dideklarasikan. ”Pengumuman cagub dan cawagub DKI dari PDIP, Selasa 20 September 2016 pukul 20.00 WIB di DPP PDIP,” ujarnya.

Sementara itu, petahana Ahok masih berharap PDIP mendukungnya bersama Hanura, NasDem, dan Partai Golkar. Namun, apabila PDIP mendukung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dia menyerahkan sepenuhnya kepada PDIP.

● **bima setiyadi/rahmat sahid**

PDIP Jagokan Ahok-Djarot Koalisi Solid Usung Satu Calon

JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akhirnya memastikan mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam pilkada serentak 2017 nanti. Sebagai pasangan, partai berlambang banteng dalam lingkaran tersebut mengusung kadernya, Djarot Saiful Hidayat.

Di sisi lain, pascaputusan PDIP mendukung Ahok-Djarot, parpol yang tergabung dalam Koalisi Kekeluargaan bersepakat untuk mendukung satu pasang calon. Dalam pertemuan tadi malam, mereka memastikan menetapkan Sandiaga Uno sebagai calon gubernur (cagub), sedangkan untuk calon wakil gubernur (cawagub) masih akan dibahas lebih lanjut di tingkat DPP partai.

Para pimpinan DPP partai sepakat menyerahkan tiga nama yang bakal mendampingi Sandiaga. Mereka adalah Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah, Deputi Pariwisata DKI Sylviana Murni, dan

kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali. Rencananya, nama yang akan mendampingi Sandiaga sudah kehar pada Kamis (22/9), dan selanjutnya Jumat besok harinya mereka akan mendaftarkan pasangan calon ke KPUD DKI Jakarta.

Pengumuman PDIP mengusung pasangan petahana, Ahok-Djarot, dilakukan tadi malam di Kantor DPP PDIP, dengan dihadiri sejumlah fungsionaris DPP PDIP dan kedua pasang calon. Pada saat bersamaan, DPP PDIP juga mendeklarasikan kandidat yang akan bertarung pada pilkada Rante, Nanggroe Aceh Darus-

alam, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua Barat.

Basuki Tjahaja Purnama hingga saat ini adalah petahana yang bertugas meneruskan tugas pasangan Jokowi-Ahok yang diusung PDIP pada tahun 2012 lalu, ujar Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat membacakan pengumuman.

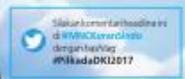
Hasto mengungkapkan, bagi PDIP yang berideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Dalam pandangan PDIP, pasangan Ahok-Djarot mempunyai komitmen yang teguh dalam melaksanakan ideologi PDIP

tersebut. Selain itu, PDIP juga meyakini pasangan Ahok-Djarot mampu bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjajawantahkan Nawacita dalam praktik pemerintahan di DKI Jakarta.

"PDIP memilih pasangan Ahok-Djarot mampu meneruskan dan mengimplementasikan visi-misi Jakarta Baru yang sebelumnya diusung pasangan Jokowi-Ahok di Pilkada 2012 lalu. Hal ini dibuktikan dengan hasil survei selama setahun terakhir yang konsisten menunjukkan tingkat kepuasan publik DKI Jakarta yang tinggi terhadap pasangan tersebut, jelasnya.

Ahok tidak memberikan pernyataan terkait dukungan PDIP tersebut. Sepanjang acara tersebut, dia tidak henti meng-
umbar senyum.

Ko Hal 15



Ikuti berita terkait di www.sindonews.com

Formasi Kursi di DPRD

28	9	10	5
BJP	PKS	HANURA	PDIP

Basuki Tjahaja Purnama
(Gubernur DKI Jakarta)

Djarot Saiful Hidayat
(Wakil Gubernur DKI Jakarta)

Penantang

Rapat Koalisi Kekeluargaan tadi malam menyepakati untuk mengusung Sandiaga Uno sebagai penantang Ahok. Disiapkan tiga nama cawagub. Namun skenario ini bisa berubah tergantung rapat DPP.

Sandiaga Uno
(Politikus Gerindra)

Mardhani Ali
(Kader PKS)

Saefullah
(Sekda DKI Jakarta)

Sylviana Murni
(Deputi Pariwisata)

PERTARUNGAN DIMULAI

Persaingan menuju kursi DKI 1 resmi dimulai hari ini. PDIP kemarin telah memunculkan calonnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat. Pilkada DKI Jakarta menyedot perhatian publik karena kerap dianggap miniatur perpolitikan nasional.

Tahapan Pilkada
Pendaftaran calon: 21-23 September 2016



Foto: Sindonews

PDIP Jagokan Ahok-Djarot Koalisi Solid Usung Satu Calon

((dari Hal 1

Namun, sebelumnya, se usai bertemu dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Ahok menegaskan kesiapannya melaksanakan Dasa Prasetya yang berisi sepuluh butir pemikiran kebangsaan mengenai pemberdayaan dan pemerataan masyarakat.

Dasa Prasetya memang menjadi prasyarat yang diajukan PDIP. Setelah deklarasi, Wasekjen DPP PDIP Ahmad Basarah menyampaikan kontrak politik Dasa Prasetya untuk ditandatangani Ahok-Djarot. "Kontrak politik ini adalah prosedur baku bagi mereka yang diusung PDIP, tanpa terkecuali," kata Basarah.

Deklarasi dukungan terhadap duet Ahok-Djarot oleh PDIP terbilang cukup dramatis. Sebelum pengumuman, pada siang harinya PDIP sudah menggelar konferensi pers yang disampaikan Ahmad Basarah. Intinya, Basarah hanya menyampaikan bahwa pasangan calon yang diusung di Pilkada DKI Jakarta prosesnya mulai penjurangan, seleksi, hingga penentuan akhir sama dengan tahapan yang dilakukan untuk penetapan pasangan calon di 101 daerah yang mengikuti pilkada serentak 2017 nanti.

Sebelum pengumuman, PDIP sore kemarin juga menggelar rapat pleno terakhir di kediaman Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar. Di tengah agenda itu, hadir juga Ahok-Djarot yang duduk satu meja dengan Megawati, Bendahara Umum PDIP Oly Dondokambey, dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

"Inilah cara PDIP dalam melakukan seleksi kepemimpinan, untuk memberikan setidaknya upaya memberikan calon terbaik kepada masyarakat, untuk dipilih dalam pilkada nanti. Inilah cara kami, dalam ikhtiar politik, sehingga dalam menentukan calon, kami pertimbangkan masukan dari rakyat, dari tokoh, dan lain-lain," kata Basarah.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta Adi Prayitno menilai dukungan PDIP terhadap Ahok berpotensi mengancam soli-



Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (tengah) dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (dua kanan) menunjukkan dokumen politik, disaksikan (dari kiri ke kanan) Sekretaris DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, dan Wasekjen DPP PDIP Ahmad Basarah sesuai pengumuman di Kantor DPP PDIP, Jakarta, tadi malam.

ditas internal partai, karena pilihan Ahok tidak mencerminkan aspirasi pendukung PDIP di level *grassroots*. "Di tengah dinamika internal yang masih bergejolak, pilihan mendukung Ahok adalah ujian nyata dari soliditas PDIP. *Grassroots* PDIP telanjur banyak yang sakit dengan Ahok," kata pengamat politik Adi Prayitno kemarin.

Dalam pandangannya, pilihan mendukung Ahok adalah praktik nyata dari oligarki partai besutan Megawati itu. Pasalnya, walaupun di level *grassroots* banyak tuntutan memajukan kader sendiri, elite PDIP tidak mendengarkan dan justru memilih calon lain. "Semua keputusan politik ditentukan elite tanpa berkompromi dengan keinginan kader di level bawah," tandasnya.

Di sisi lain, pilihan meng- usung Ahok tidak mencerminkan PDIP sebagai partai besar. Pasalnya, di tengah keberlimpahan kadernya yang mumpuni plus sebagai partai pemenang, PDIP hanya berani men- yodorkan kadernya sebagai

pelengkap Ahok. Partai itu rela berjubel ngantre memberi dukungan kepada Ahok setelah Golkar, Nasdem, dan Hanura yang telah memberi dukungan sebelumnya. "Dignity sebagai partai besar, sebagai partai petarung nyaris tak ada," katanya.

Solid Dukung Satu Pasangan Calon

Bersamaan dengan langkah PDIP memasang Ahok-Djarot, pimpinan DPD parpol yang tergabung dalam Koalisi Kekeluargaan melakukan pertemuan di suatu rumah makan di kawasan Jalan Pramuka, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, mereka bersepakat mengusung satu pasang kandidat untuk menghadapi pasangan petahana tersebut.

"Kami sepakat untuk usung satu calon pasangan agar pertarungan *head to head*," ujar Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik sesuai pertemuan.

Dia menuturkan, untuk melawan calon petahana yang didukung PDI Perjuangan, Golkar,

Hanura, dan Nasdem, Koalisi Kekeluargaan bersepakat meng- usung Sandiaga Uno menjadi cagub, sedangkan cawagub akan terlebih dulu dibahas di tingkat DPP. Mereka mengajukan sejumlah nama, yakni Saefullah, Sylviana Murni, dan Mardani Ali.

Taufik meyakini, pimpinan di tingkat DPP satu suara memperjuangkan hasil pertemuan ini, sebab pertemuan ini diselenggarakan atas izin petinggi partai tingkat DPP. "Kami harap DPP memutuskan cawagubnya pada Kamis (22/9). Kami akan daftarkan calon pasangan pada Jumat (23/9) pukul 14.00 WIB," ujarnya.

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli atau Nara membenarkan bila hasil pertemuan koalisi ke- keluargaan malam ini menemukan kepastian enam partai untuk mencari satu pasangan calon setelah ditinggal satu anggota keluarga yang tengah memutuskan untuk men- dukung petahana dalam Pilkada DKI 2017.

Nara optimistis petinggi

enam partai Koalisi Ke- keluargaan tingkat DPP sepakat dengan hasil pertemuan enam petinggi partai tingkat daerah Koalisi Kekeluargaan malam ini, sehingga pertarungan nanti hanya ada dua pasangan calon. "Kami pasti menang karena kami keluarga yang tidak akan terpecahkan setelah ditinggal satu keluarga. Ini merupakan sejarah bagi kami yang bersatu untuk kebaikan warga Jakarta," tegasnya.

Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abdul Aziz pun senada dengan Taufik dan Nara. Menurutnya, PPP tidak akan bergabung dengan PDI Perjuangan dan akan memperkuat Koalisi Kekeluargaan. Begitu juga dengan Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hazbyallah Ilyas yang sebelumnya telah ramai dibicarakan akan membuat poros alter- natif. "Pokoknya kami solid. Kami akan pastikan di tingkat DPP, kami solid," ujar Aziz dan Hazby.

● bima setyadi/
rahmat sahid/r ratna
purnama/kiswondari/
mula akmal

4. 22 September 2016, headline news

:: PILKADA DKI JAKARTA

SBY Konsolidasi dengan PKB, PAN, dan PPP

JAKARTA – Beberapa partai politik berupaya mencari lawan sepadan untuk bisa mengimbangi pasangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat. Untuk itu, tadi malam mereka menggelar pertemuan untuk melakukan konsolidasi.

Hanya, konsolidasi yang digelar di kediaman Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, tersebut tidak melibatkan Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kedua pimpinan partai tersebut, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden DPP PKS Sohibul Iman, melakukan pertemuan sendiri.

Ke Hal 15))



Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, menyerahkan formulir pendaftaran pencalonan kepada Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno (kiri) disaksikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kanan) di Kantor KPUD DKI Jakarta, Salemba, kemarin.

SBY Konsolidasi dengan PKB, PAN, dan PPP

((dari Hal 1

Belum bisa dipastikan apakah fakta tersebut mengindikasikan adanya perpecahan di internal Koalisi Kekeluargaan. Sohibul Iman yang dikonfirmasi wartawan mengatakan, walaupun tidak dilibatkan dalam pertemuan di Cikeas partainya diberi tahu perihal pertemuan tersebut. Dia pun tetap berharap ada kesamaan sikap di antara keenam partai anggota koalisi. "Jadi, semacam ingin bicara dulu empat partai, nanti setelah punya formula yang bagus akan dibahas bersama enam partai," kata Sohibul.

Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan usai pertemuan mengatakan Partai Demokrat, PKB, PPP, dan PAN sepakat membangun suatu koalisi. Namun mereka masih menggodok beberapa nama. "Mengerucut beberapa nama yang akan difinalisasi besok siang (siang ini)," katanya.

Sandiaga Uno, yang dijagokan Partai Gerindra sebagai ca-

lon gubernur Jakarta, meyakini Koalisi Kekeluargaan akan utuh dan solid untuk mengusung satu pasang calon. Dia berharap koalisi bersatu karena hal tersebut merupakan aspirasi masyarakat. "Kami kan menampung aspirasi masyarakat dan tidak bisa egois. Karena masyarakat menginginkan Koalisi Kekeluargaan tetap bersatu," kata Sandiaga.

Hinggaberitainiditurunkan, siapa pasangan kandidat calon gubernur dan wakil yang bakal diusung Partai Demokrat dan tiga partai lain belum diputuskan. Sebelumnya, dalam pertemuan pimpinan Koalisi Kekeluargaan di level dewan pimpinan daerah (DPD) sudah ada kesepakatan mengusung Sandiaga sebagai calon gubernur.

Siapa yang bakal mendampingi kader Partai Gerindra tersebut diserahkan kepada pimpinan DPP parpol yang tergabung dalam koalisi. Mereka hanya merekomendasikan tiga nama sebagai calon gubernur,

yakni Sekda Provinsi DKI Jakarta Saefullah, Deputi Pariwisata Pemprov DKI Jakarta Sylviana Murni, dan politikus PKS Mardhani Ali.

Berdasar pantauan KORAN SINDO, selain SBY sebagai tuan rumah, hadir tiga pimpinan pusat partai. Ada Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar yang didampingi Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPP PKB Marwan Djafar; Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan; dan Ketua Umum DPP PPP M Romahurmuziy yang datang bersama Wakil Ketum Arwani Thomafi dan Emron Pangkapi.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syawri Chaniago menilai Pilkada DKI Jakarta mendatang bukan sekadar pertarungan tingkat daerah. Ini juga perang antara Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Keenam SBY. "Ini pertarungan pengaruh antara Megawati vs SBY," kata Pangi ketika dihubungi *Sindonews* kemarin.

Ahok-Djarot Mendaftar

Pasangan Ahok dan Djarot resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta kemarin. Kedatangan pasangan petahana tersebut diantar langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Selain itu, turut pula sejumlah pimpinan partai pendukung lain.

Berdasarkan pantauan, sebelum mendaftarkan diri ke KPU Ahok dan Djarot terlebih dulu mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, sekitar pukul 12.24 WIB. Mereka langsung melakukan rapat koordinasi dengan Megawati.

Sebelum berangkat ke KPU Megawati sempat menyampaikan alasan PDIP memutuskan memilih Ahok dan Djarot untuk maju dalam Pilgub DKI 2017, yakni ingin mewujudkan Pancasila. Ketua Tim Pemenangan Ahok dari Golkar, Nusron Wa-

hid, juga memimpin doa.

Selanjutnya Ahok dan Djarot naik ke mobil Megawati. Ahok dan Megawati duduk di belakang, sedangkan Djarot di depan. Selain putri proklamator Soekarno tersebut, turut mendampingi Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dan Ketua DPD PDIP DKI Ady Wijaya, serta tiga elite parpol pendukung, yakni Golkar, Hanura, dan Nasdem. Di kantor KPU DKI pasangan tersebut disambut massa berjumlah ratusan orang, gabungan dari partai pendukung.

Saat mendaftar ternyata Ahok-Djarot belum memiliki visi-misi dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno pun meminta agar pasangan calon besutan empat partai itu melengkapi formulir visi-misi sebelum 24 September.

● bima setiyadi/
mula akmal/r ratna
purnama/ant

Kebijakan Ahok Dinilai Timbulkan Konflik

JAKARTA – Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai tidak terencana dengan matang sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Gubernur juga minim melibatkan partisipasi publik.

Menurut Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah, sejak memimpin Ibu Kota Ahok tidak pernah menggunakan kebijakan publik. Tidak mengherankan bila setiap kebijakan yang dikeluarkan kerap memunculkan persoalan, padahal Pemprov DKI memiliki Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang berwenang menjangkau aspirasi warga sebagai masukan gubernur. "Segala kebijakan harus matang. Publik harus dilibatkan. Tanpa partisipasi publik,

kebijakan hanya popularitas semata," ujar Trubus kemarin. Menurut dia, kebijakan publik memang membutuhkan waktu agar semuanya berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Maka itu, dahulu ada yang namanya Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Artinya regulator tidak bisa memanfaatkan kekuasaannya untuk mengambil sebuah kebijakan yang keluar dari rencana. "Setiap pengurusan selalu terjadi masalah. Apa salahnya meniru gaya Joko Widodo yang selalu turun ke lapangan untuk

menyelesaikan masalah. Karakteristik Ahok terlalu elite. Bukan prorakyat. Ingat fondasinya dari bawah," ungkapnya.

Karena itu, apabila Ahok-Djarot kembali memimpin Jakarta sesuai diusung PDIP, dia menyarankan pasangan ini dapat berpihak kepada masyarakat kecil bukan pada pengusaha. "Jangan berpikiran kalau ketemu warga takut dianiaya. Masak pemimpin takut sama yang dipimpinnya. Kalau ketemu pengusaha bisa sebulan sekali. Belum lagi terungkapnya Sunny dalam dugaan suap rekamasi dan tidak konsistennya pernyataan Ahok. Jadi kebijakan yang dibuat Ahok banyak dipengaruhi pengusaha, bukan rakyat kecil," papar Trubus.

Pengamat perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga sepakat dengan Trubus. Dia menilai munculnya konflik di DKI akibat kepemimpinan

"Jangan berpikiran kalau ketemu warga takut dianiaya. Masak pemimpin takut sama yang dipimpinnya. Kalau ketemu pengusaha bisa sebulan sekali."

TRUBUS RAHARDIANSYAH
Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti

Ahok yang tidak mau mendengarkan aspirasi warga. Dalam mewujudkan visi misi yang merupakan janji kepala daerah terhadap warganya saat meminta dukungan, Ahok seharusnya membangun suasana kondusif

dan melibatkan masyarakat. Jangan sampai antara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak saling dukung seperti yang terlihat saat ini.

Misalnya dalam penanganan banjir yang menjadi prioritas dalam visi misi Jakarta Baru. Seharusnya bila Jakarta masih banjir, Ahok tidak menyalahkan kinerja anak buahnya. Sebaiknya Ahok menunjukkan empatinya kepada warga terdampak banjir, menunjukkan rasa prihatin, bahkan kalau perlu blusukan ke lokasi banjir.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lunglung) mengatakan, pembangunan yang dilakukan Ahok selama ini tidak sesuai perencanaan yang disusun dari musrenbang tingkat RW, lurah hingga provinsi, kemudian diusulkan dalam APBD ataupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Misal-

nya dalam penertiban Kalijodo dan Pasar Ikan, Jakarta Utara. Seharusnya apabila sesuai perencanaan, warga tidak akan menjadi korban pengurusan dan tentunya kehidupannya menjadi lebih layak.

Kemudian pembangunan jalan layang Semanggi yang menggunakan biaya dari koefisien lantai bangunan (KLB) dan pembangunan sejumlah Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) yang menggunakan dana *corporate social responsibility* (CSR). Jika dilihat dari sisi kebutuhan warga, jalan layang Semanggi itu hanya akses untuk pemilik kendaraan roda empat. Semestinya Pemprov DKI memperbaiki dan menambah moda transportasi massal.

"RPTRA itu bisa dibangun menggunakan APBD. Kenapa malah pakai CSR? Kalau tidak bisa menggunakan APBD setidaknya biaya CSR atau KLB di-

gunakan untuk membangun kegiatan prioritas yang direncanakan," ujarnya.

Menanggapi itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membantah bahwa semua kebijakan dan pembangunan yang dilakukannya di luar perencanaan. Semua pembangunan untuk memenuhi kebutuhan warga. Misalnya pembangunan RPTRA adalah untuk menyelesaikan masalah di lingkungan, warga dapat menuntaskannya dengan berkumpul di RPTRA, termasuk untuk fasilitas bermain anak-anak, sekaligus melakukan kegiatan apapun.

"Kami terus berupaya menjadikan Jakarta lebih baik untuk warga Jakarta. Kalau tidak prorakyat ngapain saya kasih rusewana, Kartu Jakarta Pintar, bus gratis, dan sebagainya," ucap mantan Bupati Belitung Timur itu.

● **bima setiyadi**

Koalisi Gagal Satukan Barisan

BOGOR - Keinginan Koalisi Kekeluargaan untuk mempersatukan suara dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 menemui jalan buntu. Dua kubu yang terbentuk belakangan, yakni kubu Cikeas dan kubu Kertanegara gagal mengambil jalan tengah untuk mengusung satu pasang kandidat.

Kedua kubu itu akhirnya memilih jalan sendiri untuk mengajukan pasangan kandidat. Dengan demikian, Pilkada DKI Jakarta akan diikuti tiga pasang calon. Hanya, siapa dua pasangan calon yang bakal menghadapi Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, hingga berita ini diturunkan masih belum jelas.

Informasi yang beredar, Partai Demokrat yang bergandengan dengan PKB, PAN, dan PPP mengusung Agus Hari-murti Yudhoyono-Sylviana Murni yang saat ini menjabat Deputy Gubernur DKI Bidang Kepariwisata dan Kebudayaan. Siapa yang mendampingi Sandiaga Uno? Partai Gerindra dan PKS juga belum mengumumkan.

Hingga dini hari tadi pimpinan Partai Demokrat, PKB, PAN, dan PPP masih melakukan pertemuan intensif di kediaman Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Cikeas, Bogor. Di luar itu, Partai Gerindra dan PKS melakukan pertemuan di rumah keluarga Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

Kepastian pecahnya Koalisi Kekeluargaan disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan. Partainya mengucapkan selamat tinggal kepada PKS dan Gerindra. "PKS-Gerindra *goodbye*," katanya.

Dari Jalan Kertanegara, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menyatakan partainya dan PKS sudah mulai fokus pada pasangan nama yang akan diusung dalam pilkada. Sayangnya siapa nama pasangan dimaksud tidak disebutkan. "Pokoknya kita mengusung sekarang, kalau ada lebih banyak yang mengusung kan lebih bagus. Tapi yang jelas kita, Gerindra dan PKS, sudah mengerucut untuk memutuskan dan memfinalkan," katanya.

Sesaat sebelumnya, kepada wartawan, Prabowo mengatakan keputusan pencalonan akan disampaikan besok (Jumat ini). "Insya Allah kita akan dapatkan (namanya). Ya besoklah kira-kira (pengumuman)," sebut Prabowo.

Ke Hal 15))

Koalisi Gagal Satukan Barisan

((dari Hal 1

Dalam pertemuan di Jalan Kertanegara itu pihak PKS dihadiri langsung presidennya, Sohibul Iman.

Berdasarkan sejumlah informasi, penentuan pasangan calon pasang gubernur dan wakil gubernur yang bakal menjadi pesaing Ahok-Djarot berjalan alot. Hingga detik terakhir masing-masing kubu, dalam hal ini kubu Cikeas dan kubu Kertanegara bersikukuh dengan pilihan masing-masing.

Syarif Hasan mengatakan pertemuan antara empat partai koalisi dalam Pilkada Jakarta pada Rabu (21/9) malam sudah mengerucutkan nama calon kandidat, namun Gerindra tetap menginginkan Sandiaga Uno sebagai calon gubernur Jakarta. "Pertemuan tadi malam antara Partai Demokrat, PPP, PKB, dan PAN sudah mengerucutkan nama calon. Komunikasi dengan Gerindra dan PKS tetap terbuka, namun Gerindra ingin Sandiaga tetap nomor satu (calong gubernur)," katanya.

Menurut Syarif, Gerindra rela menjadikan Sandiaga sebagai calon wakil, asalkan calon gubernur yang diajukan empat partai koalisi memiliki elektabilitas lebih tinggi dibandingkan Sandiaga. "Gerindra tetap terbuka, namun ada syarat-syarat tertentu, yaitu menginginkan Sandiaga tetap nomor satu," ujarnya.

Wakil Sekjen DPP PKB Jazilul Fawaid menyebut rapat tidak bisa cepat mengambil keputusan karena SBY sangat detail. PKB dalam pertemuan itu mengusulkan Yusril Ihza Mahendra sebagai cagub dan Saefullah sebagai cawagub. Lain dengan PKB, PAN mengusulkan cawagub Sylvia tapi cagubnya belum. Anis Baswedan belum disebut dalam rapat semalam. "Saya pribadi setuju semakin banyak alternatif poros semakin mencerdaskan, paling memungkinkan ada 3 calon. Tapi



Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (dua kiri) bersama calon Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno (dua kanan) saat tiba di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, tadi malam. Sandiaga diundang dalam pertemuan tertutup antara Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera membahas calon pasangan gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung kedua partai.

nuansa yang hadir ingin adanya perubahan gubernur DKI. Ternyata hasil survei warga DKI punnya ekspektasi dan harapan punnya gubernur baru," ujarnya.

Wakil Ketua Umum DPP PPP Arwani Thomafi mengungkapkan, setelah berbagai diskusi dilakukan, PPP, PKB, Demokrat dan PAN menjalin kesepakatan mengusung satu pasangan kandidat. Keempat parpol tersebut berharap Gerindra dan PKS bisa bergabung sehingga pilkada DKI Jakarta hanya diikuti dua pasang calon saja.

Siapa jago yang disepakati? Dia hanya menyebut nama-nama seperti Yusril Ihza Mahendra, Sandiaga Uno, Anis Baswedan, Agus Yudhoyono, Sylviana Murni, dan Saefullah. "Jadinama-namaitu disampaikan oleh 4 parpol masing-masing untuk dikerucutkan satu pasang calon. Bagi PPP nama-namaitu yang didiskusikan, apa pun yang diputuskan empat atau enam parpol, PPP siap mendukung, kita mengikhlaskan untuk tidak usung

kader kita sendiri, yang penting kita bersatu," ungkapnya.

Boy Sadikin Gabung Sandiaga

Di tengah memanasnya pertarungan Pilkada DKI Jakarta, muncul sebuah kejutan. Kader PDIP Boy Sadikin Rabu malam datang ke kediaman Prabowo. Dalam pertemuan tersebut Boy menyatakan tidak mendukung calon petahana dan siap menjadi tim pemenang Sandiaga.

Boy Sadikin mengaku telah mengirimkan surat kemunduran dirinya dari PDIP per 21 September lalu. Alasannya, PDIP telah memutuskan untuk mendukung petahana yang sangat bertolak belakang dengannya. Dia tidak mendukung Ahok bukan karena faktor agama, suku atau etnis, melainkan karena persoalan pribadi Ahok dan programnya yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. "Jadi beliau yang main agama sebenarnya kan. Lihat saja videonya," ujar man-

tan Ketua Tim Sukses Joko Widodo dan Ahok pada Pilkada DKI 2012 tersebut.

Djarot Saiful Hidayat, yang dikonfirmasi mengenai hengkangnya Boy Sadikin, mengaku belum tahu surat pengunduran diri putra mantan gubernur Ali Sadikin tersebut. Namun, Djarot mengaku tidak ambil pusing jika memang ada kader yang mundur dari partai berlambang kepala banteng tersebut. "Yang seperti itu gampang kok. Tidak suka sama partai ya keluar," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, kemarin.

Mantan Wali Kota Blitar itu mengungkapkan, bahkan sebelum mundur menjadi kader bisa saja seorang kader melakukan tindakan indisipliner. "Biasanya ada peringatan 1, 2, dan 3, lalu bisa dipecat, itu saja," ujar Ketua DPP Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP PDIP tersebut.

● mula akmal/
bima setyadi/
kiswondari/ant

Silakan komentari headline ini di @MNCKoranSindo dengan hashtag #PilkadaDKI

7. 24 September 2016, headline news

Tiga Pasang Kandidat Sama Kuat



(Foto kiri) Pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, resmi mendaftar di KPU DKI Jakarta tadi malam. Pilkada DKI Jakarta 2017 akan diikuti tiga pasangan cagub-cawagub, yakni Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, serta Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

JAKARTA – Pilkada DKI Jakarta 2017 dipastikan diikuti tiga pasang calon. Hal ini terjadi setelah dua pasang kandidat, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, resmi mendaftar ke KPU DKI Jakarta tadi malam.

Mereka akan bersaing dengan kandidat petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahuk)-Djarot Saiful Hidayat, yang telah mendaftar pada Rabu lalu (21/9).

Agus-Sylviana diusung koalisi Cikeas yang beranggotakan Partai Demokrat, PKB, PAN, dan PPP; sedangkan Anies-Sandiaga dijajag koalisi Kertanegara yang terdiri atas Partai Gerindra dan PKS. Sementara Ahuk-Djarot diusung PDP bersama Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura.

Kubu Cikeas dan Kertanegara sama-sama optimisme pasangan kandidat mereka merupakan pilihan tepat dan berhasil mengalahkan petahana. Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Adi Prayitno meyakini kedua pasangan penantang tersebut mempunyai peluang besar mengalahkan Ahuk mengingat potensi mereka dan kekuatan politik di belakangnya.

Optimisme kubu Cikeas di antaranya disampaikan Ketua Umum DPP PPP Remahurmuzay, Murnit dia, Agus-Sylviana akan bisa diterima masyarakat Jakarta karena pasangan tersebut kombinasi yang pas untuk warga Jakarta.

Ke Hal 15

Siakan komentar Anda di [BNKoranOnline](https://twitter.com/BNKoranOnline) dengan hashtag #PilkadaDKI2017

MEREBUT DKI 1

Pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno resmi menjadi penantang calon petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

PARA KANDIDAT

 <p>BASUKI TJAHAJA PURNAMA Gubernur DKI Jakarta (Incumbent)</p> <p>Pengusung: <ul style="list-style-type: none"> • PDP : 28 kursi • Hanura : 10 kursi • Golkar : 9 kursi • Nasdem : 5 kursi Total 52 kursi</p>	 <p>DJAROT SAIFUL HIDAYAT Wakil Gubernur DKI Jakarta (Incumbent)</p> <p>Pengusung: <ul style="list-style-type: none"> • P Demokrat : 10 kursi • PPP : 10 kursi • PKB : 6 kursi • PAN : 2 kursi Total 28 kursi</p>	 <p>AGUS HARIMURTI YUDHOYONO Daryono (Mekah, 2013)Aga Kertanegara, Tangerang</p> <p>Pengusung: <ul style="list-style-type: none"> • P Gerindra : 15 kursi • PKS : 11 kursi Total 26 kursi</p>	 <p>SYLVIANA MURNI Deputi Gubernur DKI Bidang Kebudayaan dan Pariwisata</p> <p>Pengusung: <ul style="list-style-type: none"> • P Gerindra : 15 kursi • PKS : 11 kursi Total 26 kursi</p>	 <p>ANIES BASWEDAN Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>Pengusung: <ul style="list-style-type: none"> • P Gerindra : 15 kursi • PKS : 11 kursi Total 26 kursi</p>	 <p>SANDIAGA SALAHUDDIN UNO Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra</p> <p>Pengusung: <ul style="list-style-type: none"> • P Gerindra : 15 kursi • PKS : 11 kursi Total 26 kursi</p>
---	--	--	--	---	---

TAHAPAN PILKADA				
21-23 Sep 2016	24-25 Sep	25 Okt	28 Okt 2016-11 Feb 2017	12-14 Feb
Pendaftaran pasangan calon	Pemeriksaan keabsahan dan tes bebas narkoba	Pengundian dan pengumuman nomor urut	Masa kampanye dan debat publik	Masa tenang dan pembastahan dist. peraga
				15 Feb
				Pemungutan dan penghitungan suara

SYARAT PENCALONAN DARI PARPOL
Merah
20%
suara pilg atau minimal 22 kursi di DPRD DKI Jakarta

Sumber: LITBANG KOMAR SRDGO, berbagai sumber diluar

Tiga Pasang Kandidat Sama Kuat

((dari Hal 1

Politikus yang akrab dengan sapaan Rommy ini menyebut Agus lulusan militer yang memiliki kedisiplinan tinggi, berpendidikan bagus, dan santun. Adapun Sylviana adalah birokrat yang tangguh, akademisi, intelektual. Yang bersangkutan juga punya pergaulan sangat luas dan banyak pengalaman.

"Pasangan ini merupakan kombinasi muda dan tua, melambangkan demografi Jakarta. Agus Yudhoyono dari Jawa, Sylviana asli Betawi. Kami optimistis memberikan harapan baru kepada Jakarta," kata Rommy. "Saya tegaskan, calon sudah berbicara dengan kami soal visi dan misi bahwa Jakarta untuk rakyat, bukan konglomerat. Ini niat suci agar kita mengembalikan Jakarta kepada rakyatnya," lanjutnya.

Kubu Kertanegara juga memiliki keyakinan serupa. Presiden PKS Sohibul Iman meyakini Anies-Sandiaga merupakan pasangan yang terbaik untuk warga DKI Jakarta karena keduanya tokoh terbaik. Menurut dia, keduanya memiliki integritas dan kapabilitas. "Ketiga, saya yakin keduanya memiliki sesuatu yang unik sehingga dapat mencerdaskan bangsa dan yang terbaik," ujarnya.

Adi Prayitno menilai pasangan Agus-Sylviana dan Anies-Sandiaga punya peluang sebanding dengan Ahok-Djarot. Pada Agus-Sylviana misalnya, dia menyebut faktor SBY harus tetap diperhitungkan. Apalagi penunjukan anaknya menjadi pertaruhan besar baginya.

"Oleh karenanya, Presiden RI keenam ini akan menjadikan Pilkada DKI seperti pertarungan Pilpres 2004 lalu saat melawan Megawati. Dia akan mengerahkan segala sumber daya politiknya untuk memenangkan pertarungan ini. Bagi SBY, pilkada ini rasa pilpres," tandasnya.

Di sisi lain, sebagai pendatang baru, sosok Agus-Sylviana dianggap bisa menjadi alternatif yang menyegarkan di tengah kebisingan politik Jakarta yang serbakeras. Agus dikenal sebagai sosok yang cerdas dengan latar belakang pendidikan yang mantap, sedangkan Sylviana merupakan sosok birokrat energik dan memiliki prospek bagus.

Anies-Sandiaga juga memiliki peluang tak kalah besar. Menurut dia, Anies dipercaya sebagai sosok yang mampu mendulang insentif elektoral. Karenanya kansnya besar untuk mendapat dukungan publik.

"Meski Ahok di atas angin, yang patut dicatat adalah pemenangnya masih abu-abu. Karena hampir bisa dipastikan pilkada bakal berlangsung dua putaran," sebutnya.

KPU Provinsi DKI Jakarta melihat kemungkinan Pilkada DKI Jakarta berlangsung dalam dua putaran jika calonnya lebih dari dua pasang. Hal ini karena di Pilkada DKI punya kekhususan bahwa calon terpilih harus memenuhi syarat memperoleh suara lebih dari 50%. "Jadi, kalau di putaran pertama tidak ada satu pun calon yang meraih suara lebih dari 50%, dipastikan akan ada putaran kedua," ujar Ketua KPU Provinsi DKI Sumarno.

Sementara itu, dua pasang kandidat penantang petahana ini berjanji mengabdikan untuk masyarakat Jakarta. Agus Yudhoyono, misalnya, menyampaikan tekadnya untuk sekuat tenaga menjadikan Jakarta semakin maju, aman, tertib, ekonomi tumbuh, masyarakat makin sejahtera, dan beberapa perbaikan lain.

"Saya tahu ini tugas yang tidak mudah, tantangannya juga besar. Tapi saya percaya Jakarta lebih baik selalu dapat kita wujudkan bersama. Semboyan dan semangat yang

kami usung adalah Jakarta untuk Rakyat. Sekali lagi Jakarta untuk Rakyat karena memang Jakarta adalah milik rakyat, milik kita semua. Untuk dapat mencapai tujuan mulia tersebut, saya bersama Ibu Sylviana Murni siap berkompetisi secara sehat dan demokratis," ucapnya.

Adapun Anies Baswedan mengatakan, kehadirannya bersama Sandiaga Uno di Pilgub DKI Itulantaran Jakarta bukan hanya kota, Jakarta merupakan tempat tinggal manusia Indonesia dan di tanah Jakarta itu pula jutaan jiwa berikhtiar dan berusaha mendapatkan apa yang dijanjikan dari sebuah kemerdekaan.

Sementara itu, setelah melakukan pendaftaran, ketiga pasang kandidat harus melengkapi semua berkas yang dibutuhkan sampai 4 Oktober nanti. Selanjutnya KPU Jakarta akan melakukan verifikasi dan mengumumkan hasil verifikasi pada 24 Oktober. Adapun berkas dimaksud terdiri atas berkas pencalonan yang berisi surat pencalonan yang diteken parpol pengusung, persetujuan DPP parpol pengusung, surat pernyataan kesepakatan antarpantai yang bergabung dalam koalisi.

"Khusus petahana harus melengkapi formulir cuti. Kalau pasangan Agus dari TNI dan Sylvi dari PNS harus mengundurkan diri. Jadi ketika 24 Oktober, pasangan calon tersebut harus benar-benar cuti dan mundur untuk berkampanye," ujar Sumarno.

Selanjutnya para pasangan calon juga menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit AL Mintohadjo yang berlangsung selama dua hari sejak pukul 06.30 hingga 19.00 WIB. Mereka yang telah melakukan tes kesehatan pada hari itu akan langsung dites narkoba yang dilakukan Badan Nasional Narkotika (BNN).

Sempat Alot

Tampilnya Agus-Sylviana maupun Anies-Sandiaga sempat melalui jalan alot. Kedua pasangan akhirnya menjadi pilihan akhir setelah Koalisi Kekeluargaan yang sebelumnya berharap mengusung satu pasang kandidat untuk menyaingi Ahok-Djarot gagal mencapai titik temu.

Setelah melewati proses tarik ulur yang berlangsung selama dua hari, kubu Partai Demokrat, PKB, PAN, dan PPP yang menggelar pertemuan dua malam berturut-turut di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat SBY di Puri Cikeas, Cikeas, Kabupaten Bogor, akhirnya memutuskan mengusung calon sendiri, yakni Agus-Sylviana.

Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil rapat partai koalisi dan diusung para anggota DPW dan DPC dari keempat partai. "Seperti yang saya janjikan, pasangan ini memang kejutan, Agus akan berpasangan dengan Sylviana. Ini pasangan yang ideal," katanya saat memberikan keterangan di Puri Cikeas, Bogor, Jumat dini hari kemarin.

Proses tak kalah rumit dalam menentukan kandidat juga dilalui kubu Partai Gerindra dan PKS. Bahkan, setelah gagal mencapai titik temu dengan kubu Cikeas, Gerindra dan PKS yang menggelar pertemuan intensif di kediaman keluarga Ketua Umum DPP Partai Demokrat Prabowo Subianto di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan, tidak serta-merta menemukan kata sepakat untuk mengusung nama yang mendampingi Sandiaga karena berbagai pertimbangan.

Kedua parpol baru memutuskan mengusung Anies sebagai calon gubernur dengan Sandiaga sebagai calon wakil gubernur tadi malam. Prabowo mengumumkan paket ter-

sebut sekitar pukul 20.00 WIB. "Setelah melalui proses yang cukup panjang, bahkan bisa dikatakan proses sudah berjalan 8 bulan ini, kami menjalankan fungsi kami sebagai pembawa aspirasi rakyat," katanya.

Prabowo menegaskan mengusung pasangan tersebut karena menangkap permintaan rakyat yang mendasar untuk perubahan DKI Jakarta. Ibu Kota itu membutuhkan gubernur yang baru. Karenaitu pihaknya berusaha mencari pribadi yang bersedia dan berbakti membangun Ibu Kota. "Saya ingatkan, saya dulu yang mencalonkan Saudara Ahok untuk muncul di DKI dan sekarang saya menanggapi harapan rakyat untuk perubahan dan untuk itu kami (menetapkan putusan) setelah proses rebus yang cukup panjang," tandasnya.

Agus Mundur dari TNI

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo telah menerima surat pengunduran diri Mayor Inf Agus Harimurti Yudhoyono yang saat ini menjabat sebagai Komandan Batalyon Infanteri Mekanis 203/Arya Kemuning (AK) sebagai calon gubernur DKI Jakarta dalam Pilgub 2017. "Mayor Agus sudah mengajukan pengunduran diri. Barutadi pagisampainya. Surat sekarang di KSAD. Tembusan kepada Panglima TNI," ungkap Gatot di Mabes TNI, Cilangkap kemarin.

Gatot mengatakan bahwa Mayor Agus telah menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai prajurit TNI kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mulyono. Ia juga menjelaskan bahwa prosedur pengunduran diri Agus bisa dilakukan dengan cepat karena mengikuti prosedur dan dilakukan sesuai dengan aturan.

● bima setyadi/r ratna purnama/binti mufarida/okezone.com/ant

KPU Hanya Andalkan Tes Urine

Deteksi Penyalahgunaan Narkoba oleh Calon Kepala Daerah

JAKARTA – Tes penyalahgunaan narkoba dengan memeriksa rambut calon kepala daerah urung dilakukan di semua daerah yang menggelar pilkada. Hanya daerah tertentu yang melaksanakan tes rambut ini, salah satunya DKI Jakarta.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, tes rambut awalnya memang ingin diterapkan, tetapi ditemukan beberapa kendala di daerah sehingga urung dilaksanakan. *Pertama*, masalah kesiapan anggaran. Dibutuhkan anggaran yang lebih besar jika pengujian rambut dilakukan karena memiliki kerumitan tersendiri. *Kedua*, soal waktu yang terbatas. Pemeriksaan kesehatan kandidat hanya tiga hari, padahal untuk mendapatkan hasil tes rambut butuh waktu lebih lama.

"Karena kesiapan daerah berbeda-beda, akhirnya rata-rata KPU tidak melakukan tes rambut ini," ujar Arief saat dihubungi di Jakarta kemarin. Pemeriksaan kesehatan, termasuk tes narkoba terhadap calon, sudah dilakukan KPU di sejumlah daerah sejak kemarin.

Sejumlah KPU daerah sejak kemarin bahkan sudah mengirimkan sejumlah sampel urine ke Badan Narkotika Nasional (BNN) di Jakarta. Pada pilkada kali ini, pemeriksaan kesehatan calon tidak hanya melibatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), melainkan juga BNN di setiap daerah (BNN Provinsi).

Wacana menerapkan tes rambut sempat mengemuka menyusul kasus penangkapan Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Ahmad Wazir Nofiadi dalam kasus narkoba pada Maret 2016. Bupati ini ketahuan mengonsumsi sabu-sabu beberapa waktu setelah dia dilantik sebagai bupati. Kasus ini memunculkan pertanyaan terhadap metode tes narkoba yang dilaku-

kan KPU karena saat tes kesehatan Nofiadi, dia tidak terdeteksi menggunakan narkoba.

Ketua Biro Hukum dan Pembelaan Anggota Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Nizar BM mengatakan, pemeriksaan urine memang hanya bersifat jangka pendek, yakni keberadaan narkoba di tubuh seseorang hanya terdeteksi selama 34 jam.

"Untuk tahu seseorang memakai narkoba lebih dari 34 jam sebelum pemeriksaan, tes rambut memang lebih efektif," ujarnya saat dihubungi kemarin.

"Karena kesiapan daerah berbeda-beda, akhirnya rata-rata KPU tidak melakukan tes rambut ini."

ARIEF BUDIMAN
Komisioner KPU

Namun dia menilai pengujian narkoba pada pilkada kali ini akan lebih komprehensif karena KPU sudah melibatkan BNN. Diakui, dulu jika ada seorang calon yang dicurigai sebagai penyalah guna, IDI juga tetap mengirimkan urinenya ke laboratorium untuk ditindaklanjuti.

Nizar mengatakan, pemeriksaan kesehatan calon oleh IDI dilakukan berdasarkan standar yang disepakati dengan KPU. Artinya, IDI hanya melak-

sanakan apa yang diminta KPU.

Di sisi lain, Nizar menyayangkan jika KPU beralasan bahwa tes rambut tidak dilakukan hanya karena masalah anggaran, sebab uji narkoba ini hanyalah bagian kecil dari pemeriksaan kesehatan bakal calon. "Begitu juga alasan waktu yang lama. IDI bisa saja merekomendasikan bahwa seorang calon lolos kesehatan, tetapi hasil tes narkobanya akan menyusul nanti," ujarnya.

Sementara itu, BNN telah menerima sampel urine pasangan calon peserta pilkada dari sejumlah daerah kemarin. Sudah ada empat BNN daerah yang menerima sampel urine calon, yaitu Sumatera Selatan, Jambi, Banten, dan Kalimantan Selatan.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat BNN Kombes Pol Slamet Pribadi mengatakan, pelibatan BNN pada tes kesehatan calon berangkat dari maraknya kasus narkotika yang melibatkan pejabat tinggi daerah. "KPU selalu ujung tombak pelaksanaan pilkada serius menanggapi masuknya beberapa pihak agar melibatkan BNN dalam proses pilkada," katanya kemarin.

KPU maupun BNN, kata dia, sepakat untuk saling mendukung dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba selama pelaksanaan pilkada.

Khusus untuk calon kepala daerah DKI Jakarta, tes narkoba akan dilakukan di Gedung BNN, kawasan Cawang, Jakarta Timur, pagi ini pukul 08.00 WIB.

"Kami sediakan waktu mulai pukul 08.00 di Laboratorium BNN. Tes meliputi urine dan rambut," kata Slamet.

Berbeda dengan daerah lain, pemeriksaan rambut dilakukan terhadap calon kepala daerah di DKI karena peralatan BNN pusat memungkinkan untuk itu.

"Dengan tes urine sebenarnya cukup, tetapi rambut ini untuk lebih meyakinkan saja. Diupayakan hasilnya bisa keluar dalam 24 jam," tandasnya.

● **bakti m munir/ant**

Jakarta Butuh Pemimpin Manusiawi

JAKARTA – Kota Jakarta bukan hanya membutuhkan pemimpin yang memiliki orientasi pada pembangunan fisik saja, tetapi juga yang bisa menyentuh manusia di dalamnya. Selain itu pembangunan jangan hanya diarahkan untuk kepentingan kelompok tertentu, tetapi masyarakat seutuhnya.

Pandangan tersebut disampaikan pengamat politik dari Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago dan sejarawan Betawi JJ Rizal untuk merespons dinamika Pilkada DKI Jakarta. Dalam pandangan mereka, kepemimpinan yang diharapkan tersebut tidak tecermin da-

lam pemerintahan saat ini.

Seperti diketahui, dalam Pilkada 2017 nanti pasangan petahana yang diusung PDIP, Partai Golkar, Partai Nas-Dem, dan Partai Hanura, yakni Basuki Tjahaja Purnama/Ahok-Djarot Saiful Hidayat, akan berhadapan dengan

Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang dijagokan Partai Gerindra dan PKS serta pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dari kubu Partai Demokrat, PKB, PAN, dan PPP.

"Bicara DKI bukan hanya soal pembangunan yang notabene adalah jembatan, mal, apartemen, waduk, dan seterusnya, tetapi tidak pernah memikirkan manusia di dalamnya, yaitu melakukan upaya bagaimana manusia dimanusiakan agar bisa sejahtera, bisa diatur, agar yang tadinya tidak tertib menjadi tertib, yang tidak teratur menjadi teratur, yang tidak indah menjadi indah," ujar Pangi, tadimalam.

Menurut dia, pemimpin Jakarta perlu memikirkan dan membentuk gagasan bagaimana orang yang tinggal di kotanya bisa bahagia dan senang. Orang dimaksud termasuk kalangan masyarakat miskin. Dalam pandangannya, kelompok ini harus diperhatikan, bukan digusur.

"Seolah-olah orang miskin sudah tidak pantas hidup di Jakarta saat ini, bagaimana kemudian logikanya upaya pengurusan digerakkan dan opini yang dibangun dalam rangka tata kota agar lebih hijau, tetapi realitasnya apartemen yang dibangun di daerah tersebut, belum lagi proyek reklamasi yang begitu hebatnya.

Ini realitas yang terjadi," ungkapnya.

JJ Rizal menilai Jakarta masih banyak yang perlu dibenahi dari berbagai sisi. Namun, sejauh ini, cita-cita Jakarta untuk menjadi kota rakyat tidak pernah jadi kenyataan karena pembangunan dikendalikan untuk sekelompok orang dan untuk kepentingan mereka, bukan masyarakat luas.

Ke Hal 15

Silakan komentari headline ini di @MNCKoranSindo dengan hashtag #PilkadaDKI2017

Jakarta Butuh Pemimpin Manusiawi

((dari Hal 1

"Saat ini kota dikendalikan oligarki dan konglomerasi kota yang dalam pembangunan hanya untuk memenuhi aristokrasi politik," paparnya.

Karena itu, dia pun mengimbau masyarakat menggunakan kesempatan untuk memilih calon yang berani bertindak agar pembajakan terhadap cita-cita kota bisa diambil dari kekuasaan konglomerasi. "Kita tidak perlu pemimpin yang punya kesantunan, yang diperlukan justru pemimpin yang punya etika menyangkut moral dan nilai hukum, apakah menghormati putusan pemerintah, hukum, dan keadilan," ungkapnya.

Sementara itu tim pemenang tiap pasangan kandidat meyakini jagoannya bisa diterima masyarakat Jakarta. Tim pemenang Ahok-Djarot, Taufik Basari, menilai pasangan yang diusungnyatelah mewakili apa yang masyarakat Jakarta inginkan. "Kita butuh calon pemimpin yang cerdas. Cerdas dalam arti punya konsep visi gagasan, jangan hanya bicara tapi juga bagaimana konsepnya dan dijalankan," ungkapnya.

Syarief dari tim pemenang

an Anies- Sandiaga juga mengatakan pasangan yang mereka usung cocok untuk kebutuhan warga Jakarta. Menurut dia, Anies dan Sandiaga punya kompetensi dan karakter yang hampir sempurna. Keduanya saling melengkapi dan sudah saling kenal. "Anies-Sandi adalah kehadiran pimpinan baru, punya bentuk *leadership* yang tangguh sebagai kunci memimpin Jakarta. Dua konsep yang ditawarkan Anies dan Sandi, *pertama* pengendalian harga kebutuhan pokok dan (*kedua*) menciptakan lapangan kerja," jelasnya.

Adapun dari tim pemenang Agus-Sylviana, Didi Irawadi Syamsudin, meyakini pasangan yang diusungnya dapat merekatkan rakyat seluruh Jakarta yang warganya terdiri atas beragam suku. Dalam pandangannya, pemimpin Jakarta yang ideal adalah pemimpin yang bisa merangkul rakyatnya, bukan hanya fokus pada pembangunan yang menguntungkan. "Bukan hanya wajah Jakarta indah, tetapi sejahtera dan kebijakan adil. Relokasi jangansampai masyarakat merasa tersingkir dan terbuang. Saya sepakat Jakarta menjadi kota budaya dengan

menegakkan taraf pendidikan masyarakatnya.

Foto Bareng-Bareng

Suhu politik di Pilkada DKI Jakarta yang sempat memanas beberapa hari belakangan, kemarin sempat mereda. Hal ini terkait dengan swafoto bersama atau wifef yang dilakukan tiga pasang kandidat yang bakal bertarung, yakni pasangan Ahok-Djarot, Agus Yudhoyono-Sylviana, dan Anies-Sandiaga, di sela tes kesehatan yang mereka lakukan di RSAL Mintohardjo Jakarta.

Foto wifef tersebut diunggah Anies dalam akun Instagram-nya. Tidak ada sama sekali terpancang keterangan di antara enam orang tersebut, apalagi suasana permusuhan. Sebaliknya mereka tersenyum berbarengan dan menunjukkan kekompakan.

"Swafoto menjelang pemeriksaan kesehatan," tulis Anies dalam akun Instagram-nya kemarin. Postingan ini kemudian menyebar luas dan sempat menjadi *trending topic*.

Agus Yudhoyono mengapresiasi foto bareng tersebut. Dia pun menunjukkan kegem-

birannya. "Kita seru banget, kita kompak kita *happy-happy*, tadi selfie juga berenam. Sama-sama, pasti suka selfie deh," kata Agus.

Ahok pun mengakui para kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur melakukan wifef. Bahkan Ahok mengakumen-*tweet* foto tersebut. Hanya saja, selain bercandaan, tidak ada persoalan serius yang mereka bincangkan, terlebih soal kontestasi pilkada. "Gak ada yang serius," ujar Ahok.

Sementara itu, tes kesehatan yang dilakukan di RSAL Mintohardjo merupakan bagian dari prasyarat yang harus dipenuhi untuk bisa ikut pilkada. Tes kesehatan melibatkan 71 dokter, tetapi hal itu tidak termasuk tes narkoba dan psikotes, karena kedua tes tersebut akan dilakukan di tempat terpisah, yakni di Kantor BNN Jakarta Timur.

Tes kesehatan sesuai jadwal dilakukan pada 07.00-17.00 WIB. Penjagaan ketat oleh anggota TNIAL dilakukan di RS tersebut. Dari pantauan KORAN SINDO, pasangan petahana, Ahok-Djarot, menjadi yang pertama datang. Selang beberapa

menit setelahnya, Ahok datang.

Selesai mendaftar, melalui lobi utama, Ahok-Djarot kemudian berfoto bersama di hadapan wartawan. Menghadapi tes ini, keduanya mengaku tidak memiliki persiapan khusus. Ahok bahkan sesumbar dirinya sejak awal telah siap menghadapi tes kesehatan. "Paling hanya puasa mulut saja," ucap Ahok singkat sebelum melakukan serangkaian tes.

Pasangan Agus Yudhoyono-Sylviana datang kemudian. Khusus kedatangan Agus sempat membuat heboh sejumlah awak media. Pasalnya, dibandingkan dengan pasangan lainnya, termasuk Anies Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno yang lebih santai, pakaian yang digunakan Agus lebih sedikit rapi. Dia mengenakan kaca mata hitam, kemeja batik merah, dan celana bahan hitam dan sepatu pantofel. Agus mengaku dirinya menggunakan kacamata hitam karena matanya lelah. "Kurang tidur *aja*," ucapnya singkat.

Pasangan Anies-Sandiaga datang paling akhir. Kedatangan Sandiaga didampingi sejumlah pimpinan DPD dan DPP Ge-

rindra, di antaranya Ketua Tim Pemenangan Partai Gerindra M Syarif dan Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik.

Pasangan Ahok-Djarot keluar dari ruang pemeriksaan pukul 13.30 WIB. Tak banyak kata yang keluar dari mulut pasangan ini, tetapi beberapa kata menyindir sempat terucap dari Gubernur DKI Jakarta ini. "Saya terbukti tidak psikopat dan gila seperti orang-orang bicarakan," ucap Ahok sesuai menjalani pemeriksaan.

Lain halnya dengan Agus-Sylviana, mereka mengaku cukup senang selesai menjalani pemeriksaan. "Alhamdulillah sehat tadi cek darah, jantung, saraf, mata, gigi, THT, dan semuanya. Mudah-mudahan kita semua sehat," kata Agus.

Sementara itu Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi DKI Jakarta Slamet Budiarto mengungkapkan pemeriksaan kesehatan ini bukan untuk mencari penyakit, tetapi untuk menentukan kesehatan. "Sekalipun sakit, tapi bila masih *diobatin* itu nggak masalah. Termasuk kondisi kejiwaannya," ucap Slamet.

● yan yusuf/mula akmal

Pilkada DKI Berpotensi Dua Putaran

JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 semakin menarik dan seru dengan kehadiran pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni. Ajang pesta demokrasi di Ibu Kota ini diprediksi berjalan dua putaran.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, dan Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Sebastian Salang mengungkapkan hal tersebut menanggapi hadirnya tiga pasangan calon di Pilkada DKI.

"Saya kira ramai, lebih ramai dan meriah daripada dugaan saya karena kemunculan dua paslon (pasangan calon) ini cukup menarik. Potensi dua putaran pasti semakin besar dengan tiga paslon karena tidak mudah menembus angka 50%+1," kata Qodari kepada **KORAN SINDO** tadi malam.

Menurut dia, kemunculan Joko Widodo (Jokowi) sebagai *rising star* di Pilkada DKI 2012 saja tidak bisa mencapai 50% sehingga harus ke putaran kedua. Ketika berjalan dua putaran, akan ada dua kubu yang menggerogoti suara petahana.

Untuk diketahui, ada tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang mendaftar ke KPU DKI Jakarta. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Agus Harimurti-Sylviana Murni, dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

Lebih jauh, Qodari menjelaskan, sosok Agus Yudhoyono pasti menarik karena di belakangnya ada sosok ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dipastikan SBY memiliki pengaruh politik karena pernah menjadi presiden dua periode. Salah satunya dukungan tiga parpol lain, yakni PKB, PPP dan PAN, kepada Agus.

"Dan karena Agus adalah anaknya, SBY akan *all out*, terlebih pencalonan Agus membuatnya meninggalkan karier militer. Kita tahu Agus sosok yang pintar dan berbakat, selalu berprestasi di sekolah maupun di militer," jelasnya.

Sementara Anies, sosoknya tidak bisa dianggap enteng karena kuat secara retorika dan pernah maju sebagai bakal calon presiden (capres).

Ke Hal 15))

Pilkada DKI Berpotensi Dua Putaran

((dari Hal 1

Anies memiliki simpatisan dan relawan dan bahkan menurut informasi dia didukung salah satu kekuatan politik di negeri ini. Lalu dia juga didukung Gerindra dan PKS. Dan dengan mesin politik PKS yang kuat, Anies akan punya daya dongkrak yang tangguh.

Karenaitu, menurut Qodari, pertarungan Pilkada DKI menjadi menarik karena ada dua figur, Anies dan Agus, yang sebelumnya tidak pernah sama sekali beredat.

Ray Rangkuti berpandangan pertarungan Pilkada DKI akan sengit karena ketiga pasangan memiliki keunggulan masing-masing. Misalnya Ahok dan Anies bisa dilihat dari figurinya, sementara Agus yang relatif baru memiliki faktor SBY, ayahnya, yang sangat dominan. "Sehingga bacaan saya, ini akan sulit selesai dalam satu putaran dan potensial masuk putaran kedua. Karena survei elektabilitas Ahok belum mencapai 50%, bahkan baru sekitar 45%," papar Ray.

Dengan demikian, lanjut Ray, persaingan ketat akan terjadi pada Anies dan Agus. Alasannya, pangsa pemilih mereka sama, yakni orang-orang yang belum memilih Ahok. *Swing voters* ini terbagi menjadi dua, yakni pemilih muslim dan pemilih dari kelas menengah ke bawah. Anies memang dikenal sebagai figur Islam yang moderat, tetapi Agus juga memiliki tiga parpol berbasis Islam di belakangnya. Dengan begitu kemungkinan pemilih Ahok akan terpecah ke Anies dan Agus. Dia mengharapkan para kandidat harus menghindari isu SARA.

Hal senada diungkapkan Sebastian Salang. "Saya membayangkan pertarungan di DKI akan jadi pertarungan luar bisa terkait gagasan dan problem. Dari tiga pasangan calon mana yang punya gagasan cemerlang dan bisa yakin masyarakat, dia mam-

pu menarik simpati publik," papar Sebastian dalam diskusi di Jakarta kemarin.

Dia menjelaskan, masyarakat DKI adalah pemilih yang cerdas dan realistis sehingga masing-masing pasangan harus bisa memberikan program-program yang bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari.

Yang menarik, saat ini analisis cenderung tidak kepada Ahok, tapi kepada dua pasangan penantang, yakni Anies-Sandiaga dan Agus-Sylviana. Pilgub DKI barometer politik nasional. Pilkada Jakarta juga bisa jadi inspirasi bagi daerah lain sehingga penting dijaga agar menjamin demokrasi sehat, fair dan memberikan harapan," katanya.

Penuh Keakraban

Tiga pasangan antusias mengikuti tes kesehatan dan narkoba selama dua hari kemarin. Cagub Anies mengatakan, dalam tes kesehatan dan narkoba yang dilakukan sejak Sabtu-Minggu (24-25/9), dia bersama dua pasangan lain saling bertemu dan sangat akrab mengikuti prosesnya. Bahkan pada Sabtu (24/9), mereka saling bertfoto selfie.

Dalam Pilkada DKI yang digelar pada 15 Februari 2017 mendatang, mereka siap menunjukkan bagaimana demokrasi yang sejuk dengan saling mendukung program. "Kami ingin tunjukkan kepada semua. Ini sebuah festival, festival gagasan dan karya. Ini arena untuk kita memilih dan harus merayakan demokrasi sebagai sebuah kegembiraan," kata Anies di RSAL Mintoharjo, Jakarta kemarin. Bersama Sandiaga, dia akan menunjukkan bagaimana mewujudkan Jakarta sebagai kota yang menyenangkan dan bersahabat.

Agus Harimurti mengakui kebersamaan dengan pasangan calon lain dalam tes kesehatan sangat akrab. Bahkan, dalam tes psikologi, mereka saling mengobrol tentang perjalanan hi-



Tiga pasang calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta mengikuti tes bebas narkoba di Kantor BNN di Jakarta, kemarin. (Dari atas), pasangan cagub-cawagub Basuki Tjahaja Purnama - Djarot Saiful Hidayat, Anies Baswedan - Sandiaga Salahuddin Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono - Sylviana Murni.

dup, karier dan isu lainnya. Sayangnya Agus belum mau banyak berkomentar mengenai masalah Jakarta. "Nanti saja ya bicara masalah substansi," ujarnya.

Cagub petahana Ahok me-

nuturkan, tes kesehatan dan narkoba yang dilakukan dalam dua hari kemarin tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukannya pada Pilkada DKI 2012. Dia pun optimistis lolos tes tersebut. "Kita hanya menajam-

kan program visi-misi Pak Joko Widodo (Jokowi) 2012 lalu. Yang penting otak, perut dan dompet warga DKI penuh," ungkap Ahok.

Sama-sama Optimistis

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan partainya akan mengerahkan semua jajaran pengurus serta seluruh kader untuk kampanye pemenangan di Pilkada DKI. Termasuk Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno putri juga akan terjun langsung untuk mengampanyekan pemenangan Ahok-Djarot. Namun untuk kader PDIP yang menjadi menteri dipastikan tidak akan ikut kampanye karena sesuai dengan arahan Presiden Jokowi semua menteri yang diminta fokus bekerja.

Adapun Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengaku optimistis bahwa pasangan Anies-Sandiaga bisa mengalahkan Ahok. Karena dalam survei yang dilakukan oleh Partai Gerindra, terdapat 60% pemilih yang tidak menginginkan Ahok lagi sebagai Gubernur DKI. Dan saat ini suara itu dipersebutkan oleh Anies dan Agus. "Kita lihat, Anies dengan Sandiaga lebih berpeluang mendapatkan *swing voters* itu daripada Agus-Sylvi," kata Riza.

Disisilain, Ketua Dewan Harian DPP Partai Demokrat Syarif Hasan meyakini bahwa pasangan Agus-Sylviana bisa memenangkan Pilkada DKI. Karena Agus dan Sylviana merupakan pasangan ideal yang menggabungkan kombinasi antara kecerdasan, ketegasan Agus serta pengalaman di birokrasi yang dimiliki oleh Sylviana.

"Intelektual keduanya juga mendukung dan saling mengisi, ditambah kesantunan dan kepemimpinan Agus. Sehingga kita yakin bisa menang," kata Syarif.

● bima setiyadi/
kiswondari/
rahmat sahid/okezono

Hindari Saling Hujat di Pilkada

JAKARTA—Sejumlah kalangan berharap para kontestan Pilkada DKI Jakarta 2017, tim sukses, dan para pendukungnya tidak saling hujat. Sebaliknya mereka hendaknya mengedepankan adu program untuk membangun ibu kota negara ini menjadi lebih baik.

Harapan yang disampaikan pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Idil Akbar dan pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio tersebut terkait dengan meningkatnya tensi persaingan antarkubu, bahkan beberapa di antaranya sudah menjurus pada sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Mereka pun mengingatkan, kampanye saling hujat bukan hanya merusak norma demokrasi, tetapi juga merugikan diri sendiri. "Kampanye

berbau SARA sangat tidak layak dan merusak demokrasi kita," ujar Idil Akbar saat dihubungi KORAN SINDO tadi malam.

Dia melihat tingginya tensi Pilkada DKI memang sulit dihindari. Hal itu menunjukkan bahwa para pasangan kandidat dan kekuatan di belakangnya memiliki keinginan kuat menguasai Ibu Kota. Selain merupakan barometer tertinggi pilkada di Indonesia, Pilkada DKI juga merupakan pintu masuk menguasai Indonesia.

Kendati demikian, seharusnya tiap pasangan kandidat dan para pendukung bisa saling menahan diri dan positif dalam berkampanye. Mereka lebih baik menyampaikan kebijakan yang akan dilaksanakan, program penting, pokok-pokok strategis yang bisa menyelesaikan kompleksitas masalah di Jakarta. "Kalau bisa mengungkapkan itu dengan baik, akan lebih positif untuk meraup suara masyarakat," paparnya.

Idil meyakini masyarakat Ibu Kota lebih tertarik pada program pembenahan kondisi fisik Jakarta, baik itu masalah permukiman, banjir maupun kemacetan.

Silakan komentar headline ini di @MNCNkoranSindo dengan hashtag #PilkadaDKI2017

"Ini hal strategis yang perlu disampaikan dan akan banyak didengar masyarakat Jakarta," sebutnya.

Senada, Hendri Satrio menilai upaya kampanye dengan saling hujat dan mengedepankan isu SARA tidak akan membawa manfaat signifikan untuk memenangi pilkada. Sebaliknya langkah tersebut hanya akan memunculkan keributan dan berujung anarkisme.

Menurutnya, hal paling penting dalam berkampanye untuk masyarakat DKI Jakarta adalah adu visi misi dan program unggulan para pasangan calon untuk masyarakatnya. "Kampanye isu SARA tidak perlu dilakukan karena pengaruhnya kurang dari 30% terhadap isu itu, tapi 70% lainnya lebih melihat program dan visi-misi perpasangan calon," ucapnya.

Dalam pandangannya, masyarakat

Jakarta sudah cerdas dalam mengelola informasi. Atas dasar itu mereka lebih memilih untuk mendapat dan meraih informasi dari media konvensional ketimbang media sosial (medsos). "Ini hal positif, medsos tidak terlalu diperhatikan dan kurang berdaya, ini juga baik agar para buzzer tidak terlalu terlibat dan merusak demokrasi di Indonesia," paparnya.

Ke Hal 15



Ikuti berita terkait di www.sindonews.com

Hindari Saling Hujat di Pilkada

((dari Hal 1

Berdasar survei yang dilakukan Hendri di Kedaikopi.co, masyarakat DKI lebih tertarik pada isu dan program di bidang ekonomi, terutama soal harga bahan pokok dan ketersediaan lapangan kerja. Baru kemudian isu pembangunan, pendidikan, reformasi birokrasi. Isu kemacetan dan banjir masih ada, tapi tidak sebesar isu ekonomi. Blusukan juga masih diminati masyarakat," ungkapnya.

Masyarakat DKI, menurut Hendri, merupakan tipikal masyarakat yang unik, yaitu mayoritas pilihan politik mereka dilakukan atas pertimbangan sendiri. Maka butuh usaha lebih keras dari para calon untuk menarik hati masyarakat Jakarta. "Blusukan perlu dipakai biar mereka tahu langsung siapa calonnya," ujar dia.

Sebelumnya Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsudin saat menghadiri *dies natalis* ke-58 Universitas Muhammadiyah Surakarta (24/9) mengungkapkan keprihatinannya atas dinamika politik menghadapi Pilkada DKI 2017. Din melihat ada gejala yang muncul dilapis akar rumput yang menjurus pada sentimen SARA dan sudah pada level ekstrem. "Saya simbolkan bara api yang jika dibiarkan terus menyala akan tidak mudah untuk dipadamkan," kata Din.

Dia pun secara khusus meminta pasangan calon tidak saling hujat dan menjatuhkan dengan menggunakan isu SARA dan menjaga perkataan serta ucapannya. Begitu pula terhadap partai pengusung serta pemilih modal agar tidak mengompromi para pihak sehingga dapat menghindari konflik sesama anak bangsa. "Jangan arogan, jangan merasa superior, absolut, jangan mengompromi, hindari ketegangan verbal, sebab kalau muncul reaksi, saya khawatir Polri, TNI pun tak bisa mengatasi" katanya.

Di sisi lain dia berharap tokoh bangsa, negarawan bisa bahu-membahu turun gunung meredakan kondisi tersebut. Termasuk juga Presiden yang harus bisa menjadi penengah, jangan sampai terjadi perpecahan. Jangan sampai ada diktator mayoritas dan jangan sampai ada tirani minoritas,"



Cawagub DKI Jakarta Sylviana Murni (tengah) menghadiri deklarasi dukungan dari partai non-parlemen yang tergabung dalam koalisi Bhinneka Tunggal Ika di Jakarta, kemarin.

kata Din. Pilkada DKI diikuti tiga pasang calon. Petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dengan dukungan PDIP, Partai Golkar, Partai NasDem, dan Partai Hanura. Mereka bakal berhadapan dengan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni yang dijagokan Partai Demokrat, PKB, PPP, dan PAN serta pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang diusung Partai Gerindra dan PKS.

Perkuat Dukungan

Pasangan tersebut langsung bekerja keras untuk meraih dukungan. Kemarin pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni berhasil mendapatkan dukungan dari sembilan partai politik non-parlemen. Dukungan melalui surat tertulis tersebut disampaikan di posko pemenangan Agus-Sylviana yang berada di Wisma Proklamasi 41, Jakarta Pusat, kemarin.

Kesembilan partai politik non-parlemen yang menyatakan dukungannya itu ialah, Partai Matahari Bangsa, Partai Pakar Pangan, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Persaudaraan Demokrasi Indonesia, Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nasional Umat, Partai Pelopor, Partai Barisan Nasional dan Partai Pribumi.

Surat dukungan tersebut diterima langsung oleh Sylviana Murni dan disaksikan empat

perwakilan partai pendukung utama yakni Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli, Ketua DPD PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo, Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas, dan Ketua DPW PPP Abdul Azis.

"Dukungan dari seluruh keluarga besar Koalisi Bhinneka Tunggal Ika dengan resmi saya menyatakan diterima," ujar Sylviana. Menurut dia, dengan semangat kebersamaan demi rakyat, dirinya bersama Agus Yudhoyono akan memenangi Pilgub DKI 2017.

Ketua DPD DKI Demokrat Nachrowi Ramli menilai dukungan tersebut menunjukkan dukungan warga DKI kepada dua pasangan yang diusung oleh empat partai. Menurut dia, dengan *tagline* Jakarta untuk rakyat, wujud dari janji Agus-Sylviana akan dirasakan oleh masyarakat. "Ini pertanda banyak warga masyarakat yang setuju. *Tagline* Jakarta untuk rakyat adalah janji ikhlas dari pasangan ini," sebutnya.

Ketua Koalisi Bhinneka Tunggal Ika dari Partai Matahari Bangsa Arif Rahman menjelaskan, dukungan bagi Agus-Sylviana diberikan setelah kesembilan partai melakukan rapat pleno secara bersama-sama pada 23 September 2016. "Kami telah menyepakati berdasarkan pertimbangan kami dan kami mempelajari secara mendalam tiga pasang kandidat yang telah mendaftar ke KPU,

maka untuk kemashlahatan warga Jakarta kami menyatakan mendukung Mas Agus dan Mpok Sylviana," tutur Arif.

Arif menekankan pernyataan dukungan tersebut dilakukan untuk memperjelas dan mempertegas dukungan yang diberikan. Seluruh pengurus partai Koalisi Bhinneka Tunggal Ika mengimbau kader serta organisasi sayap partai di Jakarta secara bersama-sama dapat memenangi pasangan Agus-Sylviana dalam Pilkada DKI 2017.

Adapun pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno mendeklarasikan Roemah Joeang di Jalan Brawijaya IX No 1, Jakarta Selatan, tadi malam. Acara tersebut dihadiri Sandiaga dan 73 anggota serta relawan Sandi Uno dari Fraksi Partai Gerindra DPR.

Sekretaris Fraksi Gerindra, Fary Djemi Francis mengatakan 73 anggota fraksi dan 511 tenaga ahli (TA) dan asisten pribadi (aspri) siap turun tangan. Semua berkomitmen untuk memenangi pasangan tersebut. "Ini adalah pekerjaan besar dan kita menyadari dan siap berkorban untuk memenangi Anies-Sandi," kata Francis.

Dia mengatakan dalam Roemah Joeang sudah dibentuk tim pemenangan. Tim dikomandani oleh Pius Lustrilang, didukung oleh anggota fraksi dari Dapil Jakarta Aryo Djohadikusumo, Biem Benyamin, dan Asril Hamzah

Tandjung. Selain itu ditunjuk sebagai ketua *advisor* yang juga Waketum Gerindra Sumi Dasco Ahma dan tim strategis kerja perundang-undangan Ahmad Reza Patria.

Reza Patria pun menyampaikan deklarasi kemenangan yang dibacakan oleh seluruh fraksi dan TA serta aspri yang hadir. Mereka siap mendukung dan siap memenangi pasangan Anies-Sandi, sebagai gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI 2017.

Pada hari yang sama Sylviana dan Sandiaga Uno mendampingi Balai Kota DKI Jakarta untuk menghadiri penghargaan jurnalistik MH. Thamrin yang diadakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Dalam momen tersebut keduanya menyindir calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kerap marah ketika menerima kritik media. Sylviana menilai kritik media sangat positif karena bisa menjadi bahan evaluasi. Mantan None Jakarta 1981 itu pun memandang media sebagai tempat untuk mengedukasi masyarakat. Terpenting sesuai aturan dan kaidah jurnalistik yang berlaku. "Saya setiap hari senang dikritik. Justu kalau dikritik itu ini ada hal yang perlu saya evaluasi. Tapi kalau itu gak sesuai aturan pasti saya marah, tapi marahnya saya santun," kata Sylviana.

Sandiaga menuturkan bila peranan media akan menjadi sangat sentral lantaran media mendukung dari segi kegiatan pemberitaan yang apa adanya dan bukan hanya membangun opini. Menurutnya, pemberitaan media yang apa adanya itu membuat progra-program dapat berpikah pada rakyat. Dengan begitu, lanjut Sandi, Pemprov DKI seharusnya dapat menjadikan pemberitaan media yang sifatnya kritik sebagai bahan evaluasi.

"Kritik media merupakan bentuk kebebasan dan kemerdekaan. Kalau rakyat itu bahu-bahu yang pasti akan diapresiasi. Itu merupakan kontrol, ke depannya mungkin kita harus bisa melihat membangun di DKI ini harus terbuka. Kalau kritiknya bagus ya harus kita apresiasi," jelasnya.

● bima setyadi/mula akmal/ant

Parpol Pendukung Ahok-Djarot Berebut Ketua Tim Pemenangan

JAKARTA – Internal parpol pendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat bergolak. Hal terkait dengan perebutan siapa menjadi ketua tim pemenang pasangan tersebut. Posisi ketua tim yang saat ini dipegang kader Partai Golkar Nurson Wahid pun terancam. Hal ini bahkan disampaikan Ahok sendiri. Menurut dia, posisi Nurson bisa diganti Sekretaris DPD PDI Perjuangan Prasetyo Edi Marsudi. Sebelumnya, mantan ketua umum GP Ansor tersebut ditunjuk sebagai tim atas kesepakatan tiga parpol yang sejak awal mendukung Ahok, yakni Partai Golkar, Partai NasDem, dan Partai Hanura. "Si Prasetyo (ketua DPRD DKI Jakarta) juga bersedia, gampanglah," kata Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, kemarin. Djarot juga memastikan ketua tim pemenang Ahok-Djarot akan diisi oleh kader dari PDIP. Pasalnya, PDIP memiliki 28 kursi di DPRD DKI Jakarta,

atauterbanyakdariketigaparpol pendukung lainnya. "Kemarin sudah sampaikan kepada Mas Nusron, kepada teman-teman, bahwa nanti akan dipimpin dan diketuai oleh kader PDIP," ungkapnya. Ketua DPD Partai Golkar Fayakun Andriadi, yang mendampingi Ahok di Pulau Pramuka, menegaskan bahwa ketua tim tetap dipegang tiga parpol yang mendukung Ahok sebelumnya. Menurutnya, apabila PDIP tidak mau bergabung dengan tiga partai pengusung Ahok sebelumnya, diampersilakan partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tersebut membentuk tim pemenang dan rumah pemenangan sendiri. Dia pun menegaskan Partai Golkar, Partai Hanura, dan Partai NasDem tetap kompak bersatu dalam satu tim pemenang yang sama. Tim pemenang, juga berkantor di Rumah Lembang, kantor yang diresmikan pada 25 Agustus

2016. "Kalaupembentukan (tim pemenang) baru di rumah baru, yasilakan. Tapi tetap, kami kalau ngumpul di Rumah Lembang," ungkapnya. Prasetyo Edi Marsudi saat dihubungi mengaku akan menghubungi Ahok untuk mengonfirmasi pernyataan soal penunjukannya sebagai ketua Tim Pemenangan Ahok-Djarot. Menurutnya, selama ini dirinya memang kerap mendengar terkait rencana pengusung dirinya sebagai ketua tim pemenang internal Ahok-Djarot. Namun, dirinya hanya beracuan pada arahan resmi dari pengurus partai. "Pernah (ada yang) ngomong. Tapi harus dirapatkan dulu dengan empat parpol pendukung Ahok-Djarot. Harus lapor ke DPP partai (PDIP) koordinasi semua, supaya satu suara," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta ini. Tim pemenang dari pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno tampaknya juga belum bulat. Saat deklarasi dan

tes kesehatan, cawagub Sandiaga Uno berkali-kali menyebut kader PKS, Mardani Ali, sebagai ketua tim pemenang. Tapi dari pihak Gerindra, belum sepenuhnya menerima keputusan tersebut. Rencananya Rabu ini (28/9), Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik akan mengumpulkan seluruh kader Partai Gerindra dari pemilihan DKI Jakarta di kediaman mantan Ketua DPD PDI Perjuangan Boy Sadikin. Rencananya mereka akan membahas tim kampanye yang akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, termasuk pemilihan ketua tim kampanye tersebut. "Pak Boykan sudah mundur dari PDI Perjuangan. Pertemuan di rumahnya untuk membentuk tim, beliau pasti masuk dalam tim," pungkasnya. Sementara dari pasangan Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni, sampai saat ini juga belum memutuskan siapa ketua tim pemenang. Hingga

kemarin belum ada konfirmasi mengapa mereka belum juga memutuskan tim kampanye. Untuk diketahui, selain Partai Demokrat, Agus-Sylviana juga didukung PKB, PAN, dan PPP. Pengamat politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai perebutan ketua tim pemenang bisa menjadi bumerang bagi para pasangan calon untuk memenangkan pilkada. Dia pun meminta agar koalisi partai politik pengusung pasangan calon duduk satu meja dan membuat kolektif kolejal atau keputusan diambil secara musyawarah. "Ketua tim hanya menjadi juru bicara. Hal itu bertujuan agar tidak terjadi perebutan," katanya. Dalam pandangan Emrus, peranan ketua tim pemenang sebenarnya tidak berpengaruh besar terhadap kemenangan pasangan calon. Ketua tim pemenang hanya berfungsi untuk manajemen pemasukan dan pengeluaran keuangan. "Penentu kemenangan adalah

sosok pasangan calon dan program-programnya. Ketua tim pemenang hanya mengatur keuangan. Biasanya dia pintar melobi berbagai pihak yang berkepentingan, dalam hal ini para pengusaha," jelasnya. **Istana Tegaskan Netral** Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjamin tidak memberikan dukungan kepada salah satu calon dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 nanti. Bagi Presiden, kepentingannya adalah pelaksanaan pilkada, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di daerah lain berlangsung secara baik, demokratis, jujur dan adil, serta aman. "Presiden selalu sampaikan bahwa presiden netral, berdiri di semua paslon (pasangan calon). Jadi, presiden mendukung pilkada yang jujur, adil, dan demokratis," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Penegasan tersebut disampaikan Istana, sekaligus untuk menepis opini yang berkembang di publik yang menyebutkan Presiden Jokowi tidak mendukung pencalonan Anies Baswedan oleh Partai Gerindra dan PKS. "Kita, sikap presiden siapa pun termasuk pada Anies Baswedan, itu adalah hak Anies Baswedan untuk mengikuti pilkada, di mana pun, mau dari partai apa pun yang dia ingin usung, itu sepenuhnya hak Anies Baswedan," tegasnya. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo juga menjamin netralitas TNI dari perhelatan pemilihan gubernur DKI Jakarta. "Saya menjamin TNI tetap netral," ujar Gatot kepada wartawan di sela acara ziarah di makam Proklamator RI Soekarno di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, 27 September 2016. **• bima setyadi/rahmat sahid/solichan arif**

DKI Butuh Pemimpin Seperti Ali Sadikin

JAKARTA – DKI Jakarta membutuhkan sosok pemimpin yang tidak hanya berani dan tegas, namun juga memiliki keberpihakan kepada rakyat kecil. Jakarta pernah memiliki pemimpin dengan kualitas seperti itu, yakni ketika dipimpin gubernur Ali Sadikin. Karakter seperti Ali Sadikin ini sangat diharapkan akan lahir melalui Pilkada DKI Jakarta yang akan digelar pada 15 Februari 2016.

"Saya melihat keberanian, ketegasan, dan keberpihakan Ali Sadikin kepada rakyat. Satu hal lagi yang menonjol, Ali Sadikin tidak ada main dengan pengembang," ujar anggota DPD asal daerah pemilihan DKI Jakarta AM Fatwa pada diskusi yang digelar di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, kemarin.

Fatwa yang pernah menjadi asisten pribadi Ali Sadikin ini mengatakan, dia cukup dekat dengan sang gubernur legendaris tersebut, termasuk pernah menjadi penasihat politik dan penasihat agamanya. Namun, selama periode bersama Ali Sadikin itu, dia melihat tidak pernah ada permainan yang dilakukan sang gubernur dengan konglomerat, termasuk kalangan pengembang. Sebaliknya, Ali Sadikin yang

akrab disapa Bang Ali, justru berani menindak tegas mereka jika ada pelanggaran.

Ketegasan Bang Ali yang merupakan purnawirawan TNI AL berpangkat letnan jenderal dalam membangun Jakarta, kata Fatwa, terlihat dari kebijakannya melebarkan Jalan Gunung Sahari. Bang Ali waktu itu berani memerintahkan agar markas Armada Pangkalan Barat (Armabar) TNI AL dipangkas demi pelebaran jalan. "Mabes TNI Angkatan Laut itu yang lebih dahulu dia potong, alamatnya sendiri," cerita Fatwa.

Calon wakil gubernur DKI Sandiaga Uno yang juga jadi pembicara diskusi menegaskan, dirinya berkomitmen membangun Jakarta agar lebih baik lagi. Dia mengaku warga Jakarta kini mendambakan hadirnya pemimpin yang bisa membawa perubahan ke arah lebih baik. "Saya sudah berkeliling dan mereka (masyarakat) mengaku merindukan pemimpin baru," ujarnya.

Adapun politikus Partai Hanura Dadang Rusdiana mengklaim kandidat yang diusung partainya, yakni petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sama tegas dengan

Ali Sadikin dalam membangun Ibu Kota.

"Kita butuh sosok yang mampu melakukan langkah-langkah nyata, walaupun kontroversial," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPWPAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo atau yang dikenal sebagai Eko Patrio menceritakan dinamika pencalonan di partainya, sebelum akhirnya memutuskan mendukung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono - Sylviana Murni untuk Pilkada DKI Jakarta.

Keputusan mendukung Agus-Sylviana diakuinya tidak melalui proses instan seperti banyak diduga orang, tetapi melalui rapat yang dilakukan berkali-kali. "Tidak mudah,

karena awalnya kami salah satu partai yang menandatangani petisi untuk membawa Risma ke Jakarta," ujarnya.

● **helmi syarif**



...

...

M. Ke (K sai pe bu dir pe ha bit dis

pit M: Kc Se du ne t

M:

Tiga Pasangan Calon Siap Adu Strategi

JAKARTA – Tiga pasangan calon siap bersaing dan adu strategi untuk memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Strategi ini dimantapkan oleh tim kampanye pemenang yang dibentuk oleh koalisi parpol pengusung pasangan calon.

Tim kampanye ini akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta pada Selasa (4/10). Tim kampanye calon gubernur Anies Baswedan-wakil gubernur Sandiaga Uno diketuai Mardani Alidari kader PKS. Sementara mantan Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Boy Sadikin sebagai ketua pemenangan relawan. Diketahui Anies-Sandiaga diusung Partai Gerindra dan PKS.

Boy mengatakan, pihaknya akan membahas secara khusus

strategi pemenangan dengan tim kampanye. Harapannya, upaya untuk memenangkan Anies-Sandiaga akan sinergis. "Tim kampanye dan tim relawan harus solid. Relawan harus saya data dulu termasuk kader PDIP yang ingin bergabung sedikitnya ada 5-10 kelompok," ujar anak mantan gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin ini.

Menurut dia, pembentukan tim relawan harus lebih dari satu orang dan paham medan di manadiakan bertugas. Terpenting

relawan sudah mengakar di wilayah. Dia juga akan menyusun program kerjanya ke depan. "Kalau strategi harus bersinergi dengan tim kampanye jadi partai jalan. Jadi enggak mungkin partai jalan ke mana relawan jalan kemana," ucapnya.

Untuk memenangkan pasangan Anies-Sandiaga, puluhan kader Partai Gerindra yang berada di Fraksi Gerindra DPR turun tangan. Mereka mendirikan Roemah Joeang di Jalan Brawijaya IX, Jakarta Selatan, kemarin.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Fary Djemi Francis mengatakan, 73 anggota fraksi dan 511 tenaga ahli (TA) dan asisten pribadi berkomitmen untuk memenangkan pasangan tersebut. "Ini adalah pekerjaan besar dan kita menyadari serta siap berkorban untuk memenangkan Anies-Sandi," ucapnya.

Kemarin empat partai peng-

"Tim kampanye pasti akan menyasar ormas muslim seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dengan cara mengamankan basis pemilih dari PKB, PAN, dan PPP."

NACHROWI RAMLI
Ketua DPW Partai Demokrat
DKI Jakarta

usung pasangan cagub Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-cawagub Djarot Saiful Hidayat resmi mengusung Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Prasetyo

Edi Marsudi sebagai ketua tim kampanye menggantikan Nusrin Wahid yang merupakan kader Partai Golkar.

"Alasannya beliau pemain dan berpengalaman di Jakarta. Dia punya track record panjang pada konsolidasi politik dan pemilu. Jokowi-Ahok 2012, Pemilu Legislatif 2014, serta Pemilihan Presiden," ujar Nusrin di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.

Setelah dipilihnya Prasetyo, dia bertugas menjadi komandan di Jakarta bersama Djarot Saiful Hidayat. Selain itu, Nusrin juga bertugas mengendalikan semua Pilkada serentak se-Jawa dan Sumatera yang calon-calonnya dari Partai Golkar. "Kalau perlu, satu kelurahan satu posko untuk memudahkan penyampaian informasi," katanya.

Prasetyo mengaku siap memenangkan Ahok-Djarot. Me-

nurutnya, DKI sebagai barometer pilkada daerah lain harus memiliki strategi yang mengedepankan gotong-royong dari empat parpol, yakni PDIP, Partai Golkar, NasDem, dan Hanura. Sayangnya dia tidak menyebutkan strategi pemenangan lebih detail dengan alasan takut dibaca tim lawan.

"Kami akan buat struktur dulu. Enggak usah banyak-banyak. 50 orang cukup. Untuk dana kampanye banyak cara. Kita tinggal berkolaborasi dengan 4 parpol kayak dulu kita beli baju kotak-kotak Rp45.000 satu baju dijual relawan bisa punya rezeki, waktu jadi benda-hara seperti itu untuk timses Jokowi-Ahok," jelasnya.

Koalisi gabungan dari empat partai PKB, PPP, Partai Demokrat, dan PAN saat ini juga sudah memiliki ketua tim kampanye yakni Ketua DPW Partai

Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli. Senada dengan Hanura yang enggan membuka biaya kampanye, dia menyebut bila koalisi ini akan mengandalkan sosok Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cagub dengan wakilnya Sylviana Murni.

Nachrowi menilai Agus memiliki modal sosial sebagai anak dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nama Agus tak kalah tenar dibandingkan petahana. Adapun Sylviana sebagai keturunannya Betawi asli dianggap mampu meraup suara dari pemilih asli Betawi dan menyasar pemilih muda. Untuk pemulasekitar 30% dan memilih perempuan sekitar 56%. "Tim kampanye pasti akan menyasar ormas muslim seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dengan cara mengamankan basis pemilih dari PKB, PAN, dan PPP," ungkapnya.

● bima setiyadi

Calon Gubernur DKI Mulai Bergerilya

Agus Lari Pagi di Senayan, Anies Sapa Warga Tanah Merah

JAKARTA – Calon gubernur (cagub) DKI Jakarta mulai bergerilya. Agus Harimurti Yudhoyono menyapa masyarakat saat lari pagi pada ajang *Car Free Day* (CFD) di Senayan, Jakarta Pusat, kemarin. Sementara cagub lain, Anies Baswedan mengunjungi warga Tanah Merah, Jakarta Utara.

Kehadiran Agus pada *Car Free Day* memang mengundang perhatian warga. Mereka berupaya mendekat, mengajak bersalaman, dan berfoto bersama. Apalagi suami Annisa Pohan itu didampingi ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga mantan presiden beserta sang ibu Ani Yudhoyono.

Agus mengaku dulu sering

melakukan lari pagi pada *Car Free Day*. "Tapi, karena kesibukan jabatan di komandan batalion ketika itu, jadi kurang," katanya kemarin. Lari pagi ini tak semata dilakukan untuk kampanye. "Lari olahraga paling murah meriah, bisa dilakukan di mana saja, bisa juga beramai-ramai," tambahnya.

Dari Senayan, Agus dan se-

luarga menuju Sarinah. Mereka menghadiri peringatan Hari Batik Nasional bersama 1.000 pramuka. Pendamping Agus pada Pilkada DKI 2017, Sylviana Murni, sudah menunggu. Sylviana juga dikenal sebagai ketua Kwartir Pramuka Se-DKI Jakarta.

Menurut Agus, dirinya dan Sylviana memilih memperkuat dukungan dengan membentuk relawan-relawan untuk menarik simpatisan masyarakat DKI salah satunya mendeklarasikan relawan seperti Karib Agus. "Semakin banyak relawan yang bermunculan semakin kuat dukungan. Terpenting para pendukung tidak melakukan *black campaign*. Pada saatnya nanti kita akan menjabarkan visi dan misi," ucap Agus. Pasangan Agus-Syl-

"Semakin banyak relawan yang bermunculan semakin kuat dukungan. Terpenting para pendukung tidak melakukan black campaign. Pada saatnya nanti kita akan menjabarkan visi dan misi."

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO
Cagub DKI Jakarta

viana ini diusung Partai Demokrat, PPP, PKB, dan PAN.

Pendekatan dengan masyarakat juga dilakukan cagub Anies Baswedan. Kemarin mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu bertatap muka dengan warga Tanah Merah, Jakarta Utara, untuk mendengarkan aspirasi mereka. "Saya ingin dekat dengan warga dan menghormatinya. Teman-teman di sini punya ancaman pengurusan. Mereka sempat bolak-balik tanpa kepastian, sempati digusur, tapi tidak jadi," kata Anies.

Anies saat itu tidak didampingi calon wakil gubernur (cawagub) Sandiaga Uno. Sandiaga tengah meramaikan acara *Car Free Day* di Sudirman-MH

Thamrin. Pengusaha yang memiliki hobi lari itu berusaha menyelesaikan nazarnya untuk berlari di lima wilayah DKI Jakarta dengan mengelilingi Jakarta Pusat terlebih dahulu sebelum berlari di empat wilayah lain.

Dia mengungkapkan strateginya bila dirinya dan Anies terpilih memimpin Jakarta periode 2017-2022, dirinya akan fokus pada bidang ekonomi dan infrastruktur. Sedangkan Anies akan menangani masalah institusi dan kemanusiaan.

Di bidang ekonomi, pasangan Anies-Sandiaga akan membuat pusat-pusat kewirausahaan di 44 kecamatan. Sandiaga juga akan membidik 200.000 pengusaha baru di bidang teknologi, bisnis manajemen, dan

pengelolaan sampah. Untuk stabilitas harga, dia berencana menyederhanakan rantai distribusi melalui kerja sama dengan BUMD, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan dalam negeri dan luar negeri.

Di tempat terpisah, cawagub DKI Djarot Saiful Hidayat mengatakan, sebagai petahana dirinya bersama cagub Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hanya fokus kerja menuntaskan masa jabatan hingga Oktober 2017. "Tidak adalangkah pemenangan kecuali kita fokus kerja. *Inget loh* ya kita *incumbent* kerja sampai Oktober 2017. Jadi kita tidak terpengaruh strategi siapa. Pokoknya kerja mengalir saja, nikmat dengan gembira," ucap Djarot.

● bima setiyadi

:: PILKADA DKI JAKARTA

Dikritik Anies soal Sungai, Ahok Emosi

JAKARTA - Petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) gerah mendapatkan kritikan dari pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) pesaingnya. Cagub DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, sungai di Jakarta yang kini bersih merupakan program gubernur sebelumnya, Fauzi Bowo (Foke) pada 2009, itu terkait proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) yang memang gagasan Foke.

Menurut dia, gagasan tersebut memang baru bisa dimulai pada Maret 2012 setelah pemerintah pusat menerbitkan dua peraturan pemerintah baru terkait pinjaman Bank Dunia. *Groundbreaking* proyek JEDI dimulai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pada 2013. Saat itu Jokowi mengakui bahwa program JEDI yang dia resmikan adalah program lama yang sempat berputar-putar.

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu menegaskan tidak ada maksud untuk mengecilkan peran Ahok, Foke, serta Jokowi. Dia beralasan bahwa pernyataan tersebut hanya sebagai penjelasan pentingnya pembangunan berkesinambungan antargubernur demi keuntungan masyarakat Jakarta.



Cagub Anies Baswedan (kanan) dan cawagub Sandiaga Uno (kiri) menjawab pertanyaan wartawan sehubungan menyerahkan LHKPN di gedung KPK, Jakarta, beberapa waktu lalu. Pasangan ini mengkritik Ahok soal penataan sungai dan *tax amnesty*.

Sayangnya pernyataan Anies ditanggapi emosional oleh Ahok. Ahok menilai Anies tidak mengerti dan salah mengambil data perihal proyek JEDI yang membuat sungai bersih. Menurutnya, normalisasi sungai itu merupakan gagasan saat kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan ditandatangani saat kepemimpinan Foke.

Mantan bupati Belitung Timur itu juga menegaskan sungai bersih di Jakarta bukan karena program JEDI, melainkan dirinya yang memiliki sistem pe-

mantauan sungai dan membuat petugas pemantau badan air, termasuk petugas prasarana dan sarana umum (PPSU). "Jakarta itu enggak butuh program, enggak butuh teori-teori, kita harus eksekusi, kita harus tindakan nyata," ujar Ahok.

Kekesalan Ahok juga dilon-tarkan kepada cawagub Sandiaga Uno saat ditantang untuk membuktikan harta terbalik. Menurutnya, pejabat publik itu wajib lapor harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) agar harta yang dilaporkan dan gaya hidupnya sesuai. Apabila

tidak maka penegak hukum wajib menyelidikinya. "Di situ-lah Pak Sandiaga melapor *tax amnesty*, dia mengakui banyak pajak yang belum dia bayar pernah *kececer*," ucapnya.

Sandiaga menyayangkan sikap Ahok yang tidak melampirkan data dengan menuduhnya pengemplang pajak. Dia mengikut *tax amnesty* bukanlah niatan tidak membayar pajak, melainkan kebijakan pemerintah kepada setiap masyarakat untuk memberikan sumbang-sih kepada negara.

● bima setiyadi

Elektabilitas Ahok-Djarot Terus Merosot

PERSAINGAN MEMANAS

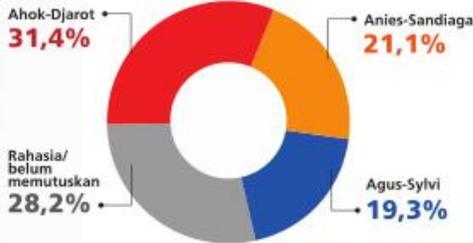
Persaingan memperebutkan kursi Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 makin sengit. Berdasarkan hasil survei LSI, calon petahana Ahok-Djarot tak lagi dominan. Elektabilitasnya terus merosot, sementara dukungan untuk dua pasang kandidat lain semakin menguat.



- Survei : Lingkaran Survei Indonesia
- Sampel : 440 responden
- Waktu : 28 Sept-2 Okt 2016
- Metode : Multi-stage random sampling
- Margin of error : + 4,8%
- Tingkat kepercayaan : 95%

Sumber: LSI

ELEKTABILITAS CALON DI PILKADA DKI



PETA DUKUNGAN



PAMOR AHOK MEREDUP



4 Faktor Pemicu Elektabilitas Turun

1. **Isu kebijakan publik**
Pengurusan, reklamasi pantai Jakarta
2. **Isu Personality**
Karakter dinilai kasar dan suka memaki di depan publik.
3. **Isu Primordial**
Sentimen agama
4. **Kehadiran pesaing yang lebih segar**
Muncul Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono



AHOK-DJAROT

Parpol Pengusung



ANIES-SANDIAGA



AGUS-SYLVI

FOTO FOTO: DOK/HERMANSO

JAKARTA – Elektabilitas pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat terus merosot. Fakta tersebut berdasarkan hasil riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI).

Pada Maret 2016, keterpilihan pasangan petahana tersebut di angka 59,3%. Namun pada survei selanjutnya terus menunjukkan penurunan yang tajam, yakni 49,1% (Juli), dan hanya 31,4% (Oktober).

Pasangan pesaing, Anies Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni masing-masing mendapatkan 21,1% dan 19,3%, sedangkan 28,2% responden belum menentukan pilihan.

Peneliti LSI Adjie Afaraby menjelaskan, ada beberapa faktor yang menyebabkan calon yang diusung oleh PDIP, Partai Golkar, Partai NasDem, dan

Partai Hanura tersebut kehilangan simpati dari masyarakat. Salah satunya terkait sikapnya yang kerap bersitegang dengan warga, khususnya saat melakukan penertiban kawasan.

"Dan di lain pihak, warga memandang Ahok lebih pro ke kelompok atas dalam hal pengurusan dan reklamasi, maupun Sumber Waras," ujar Adjie saat memaparkan hasil kajiannya di Kantor LSI, Jalan Pemuda, Jakarta, kemarin.

Isu kepribadian juga menjadi pemicu. Menurut dia, karakter Ahok yang kerap mempertontonkan kekerasan, congkak, dan tidak konsisten membuat dukungan kepadanya berkurang. Pada

saat bersamaan, Ahok juga ditimpa isu primordial, yakni anggapan warganya muslim harus dipimpin oleh sesamanya. "Isu etnis juga memengaruhi. Muncul ketakutan apabila Ahok menang maka perekonomian akan dikuasai oleh kalangan nonmuslim," lanjut Adjie.

Di sisi lain, kehadiran Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono yang muncul dengan rekam jejak yang mumpuni dan dapat bersaing untuk melawan atau melampaui petahana, juga semakin menurunkan elektabilitas Ahok.

"Anies Baswedan memiliki track record baik, pernah sebagai menteri dan memang sosok yang bisa mengimbangi Ahok di kelompok menengah atas.

Silakan komentar headline ini di @MNCKoranSindo dengan hashtag #Pilkada2016

Sementara Agus yang muncul di menit terakhir belum melakukan apa-apa saja, tapi sudah mendapat 19%, itu luar biasa. Apalagi pesonanya di kelas menengah bawah terbukti tinggi," tambah Adjie.

Ahok yang dikonfirmasi hasil survei LSI mengaku tidak mau mengambil pusing. Dia menilai hasil survei seperti martabak yang kerap berbeda rasa. Terpenting baginya, dia mampu menyelesaikan pekerjaan hingga Oktober 2017. "Enggak usah tanya pilkada-pilkaduan. Ngomong kerja saja sudah. Enggak usah terlalu pusing dengan survei, sudah terlalu banyak," ujarnya singkat.

Sementara pengamat politik menilai sulit bagi Ahok-Djarot untuk bisa mengembalikan tingkat elektabilitasnya. Pandangan demikian disampaikan pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Bandung Yogi Suprayogi

dan pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Zaenal A Budiyono.

Yogi misalnya, menilai sulit bagi pasangan petahana tersebut untuk lepas dari tren penurunan elektabilitas ini. Apalagi di saat yang sama, baik Anies-Sandiaga maupun Agus-Sylvi elektabilitasnya akan terus naik seiring upaya pengenalanannya ke publik di sisa waktu menjelang pilkada. "Ahok masih bisa berbalik, tapi itu paling blessing in disguise saja."

Ke Hal 15))



Ikuti berita terkait di www.sindonews.com

Elektabilitas Ahok-Djarot Terus Merosot

((dari Hal 1

"Masalahnya semua kartu Ahok sudah dikeluarkan," ujarnya kemarin.

Menurut dia, dalam kondisi demikian tak ada jalan lain bagi Ahok selain mengubah strategi di sisa waktu yang ada. Isu yang selama ini diandalkan seperti birokrasi yang bersih, penegakan ketertiban umum dengan cara apa pun, termasuk dengan cara mengusur, harus diubah, bahkan sebagian ditinggalkan karena terbukti tidak populer. Gaya komunikasi Ahok yang kasar juga harus diubah.

"Pertanyaannya lagi, apakah Ahok bisa serta-merta membalik persepsi publik? Nah, biarlah itu menjadi pekerjaan rumah baginya. Tapi di beberapa daerah, ada *kok* calon kepala daerah yang bisa mengubah persepsi publik dalam waktu singkat," ujarnya.

Zaenal A Budiyono menilai temuan LSI tersebut sebagai alarm awal bagi Ahok-Djarot. Menurut dia, fenomena gemuruh pendukung Ahok yang mendominasi media dalam setahun terakhir ternyata hanyalah fenomena *buble politics* yang bisa kempes atau meletus kapan saja tergantung momentum. "Dan dalam politik, momentum sangatlah penting—serta terkadang menjadi titik loncat awal yang tidak dianggap di awal, menjadi penantang serius," katanya.

Menurut dia, apa yang dialami Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di 2004 dan Jokowi di 2014 adalah bukti sah kekuatan momentum tersebut. SBY pada 2003 disebut kekanak-kanakan oleh elite PDIP. Namun, isu miring ini ternyata bisa dikapitalisasi menjadi kemenangan di Pilpres 2004. Begitu juga dengan Jokowi yang dianggap "ndeso" di Pilkada 2012. Hasilnya Jokowi bahkan bisa menjadi presiden.

"Kesimpulannya, menuju 15 Februari 2017 semua bisa terjadi, termasuk peluang ketiga kandidat. Tinggal siapa yang



Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfaraby (kanan) memberikan keterangan terkait hasil survei Pilkada DKI Jakarta di Kantor LSI, Jakarta, kemarin.

mampumeyakinkan pemilih dengan program-program prorakyat dan komunikasi intensif ke basis-basis *voters*, dialah yang memiliki peluang terbesar untuk menang," kata Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC) tersebut.

Untuk diketahui, survei LSI dilakukan pada 26-30 September 2016, menggunakan metode *multistage random sampling* dengan jumlah responden 440. Wawancara dilakukan tatap muka menggunakan kuesioner dengan *margin error* $\pm 4,8\%$. Selain elektabilitas, hasil survei LSI juga menemukan adanya dukungan merata untuk masing-masing pasangan calon di mata pemilih. Dari lima segmentasi yang ada (gender, agama, pendidikan, ekonomi dan usia), setiap pasangan calon saling mengungguli dengan jarak yang relatif rapat.

Lima segmentasi dimaksud terkait gender, agama, pendidikan, penghasilan, dan usia. Dengan adanya persaingan ketat ini, membuka peluang pilkada DKI Jakarta akan berlangsung dua putaran. Dan apabila hal ini terjadi maka besar kemungkinan pasangan Anies-Sandiaga serta Agus-Sylvi apabila berkoalisi sudah dapat (42,5%) mengalahkan

pencapaian Ahok-Djarot (31,1%). "Bagi *incumbent* kalau elektabilitasnya stagnan, sementara lawan terus naik itu saja sudah *warning*. Pengalaman kita *incumbent* itu kuat, aman, apabila selisih dengan lawannya itu 20%," tutup Adjie.

Respons Parpol Pendukung

Sementara itu, parpol yang terlibat dalam persaingan Pilkada DKI Jakarta 2017 merespons hasil survei LSI dari sudut pandang berbeda. Parpol pendukung Ahok-Djarot, Partai Hanura, tidak mempersoalkan hasil survei. Politikus Hanura Dadang Rusdiana pun meyakini pilihan masyarakat DKI Jakarta masih sangat dinamis.

"Elektabilitas itu dinamis. Patokan *incumbent* itu tingkat kepuasan masyarakat Jakarta atas kinerja Ahok. Berdasarkan survei *Polltracking* kepuasan warga Jakarta terhadap Ahok itu 68 persen. Jadi tinggal bagaimana tim sukses dan opini kita pelihara dengan baik, maka elektabilitas akan kembali meningkat," ucapnya kemarin.

Dia menegaskan, walaupun turun, elektabilitas Ahok masih di atas kedua pasangan lain. Sebaliknya, jika ada hasil polling yang menyebut Agus-Sylvi

di atas Ahok, survei tersebut tidak berdasar. Jadi kita yakin Ahok bisa menang satu putaran," ungkapnya.

Ketua Pemenangan Anies-Sandi, Mardani Ali Sera menyatakan hasil survei yang dirilis LSI merupakan bentuk kecil atau contoh dari suara masyarakat DKI Jakarta. Dia pun mengakui perkembangan pertarungan masih sangat dinamis. Untuk itu, tim pemenangan pasangannya akan terus bekerja dan memfokuskan diri untuk memenangkan pilkada mendatang dengan memberikan program yang unggul dan menjadi jawaban atas keresahan masyarakat hari ini.

"Fokus kami bekerja dan bertemu dengan warga dan mengedukasi publik bahwa pilkada ini adalah hal demokrasi mereka karena itu perlu dipikirkan masak-masak," ungkapnya.

Senada, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didik Mukriyanto mengaku bersyukur atas adanya hasil survei tersebut. Walaupun munculnya Agus-Sylvi tiba-tiba, pasangan yang diusung Partai Demokrat, PKB, PAN, dan PPP tersebut telah diterima masyarakat.

● **dian ramdhani/
bakti munir/
bima setyadi**

Tim Kandidat Beradu Strategi Pemenangan

JAKARTA – Tim pasangan cagub-cawagub mulai bekerja keras untuk memenangkan jagoan masing-masing dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Mereka pun sudah menyusun strategi seperti apa yang dianggap bisa mewujudkan harapan tersebut. Tim dari ketiga pasangan kandidat kemarin sudah melakukan konsolidasi untuk menyosialisasi dan menggerakkan strategi.

Tim dari pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat misalnya kembali akan menggerakkan relawan untuk merebut hati masyarakat Jakarta. Strategi ini dipaparkan dalam deklarasi Sahabat Djarot yang dihadiri langsung oleh Djarot.

Jubir Sahabat Djarot, Lexyndo Hakim, mengungkapkan, relawan kembali menjadi bagian penting tim pemenang karena telah memiliki kesamaan sikap. Mereka akan bergabung



Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) dan pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) dan Sylviana Murni menghadiri rapat konsolidasi Partai Demokrat di Jakarta kemarin.

dengan partai pendukung Ahok-Djarot, yakni PDIP, Partai Golkar, Partai NasDem, dan Partai Hanura.

Menurut dia, tim relawan ini dite-

kankan untuk memperlihatkan bukti kerja Ahok-Djarot dalam membangun Jakarta.

Ke Hal 15))

Tim Kandidat Beradu Strategi Pemenangan

((dari Hal 1

"Kita fokus ke pengenalan dan sosialisasi sisi humanis dan positif ke warga Ibu Kota karena warga Ibu Kota sudah melek politik, sudah tahu harus pilih siapa yang baik untuk Jakarta Baru, siapa pasangan yang telah bekerja nyata untuk Jakarta," ujar Lexyndo.

Kemarin, pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni pun melakukan konsolidasi kemenangan di Gedung IS Plaza Jakarta. Acara yang melibatkan tim dari partai pendukung ini, yaitu Partai Demokrat, PPP, PKB dan PAN, dihadiri langsung Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli menjelaskan, dalam konsolidasi tersebut SBY sempat memberikan arahan secara langsung kepada para kader dan relawan. Kepada mereka SBY berpesan agar semua pendukung pasangan Agus-Sylvi tak melakukan perbuatan yang berbau SARA dan fitnah di kontestasi Pilgub 2017 mendatang.

"Strategi kami memenangkan Agus-Sylvi adalah bertemu langsung dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi dan permasalahan di Jakarta. Kami akan lakukan perang gerilya di darat. SBY berpesan kita bertarung tak punya musuh karena yang dua itu juga kawan bangsa Indonesia. Tapi dianggap keduanya itu pesaing," ujar Nachrowi.

Konsolidasi juga dilakukan dilakukan pasangan tim Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Kemarin mereka menggelar pertemuan di

rumah tim kampanye Anies-Sandi yang terletak di Jalan Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat.

Sekretaris Tim Kampanye Anies-Sandi, Syarif, menuturkan strategi tim kampanye Anies-Sandi menggunakan *out side of the book*. Dia membocorkan strategi tersebut adalah penggabungan lima elemen untuk berjuang bersama menggerakkan program pasangan dan visi-misinya. Pertama militansi PKS, kedua militansi Gerindra, ketiga relawan Anies, keempat relawan Sandiaga, dan kelima relawan Boy Sadikin.

"Kami tidak akan mencari kelemahan atau menjatuhkan pasangan lain, apalagi petahana. Kami akan berjuang menggerakkan program Anies-Sandi, yakni masalah kesejahteraan, kestabilan harga kebutuhan pokok, menciptakan lapangan kerja, dan sebagainya. Intinya membangun tanpa menyakiti," ungkapnya.

Tren Elektabilitas Ahok Menurun

Tim Ahok-Djarot harus bekerja keras untuk bisa memenangkan pilkada. Hal ini terkait dengan tren elektabilitas mereka yang terus menurun. Simpulan ini merupakan hasil survei yang digelar PolMark Research Center (PRC). Sebelumnya Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga menemukan tren yang sama.

CEO PolMark Indonesia Eep Saefulloh Fatah mengungkapkan, tren elektabilitas Ahok sejak tiga bulan terakhir mengalami penurunan. Pada Oktober ini elektabilitas Ahok hanya 31,9%, jumlah ini menurun 10,8% dalam rentang waktu

tiga bulan.

Eep mengungkapkan, dari hasil survei menunjukkan pasangan Ahok-Djarot memiliki elektabilitas 31,9%, diikuti Anies Baswedan-Sandiaga Uno 23,2%, dan Agus Yudhoyono-Sylviana Murni 16,7%. Masyarakat Jakarta yang belum menentukan pilihan sebesar 28,2%. Menurut Eep, tren elektabilitas Ahok mengalami penurunan 10,8% dalam rentang waktu Juli hingga Oktober ini.

"Dalam survei PRC PolMark Indonesia pada Juli 2016 Ahok memiliki elektabilitas 42,7% dan 31,9% pada survei Oktober 2016," ungkap Eep.

Anies Baswedan dan Agus Yudhoyono merespons positif hasil survei LSI. Anies, misalnya, menyebut hasil tersebut merupakan awal yang baik untuk menghadapi Pemilihan Gubernur DKI 2017. "Saya, Sandiaga Uno, tim kampanye, serta relawan masih perlu bekerja keras melakukan sosialisasi dan kampanye untuk memenangkan Pemilihan Gubernur DKI 2017. Kami ingin masyarakat Jakarta nanti memilih calon yang terbaik untuk menjadi gubernur," ujarnya.

Agus Yudhoyono bersyukur dengan hasil survei. Dengan demikian dirinya merasa semakin dikenal oleh masyarakat Jakarta karena dia baru di kancah politik. "Saya akan semakin bekerja keras untuk tidak hanya memperkenalkan figur saya, tetapi juga gagasan dan harapan kami berdua untuk masyarakat Jakarta," katanya.

● bima setiyadi/
dian ramdhani/
rratna purnama/ant

Cagub-Cawagub DKI Perkuat Basis Massa



Cagub DKI Agus Harimurti Yudhoyono menghadiri rapat konsolidasi Partai Demokrat di Jakarta, Rabu (5/10). Rapat tersebut untuk memperkuat pengurus partai dan relawan dalam rangka pemenangan Agus-Sylviana (foto kiri). Cagub Anies Baswedan (kiri) dan cawagub Sandiaga Uno (kanan) berfoto bersama sebelum menjalani tes narkoba di kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Jakarta, Minggu (25/9). Kubu Anies-Sandiaga terus memperkuat basis massa dengan cara mengandalkan lima elemen (foto tengah). Petahana Ahok-Djarot menjalani pemeriksaan di RSAL Mintoharjo, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Sabtu (24/9). Kubu ini menginstruksikan para saksi tidak hanya bertugas di TPS, tapi juga sebagai tim sukses (foto kanan).

JAKARTA – Tiga pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) memperkuat basis massa untuk memenangkan pertarungan Pilkada DKI Jakarta 2017. Mereka mulai bekerja keras dan saling beradu strategi.

Syarif, sekretaris Tim Kampanye Anies Baswedan-Sandiaga Uno, mengatakan ada lima elemen yang dikerahkan untuk menarik massa, yakni elemen Partai Gerindra yang diperkuat dari pertemuan anak ranting hingga provinsi dalam waktu tiga kali satu minggu, elemen PKS, elemen relawan Anies, elemen relawan Sandiaga, serta elemen relawan Boy Sadikin.

Bila lima elemen kekuatan pasangan Anies-Sandiaga terus diperkuat, dapat dijangkau lima juta suara melalui penyampaian program, mulai kesejahteraan,

pendidikan, lapangan pekerjaan, hingga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Pria yang menjabat sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta itu optimistis pasangan Anies-Sandiaga melewati elektabilitas pasangan calon petahana ketika kampanye dimulai. Bahkan, saat pemilihan nanti dia memperkirakan petahana gugur dalam putaran pertama. Kami belum bekerja saja hasil beberapa lembaga survei menyebutkan Anies-Sandiaga sudah memiliki elektabilitas 21-23%, apalagi kalau sudah bekerja," ucapnya.

Menurut dia, pasangan calon yang perlu diperhitungkan adalah pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni. Pasalnya, pasangan tersebut lahir dari partai yang dulunya tergabung dalam Koalisi Keluarga sehingga ada kemiripan program dan strategi untuk memenangkan Pilkada DKI 2017. "Ini seperti anak kembar yang lahir dari bekas Koalisi Keluarga. Kami mencoba bersaing sehat menunjukkan program bukan menyalahkan petahana. Ahok kalah karena dirinya sendiri," ujar Syarif.

Cawagub DKI Sandiaga Uno menuturkan, dirinya terus menyosialisasikan diri dan programnya agar bisa mewujudkan komitmen demokrasi yang sejuk. Anies dan Sandiaga sudah membagi program apabila terpilih menjadi gubernur DKI periode 2017-2022. Anies sangat

berpengalaman dan paham membangun jiwa dan mencerdaskan manusia, sedangkan dirinya akan fokus di bidang ekonomi dan infrastruktur.

"Macet dan banjir memang

"Ini seperti anak kembar yang lahir dari bekas Koalisi Keluarga. Kami mencoba bersaing sehat menunjukkan program bukan menyalahkan petahana. Ahok kalah karena dirinya sendiri."

SYARIF
Sekretaris Tim Kampanye Anies Baswedan-Sandiaga Uno

tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat, tapi manusianya harus siap sehingga outlook-nya bahagia. Kami akan hadirkan pemimpin yang mendengar aspirasi warga. Hasil riset ahli jiwa, mendengar sudah menyelesaikan 50% masalah. Pendekatan dua arah dengan warga mampu menyelesaikan masalah," ujarnya.

Ketua Tim Internal PDIP Pemenangan Ahok-Djarot, Gembong Warsono, mengatakan setelah mengetahui elektabilitas Ahok-Djarot merosot, pihaknya segera menggelar konsolidasi di jajaran DPD, mulai anak ranting di setiap RT/RW, kelurahan, hingga kecamatan. Partai beralih banteng moncong putih itu juga akan menginstruksikan saksi untuk tidak bekerja di tempat pemungutan suara (TPS) saja, tetapi juga menjadi tim sukses.

"Ada 150 koordinator saksi

yang akan dikumpulkan di Puncak. Mereka harus merekrut 13.000 saksi yang mampu bekerja saat kampanye dimulai untuk menjadi tim sukses sekaligus mengawasi jalannya kampanye," kata Gembong.

Dia mengklaim DPD PDIP mulai anak ranting hingga provinsi yang sebelumnya hampir 80% menolak dukungan terhadap Ahok, saat ini sudah bisa dipastikan berbalik arah dan siap bekerja keras menjalankan strategi pemenangan. Ini terindikasi dari kehadiran para kader ketika PDIP beberapa kali mengumpulkan mereka saat jam kerja.

"Dua hari setelah pengumuman Ahok-Djarot, saya mencoba mengumpulkan kader. Saya pikir pasti sepi nih, tapi nyatanya hampir seluruh kader hadir dan menyatakan siap mendukung. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri

juga siap ambil kendali di Jakarta," ungkapnya.

Ketua Tim Kampanye Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Nachrowi Ramli menuturkan, selain memiliki modal, sosok Agus sebagai anak mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Sylviana keturunan asli Betawi, kubu ini juga terus melakukan konsolidasi internal agar memiliki kesamaan visi-misi sekaligus memenangkan Pilkada DKI.

"Kami akan menasar ormas muslim seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah basis pemilih dari PKB, PAN, dan PPP. Kemudian ormas profesional seperti Badan Musyawarah Betawi dan membidik pemilih pemulaserta pemilih perempuan," ungkap ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta ini.

● bimasetyadi

Cagub Prioritaskan Penanganan Transportasi

JAKARTA – Permasalahan transportasi masuk program utama tiga pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta. Dengan penataan transportasi, kemacetan di Ibu Kota bisa berkurang.

Cawagub Sandiaga Uno menegaskan, permasalahan transportasi menjadi bagian utama dari program perbaikan infrastruktur. Sistem bus rapid transit (BRT) berikut fasilitas pendukungnya harus terintegrasi dengan moda transportasi lain.

"Saya optimistis bisa menyelesaikan lebih cepat dibandingkan petahana, di mana incumbent menyatakan pada 2017 hanya mampu menyelesaikan sistem BRT. Saya tidak berjanji, tapi saya sudah membuktikan apa yang saya targetkan dapat selesai tepat waktu

dan *under budget*. Konsepnya sederhana, kerja sama, pendekatan kemitraan, dan pemberdayaan," ungkapnya kemarin.

Berdasarkan data yang dimiliki, DKI Jakarta ini berada dalam posisi 35% biaya hidup warganya hanya habis untuk transportasi. Sementara, Tokyo dan Hong Kong yang memiliki situasi tidak jauh berbeda dengan Jakarta, warganya hanya menghabiskan biaya di bawah 8%. Artinya, subsidi transportasi bukan hanya terfokus untuk menggratiskan biaya melainkan harus ada *demand* yang

mengakomodasi kebutuhan perjalanan sehingga masyarakat benar-benar tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi massal.

"Kita lihat saja apa yang akan kita lakukan nanti. Mengatasi kemacetan di Jakarta tidak bisa diurus oleh seorang gubernur," katanya. Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno ini diusung Partai Gerindra dan PKS.

Petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, pihaknya saat ini tengah mempercepat pembelian bus yang memiliki karoseri lokal dengan fasilitas *double XL* untuk melayani perjalanan luar kota. Untuk di dalam kota, dia memilih mendatangkan bus bertipe *lower deck* yang dapat menggantikan bus sedang seperti Metromini, Kopaja.

Mantan bupati Belitung Timur optimistis sistem BRT

"Kami ingin mengatasi masalah yang nyaris permanen yaitu banjir dan macet."

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO
Cagub DKI Jakarta

selesai pada 2017 dengan skema rupiah per kilometer sehingga penumpang BRT baik dari dalam keluar kota maupun sebaliknya hanya cukup membayar Rp3.500. Bahkan, apabila *electronic road pricing* (ERP) sudah berjalan, dia akan menggratiskan seluruh perjalanan BRT di Jakarta.

"Semua enggak bayar. Nanti bukan cuma di jalur bus Trans-

jakarta (*busway*), semua rute yang dilayani Transjakarta enggak bayar. Termasuk pensiunan dan semua pegawai yang melaporkan gaji di bawah upah minimum provinsi (UMP)," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta kemarin.

Selain mempercepat sistem pelayanan BRT, Pemprov DKI sedang membangun *light rail transit* (LRT) dan *mass rapid transit* (MRT) yang memang membutuhkan waktu lama. Dia tidak menyebutkan kapan kedua proyek moda transportasi berbasis rel itu dapat dioperasikan.

Suami Veronica Tan itu justru menyebut proyek pembangunan MRT terlalu banyak kepentingan oknum yang selalu beralasan macam-macam dan terlalu kaku. "Saya kasih contoh, misalnya kamu punya tanah 100 meter dipotong tinggal 80 meter, harusnya garis sepadan bangunan (GSB)-nya enggak 80

meter dong. Kalau 80 metersiapa yang mau kasih. Kalau kamu paksa saya begitu, kamu potong jalan, tentu GSB saya jadi kecil kan. Kalau kecil mesti ikut ukuran yang baru dengan sertifikat baru, mesti potong dong bangunan saya. Itu kan enggak masuk akal," jelasnya.

Cagub Agus Harimurti Yudhoyono juga memfokuskan pada penanganan kemacetan dan banjir di Jakarta. "Kami ingin mengatasi masalah yang nyaris permanen yaitu banjir dan macet," ucapnya. Agus Sylviana Murni pun mengusung jargon Jakarta untuk Rakyat lantaran ingin Jakarta lebih aman, tertib, dan menuntaskan berbagai permasalahan yang selama ini dihadapi.

Untuk memuluskan jargon tersebut, Ketua Tim Kampanye Agus Sylviana, Eko Patrio mengatakan saat ini tim kampanye segera memantapkan visi-misi

untuk menjabarkan program. "Kami baru saja membentuk tim kampanye. Ketuanya ada empat yang diisi oleh masing-masing ketua DPD partai pengusung Agus-Sylvi. Habis ini kami matangkan visi-misi. Habis itu baru program. Visi-misi dan program yang kami daftarkan ke KPU DKI hanya garis besarnya saja," jelasnya.

Wakil Sekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menambahkan, pasangan Agus-Sylviana memprioritaskan pembangunan Ibu Kota yang manusiawi. Pasangan yang diusung PPP, PKB, dan PAN ini akan merangkul semua elemen masyarakat.

"Pembangunan harus dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Jangan ada yang termarjinalkan terutama masyarakat menengah dan bawah," ujarnya.

● **bima setiyadi**

21. 9 Oktober 2016, headline news

HT: DKI Jakarta Butuh Pemimpin yang Bisa Ciptakan Ketentraman

JAKARTA – DKI Jakarta membutuhkan pemimpin yang bisa menciptakan ketentraman, mempersempit kesenjangan, dan menata kota. Dengan demikian kehidupan di Ibu Kota ke depan bisa lebih baik.

Pesan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo saat menerima kedatangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno kemarin.

Tokoh yang akrab dengan sapaan

HT ini meyakini Anies-Sandiaga mampu mewujudkan harapan tersebut karena dia sudah lama mengenal kedua tokoh itu.

"Jadi kalau saya objektif, kita perlu dipimpin oleh pemimpin yang bisa memimpin dan yang bisa mengatasi ketentraman," ujar HT di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.

Kemarin Anies dan Sandiaga menegaskan kesiapannya untuk membenahi berbagai masalah Jakarta de-

ngan cara manusiawi. Anies misalnya menekankan bahwa pembangunan Jakarta harus dilihat dengan cara yang berbeda, yakni memajukan kota bersamaan dengan membahayakan warganya.

Dengan demikian, memimpin Jakarta bukan seperti mengelola real estat dan saya ingin bersinergi bersama membangun sebuah komitmen dalam bingkai NKRI, jangka panjang membangun bangsa Indonesia," tambahnya.

Ke Hal 15



Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (kiri) bersama Anies Baswedan (tengah) dan Sandiaga Uno (kanan), sesuai pertemuan di Kantor DPP Perindo, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, kemarin.

HT: DKI Jakarta Butuh Pemimpin yang Bisa Ciptakan Ketentraman

((dari Hal 1

"Dia hanya memikirkan keuntungan, jalan, jembatan, tetapi tidak kebahagiaan penduduknya," kata Anies saat menyoal warga di Posko Relawan Benda Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur, kemarin.

Untuk menunjang konsep tersebut, Anies mengaku bersama Sandiaga dan tim telah menyiapkan program, di antaranya di bidang kesehatan dan pendidikan. "Kami sudah menentukan langkah-langkah agar sekolah-sekolah negeri di Jakarta mutunya tidak kalah baik dengan sekolah swasta," ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Selain itu dia juga akan memastikan ketersediaan lapangan pekerjaan yang cukup serta harga kebutuhan pokok yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. "Pengalaman Mas Sandi sebagai pengusaha bisa dipakai untuk mengubah kesejahteraan warga Jakarta, karena itu beliau akan lebih berkonsentrasi pada program perekonomian," tutur Anies.

Adapun Sandiaga memastikan harga sembako akan stabil jika dirinya dan pasangannya di Pilkada 2017 terpilih sebagai pemimpin Ibu Kota periode 2017-2022. "Saya akan pasti-

kan harga bahan pokok itu akan stabil dan tidak fluktuatif, apalagi menjelang Lebaran," ujar Sandiaga Uno dalam diskusi politik yang diselenggarakan di Menteng, Jakarta, Sabtu.

Dia lantas menuturkan pihaknya telah memetakan rantai distribusi pasokan bahan pokok yang dibawa menuju Ibu Kota. Pada konteks ini, dia melihat adanya beberapa peluang kerja sama untuk memastikan pasokan bahan baku. Selain itu dia mengaku sudah memiliki sejumlah terobosan yang terbukti dapat menghadirkan harga bahan makanan terjangkau, di antaranya melalui operasi upung penerapan sistem kerja pada usaha besar. "Persoalan ini bisa kita selesaikan, kuncinya adalah kemauan," kata Sandiaga.

Sementara itu, saat bertemu dengan HT, Anies-Sandiaga mengapresiasi kinerja positif Partai Perindo walaupun partai tersebut baru berusia dua tahun. Dalam pandangan mereka, Perindo adalah partai yang konsisten dengan program kerakyatannya, yang mampu menjadi inspirasi banyak pihak. "Saya mengucapkan selamat ulang tahun dan dua tahun perjalanan Partai Perindo ini mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagaimana membangun partai politik yang masif," ujar Anies di

Kantor DPP Perindo, Jalan Diponegoro, Jakarta, kemarin.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut secara terbuka mengakui kekagumannya terhadap para pengurus partai besutan HT itu. Meski banyak dari kalangan muda, mereka tidak kalah dengan politisi senior yang paham mengelola organisasi politik di Indonesia. "Saya salut pada pimpinan Perindo yang sudah mengelola partai ini dengan baik," kata Anies.

Adapun Sandiaga melihat program Perindo, terutama program ekonomi kerakyatan, sudah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam dua tahun usianya. Program yang digulirkan juga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya yang berada di kelas bawah. "Terutama oleh teman-teman di kampung dengan program ekonomi kerakyatan UMKM, gerobak betul-betul memberikan solusi kepada masyarakat," kata Sandiaga.

Pria yang besar sebagai pengusaha ini juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Perindo yang kemarin berusia dua tahun. Harapannya, partai ini bisa terus memberikan inspirasi kepada bangsa yang memang membutuhkan terobosan serta orang-orang

yang mau berbuat ketimbang banyak berbicara. "Saya rasa Pak Hary punya kemampuan itu dan saya ingin bersinergi bersama membangun sebuah komitmen dalam bingkai NKRI, jangka panjang membangun bangsa Indonesia," tambahnya.

"Kalau (pemimpin) hanya melihat kota, apa bedanya dengan pengelola real estat?"

ANIES BASWEDAN
Bakal Calon Gubernur
DKI Jakarta

Cerdaskan Masyarakat

Munculnya sejumlah lembaga survei yang merilis hasil kajiannya selama proses pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pendidikan politik masyarakat. Karena itu, survei jangannya hanya menginformasikan data elektabilitas pasangan calon, tetapi juga dapat menjadi sarana yang baik untuk mengajari ma-

syarakat agar memahami pasangan calon yang akan dipilih pada hari pemungutan suara.

"Masyarakat juga harus paham, survei jadi bagian sosialisasi, memberi informasi, memberi pendidikan politik bagi mereka sehingga masyarakat tahu betul kandidat seperti apa dan punya pengetahuan cukup sebelum memilih," ujar Komisiner KPU Arief Budiman saat menjadi pembicara diskusi *Polemik Sindo Trijaya* "Perang Survei Pilkada" di Warung Daun Cikini Jakarta kemarin.

Arief mengingatkan, lembaga survei juga punya kewajiban untuk menjaga situasi kondusif, aman, damai, dan lancar selama pelaksanaan pilkada. Hal itu dapat dilakukan dengan menginformasikan secara terbuka, proses pelaksanaan kajian dilakukan berikut metodologi yang digunakan. "Jadi penilaian orang bukan hanya kepada lembaga survei saja, tapi juga hasil yang akurat dan berintegritas," tutur Arief.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah sepakat bahwa lembaga survei merupakan bagian dari bentuk partisipasi masyarakat. Oleh karena itu ada rasa tanggung jawab dari lembaga survei untuk menjaga dan menyukseskan setiap tahapan pilkada. "Jangan lembaga

survei justru dipertanyakan integritas dan sebagainya. Bahwa lembaga survei yang ada harus coba sampaikan informasi ke masyarakat secara objektif dan berintegritas," kata Nasrullah.

Lemba survei menurut Nasrullah harus melakukan pendekatan hasil kajian yang menyajikan masyarakat. Metodologi yang digunakan juga tidak memprovokasi atau membuat gaduh kondisi persaingan antarpasangan calon. "Menyampaikan informasi ke masyarakat bahwa pendekatan etik yang dikedepankan harus lebih sejuk," tutur Nasrullah.

Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfary sepakat apabila lembaga survei turut bertanggung jawab mencerdaskan masyarakat. Itu sebabnya setiap penyampaian hasil kajian LSI selalu diberikan dengan cara yang mudah untuk dimengerti serta transparan, baik metodologi maupun sampel yang digunakan. "Jadi saya pikir memang harus. Oleh karena itu semua penting, *stakeholder* paham survei," kata Adjie.

Sementara itu tiga tim pemenang bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI sepakat untuk mendukung hasil kajian lembaga survei yang kredibel dan berintegritas.

Wakil Ketua Tim Sukses Agus-

Sylviana, Eko Hendro Purnomo, mengapresiasi segala bentuk hasil kajian lembaga survei. Menurut dia apa yang dikeluarkan lembaga survei beberapa waktu terakhir cukup membantu pasangannya untuk memotret kekuatan saat ini. "Saya coba melihat secara utuh saja, apa pun bentuknya lembaga survei kami apresiasi, jadi motivasi, evaluasi, tapi juga bukan patokan untuk pesta, tapi menjadi kerja," ujar Eko.

Wakil Ketua tim pasang-an Anies-Sandiaga, Syarif, meminta agar hasil survei bisa dipandang secara objektif oleh semua pihak. Tidak justru reaktif atau bahkan menuduh bahwa hasil riset hanya menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan kelompok lainnya. "Maksudnya memang akhirnya kita harus objektif melihat survei. Seneng, suka atau tidak, ya kita sama-sama," kata Syarif.

Sementara itu anggota Bidang Kampanye dan Sosialisasi tim pasang-an Ahok-Djarot, Guntur Romli, memandang hasil survei adalah sebagai bahan evaluasi kelebihan dan kelemahan pasangan calon yang digunakan. Menurut dia masih ada waktu setelah hasil survei itu diumumkan untuk segera memperbaiki diri dan membenahi kekurangan yang ada.

© dian ramdhani/ant



Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Utara Timotius Yonathan (kanan) menyerahkan potongan tumpeng kepada Ketua DPW DKI Jakarta Partai Perindo Sahrianta Tarigan saat perayaan HUT Ke-2 Partai Perindo di Kantor DPD Partai Perindo Jakarta Utara kemarin (foto atas). Kader Perindo melakukan pembinaan terhadap pedagang mi ayam di Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, kemarin (foto bawah).

Perindo Siap Kawal Pilkada DKI 2017

JAKARTA – DPD Partai Perindo Jakarta Utara merayakan ulang tahun Perindo yang ke-2 di kantor DPD Perindo Jakarta Utara, Jalan Pelepeh Asri Satu, Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemarin. Seluruh kader Perindo berkomitmen terus berjuang bersama warga.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPD Perindo Jakarta Utara Timotius Yonathan meminta 2.000 kadernya dapat menyukseskan Pilkada DKI Jakarta 2017 meski Perindo tidak masuk dalam pesta demokrasi lima tahunan itu. Terpenting Jakarta 2017 mendapatkan pemimpin yang santun, tidak arogan, tegas, dan berpihak kepada rakyat, bukan kepentingan tertentu.

"Kami mengimbau warga tidak ikut terjebak dalam isu sara dalam Pilkada DKI 2017. Kami siap mengawal demokrasi agar Jakarta mendapatkan pemimpin yang membawa perubahan lebih baik bagi warga kecil," ujar Timotius kemarin.

Menurut dia, wilayah Jakarta Utara merupakan daerah rawan Pilkada DKI lantaran banyak penolakan terhadap kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akibat kebijakan-kebijakannya baik pengurusan maupun reklamasi. Meski demikian, kader Perindo tidak akan memaksa warga untuk memilih siapa pun kandidatnya. Dia hanya berpesan agar pada proses Pilkada DKI, warga di Jakarta Utara tidak ada gesekan.

Ketua DPW Perindo DKI Jakarta Sahrianta Tarigan mengimbau konstituen Perindo jangan terpecah dalam Pilkada DKI 2017. Perindo siap mengawal demokrasi agar mendapatkan pemimpin yang terbaik.

Dilokalisasi, Bidang UMKM dan Koperasi DPP Partai Perindo melakukan pembinaan terhadap puluhan pedagang kecil dan menengah di wilayah DKI Jakarta. Pembinaan tersebut berupa pengecekan kondisi ge-



robak, omzet, kualitas barang dagangan yang dijual, serta tawar-menawar dengan para pedagang. "Jadi, program bantuan gerobak Perindo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah," kata Wasekjen DPP Perindo Bidang UMKM dan Koperasi Henky Eko Sriyanto kemarin.

Dia menargetkan akan ada 1.000 unit gerobak yang akan diserahkan kepada para pedagang di Jakarta. Para pedagang diajar-

kan bagaimana manajemen yang baik, menyajikan hidangan yang higienis, etika penyajian maupun cara mengemas.

Sementara itu, DPW Partai Perindo Banten menggelar acara syukuran HUT ke-2 Partai Perindo di kantor DPW Perindo Banten, Kota Serang, kemarin. Dalam syukuran ini, kader memberikan santunan kepada puluhan anak yatim piatu dan fakir miskin.

● **bima setiyadi/helmi syarif/teguh mahardika**

Masyarakat Jangan Terprovokasi Isu SARA

RAWAN DIPOLITISASI

Tren penggunaan isu SARA sudah terasa pada Pilkada DKI Jakarta. Politisasi isu SARA harus dihindari demi mewujudkan pilkada yang adil dan aman.



AHOK-DJAROT
Parpol Pengusung



ANIES-SANDIAGA
Parpol Pengusung



AGUS-SYLVI
Parpol Pengusung



JAKARTA – Masyarakat diminta tidak mudah terprovokasi munculnya isu-isu SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) yang akhir-akhir ini mulai merebak. Hal ini akibat memanasnya suhu politik menjelang pilkada serentak, termasuk di DKI Jakarta.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan kondisi yang terjadi saat ini bisa jadi akibat dari upaya-upaya untuk menimbulkan kekisraban, keresahan, dan friksi-friksi di masyarakat. Dimana ujung-ujungnya akan menimbulkan satu suasana ketidaknyamanan di masyarakat. "Masyarakat diharapkan tidak terprovokasi dan tidak bersikap emosional. Berikan kesempatan kepada pihak aparat kepolisian untuk menyelusuri terkait hal-hal yang menimbulkan keresahan," kata Boy Rafli Amar menganggapi laporan yang masuk ke polisi mengenai dugaan peristiwa agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Jakarta taklimalam.

Boy menjamin Polri akan menerima segala bentuk laporan yang dianggap melanggar hukum ataupun tidak. "Laporan apa pun yang masuk ke Polri akan kami proses serta mempelajari bukti-buktinya. Pemilu harus berjalan aman, damai, dan jauh dari kekerasan," kata Boy Rafli. Adapun Kapolresen TNI Mayjen TNI Tatang Sulaiman mengakui saat ini potensi munculnya isu SARA sudah mulai kelihatan menjelang pilkada.

Ke Hal 15

Stakan komentar headline ini di @MBCKorupsiSindo dengan hashtag #Pilkada2017

PILKADA SERENTAK 2017

Waktu	Jumlah	Provinsi
15 Februari 2017	101 Daerah	7 Daerah
Kabupaten		Kota
76 Daerah		18 Daerah



Ikuti berita terkait di www.sindonews.com

ASAL CALON

Petahana : 104 daerah
Non petahana : 7 daerah

LATAR BELAKANG CALON

- Gubernur yang mencalonkan diri sebagai gubernur : 5 orang
- Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai gubernur : 3 orang
- Wakil gubernur yang mencalonkan diri sebagai wakil gubernur : 2 orang
- Bupati yang mencalonkan diri sebagai bupati : 39 orang
- Bupati yang mencalonkan diri sebagai wakil bupati : 1 orang
- Wakil bupati yang mencalonkan diri sebagai bupati : 15 orang
- Wakil bupati yang mencalonkan diri sebagai wakil bupati : 15 orang
- Wali kota yang mencalonkan diri sebagai wali kota : 12 orang
- Wakil wali kota yang mencalonkan diri sebagai wali kota : 5 orang
- Wakil wali kota yang mencalonkan diri sebagai wakil wali kota : 7 orang

Sumber: Litbang KORAN SINDO, berbagai sumber, diolah

NORAWI PRADIMASATI



Masyarakat Jangan Terprovokasi Isu SARA

((dari Hal 1

Hanya, masyarakat diminta menghindari berkembangnya isu-isu SARA tersebut. "Harap masyarakat juga cerdas dengan isu-isu yang terjadi terkait pilkada ini, jangan sampai terprovokasi oleh *hate speech* pemilu, apalagi di Jakarta yang mulai panas saat ini," papar Tangtad malam.

Dalam kesempatan ini, dia menjamin posisi TNI sebagai pasukan pengamanan pilkada akan bersikap netral. "Kami akan patuh kepada UU saja. Netralitas itu sudah menjadi harga mati sebagai prajurit," ungkapnya. Sikap netral itu bertujuan agar tercipta pemilu yang kondusif, tertib, aman, dan lancar.

Menurutnya, TNI akan melakukan pengamanan berdasarkan permintaan kepolisian. Soal netralitas TNI, lanjut dia, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo selalu mengingatkan seluruh jajarannya. "Jika ada prajurit yang melanggar akan ditindak," tegas Kapsuspem.

Sementara itu, massa yang tergabung dalam Lintas Pemuda Etnis Nusantara menggelar aksi damai di kawasan Car Free Day, Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, kemarin pagi. Aksi itu mengajak warga untuk menggelar aksi damai untuk Pilkada Serentak 2017. Dengan mengusung sejumlah poster dan atribut, mereka mengajak warga yang hadir di *Car Free Day* untuk menolak kampanye bernuansa SARA. "Mari kita jaga kebinekaan dengan tidak menggunakan SARA di pilkada," ujar koordinator aksi Imam Aulia.

Imam mengatakan, Indonesia adalah negara dengan beragam suku bangsa dan agama.

Begitu juga Jakarta. Sebagai miniatur bangsa, Ibu Kota memiliki keragaman suku etnis dan agama. "Siapa pun calon gubernurnya, kita minta junjung tinggi kebinekaan. Jauhi SARA," tegas dia.

Imam menambahkan kesuksesan Pilkada 2017, termasuk di Jakarta, bukan semata tanggung jawab KPU selaku penyelenggara dan polisi selaku pengamanan. Keberhasilan pilkada adalah tanggung jawab semua.

Cawagub DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta semua relawannya untuk tidak terpancing isu SARA. Hal itu agar Pilgub DKI Jakarta 2017 tetap sejuk dan damai. "Kami usung demokrasi sejuk, demokrasi tanpa SARA, dan demokrasi yang menyatupadukan warga DKI Jakarta," kata Sandi di Jakarta, Sabtu (8/10).

Cawagub DKI Jakarta Sylviana Murni meminta agar masyarakat tidak mudah terprovokasi isu penistaan agama. Karena cawagub dari Koalisi Cikeas ini ingin Pilgub DKI Jakarta 2017 berjalan dengan damai tanpa isu SARA. "Kita harus melihatnya dengan kepala dingin, kan kita punya akidah dan keyakinan," ujarnya di Jakarta, Sabtu (8/10). Meski ada pihak yang melontarkan isu SARA, Sylvi meminta masyarakat untuk tak terpancing emosinya. Masyarakat diminta untuk tetap memegang teguh akidahnya dalam menghadapi persoalan tersebut. "Saya juga pasti mendoakan mereka (pelaku penista agama itu) insyaf," katanya.

Tim pemenang Ahok-Djarot, Guntur Romli, menyambut baik dukungan yang

diberikan tim pemenang Anies-Sandi untuk sama-sama komitmen membangun suasana Pilgub DKI yang sejuk. "Kami apresiasi, untuk itu mari sama-sama bangun suasana demokrasi yang sehat. Biarkan masyarakat Jakarta memilih dengan hati nurani. Karena masyarakat sekarang sudah lebih pintar," kata Guntur.

Aparat Harus Netral

Penanganan hukum atas aduan beberapa kelompok terhadap Gubernur Ahok atas dugaan penistaan agama dinilai menjadi ujian bagi penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, untuk menjaga netralitas dalam politik. Penanganan kasus itu akan menunjukkan apakah kepolisian menegakan hukum atau menginduk pada kehendak kekuasaan.

"Polisi satu rezim dengan kekuasaan, artinya kalau kekuasaan main, ya itu tidak akan jalan proses hukumnya. Tapi, bentangan kekuasaan harus di bawah penegakan hukum, di bawah kehendak hukum. Karenanya, harus netral. Ini ujian bagi penegak hukum apakah bisa membuktikan netral atau tidak," kata pengamat politik Pangsi Sarwi Chaniago, kemarin.

Menurut dia, dalam menangani kasus Ahok jangan sampai justru menunjukkan bahwa kepolisian mengamini apa yang diperkirakan banyak orang bahwa mereka tidak berkecukupan terhadap kekuasaan. "Jangan sampai yang hadir adalah demokrasi kriminal dan yang seperti ini terus dipelihara. Kalau penegakan hukum tidak dihormati, yang ditakutkan (muncul) ketidakpercayaan.

Itu mencemaskan," ujarnya.

Menurut Pangsi, kasus Ahok tersebut bukan masalah sepele karena menyangkut dugaan penistaan agama, yakni kitab suci agama Islam. Maka apa yang menjadi *ending* dari proses hukum di kepolisian akan menjadi penilaian di mana posisi penegak hukum. "Jadi, betapapun sekarang ada asumsi bahwa sulit bagi publik untuk percaya penegak hukum akan netral. Tapi di sinilah menjadi momentum bagi penegak hukum bahwa dia berjalan bukan atas kehendak kekuasaan, tetapi atas kehendak hukum itu sendiri," ungkapnya.

Wakil Sekretaris PWNU DKI Jakarta Husny Mubarak Amir berharap kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok menjadi pembelajaran penting dalam kehidupan beragama agar rasa saling menghormati tetap terjaga. Karena itu, penting bagi penegak hukum untuk bisa menuntaskan secara hukum tanpa terintervensi oleh kekuatan politik ataupun kekuasaan.

"Kalau nanti ujungnya menunjukkan bahwa penegak hukum tidak netral dalam menanganinya, justru itu akan menjadi preseden buruk ke depannya karena ini sudah menyangkut noda dalam kehidupan dan kerukunan umat beragama," ungkapnya.

Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU Rumadi Ahmad menilai penggunaan isu agama dalam urusan politik hanya akan mengotori agama yang bersifat suci.

● rahmat.sahid/
binti.mufarida/
sindonews

Aparat Harus Jaga Netralitas

JAKARTA – Aparat negara—baik TNI, Polri, intelijen, maupun birokrasi—harus netral dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada), termasuk Pilkada DKI Jakarta. Netralitas perlu ditegakkan demi menjaga keberlangsungan demokrasi dan reformasi.

Harapan yang disampaikan sejumlah pihak tersebut untuk merespons pernyataan akun Twitter resmi milik Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya yang memuat berita permintaan maaf Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait kontroversi Surah Al Maidah 51, kemarin.

Pengamat Politik Universitas Airlangga (Unair) Haryadi mengingatkan, sesuai dengan rambu-rambu hukum yang ada, aparat TNI/Polri diharuskan bersikap netral. Dalam menjalankan fungsi normatifnya, aparat TNI/Polri tidak boleh memilah-milah. "Dalam memberikan pelayanan, semua warga negara memiliki hak yang sama. Jangan karena sedang berkuasa, kemudian diperlakukan berbeda. Itu tidak boleh," ungkapnya.

Dia menandakan, jika ditemukan TNI/Polri tidak netral maka akan jadi bumerang. Pasalnya, dalam era yang serbaterbuka, semua pihak mengawasi dan menyoroti. "Lembaga pengawas cukup kuat. Kalau aparat terlibat, rentetannya panjang," ungkapnya.

Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Veri Junaedi melihat cuitan akun Twitter TMC Polda Metro Jaya menimbulkan kesan Polri tidak netral dalam kontestasi pilkada. Apalagi, pernyataan tersebut tidak berkaitan dengan tugas utama TMC yang seharusnya pada persoalan lalu lintas.

Ke Hal 15))

Aparat Harus Jaga Netralitas

((dari Hal 1

Karena itu, dia melihat perlu klarifikasi dari yang bersangkutan agar tidak menjadi multitafsir di publik. Ke depan, dia berharap TMC harus lebih hati-hati sehingga netralitasnya tetap terjaga. Kalaupun ingin terlibat dalam pilkada seharusnya dipilah-pilah dan disesuaikan dengan perannya. "Misalnya kemacetan karena ada kampanye. Itu pun harus adil. Semuakandidat harus dapat porsi," tuturnya.

Senada, pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Hurriyah juga melihat kicauan Twitter TMC Polda Metro Jaya tidak sesuai fungsinya. Karena itu, dia menganggap wajar jika muncul dugaan bahkan kecurigaan soal netralitas TNI/Polri dalam Pilkada DKI Jakarta. "Dengan kicauan tersebut, masyarakat jadi bertanya apa motivasi di balik ini. Padahal, TNI dan Polri jelas-jelas tidak punya hak pilih dan harus netral dalam pemilu, tapi kali ini justru ikut-ikutan dalam kehebohan soal pernyataan Ahok," katanya.

Kecurigaan ini semakin meruncing kalau dikaitkan dengan beberapa kebijakan Gubernur DKI yang dianggap bisa memengaruhi profesionalitas dan netralitas mereka. Dia mencontohkan soal hibah Rp30 miliar untuk Polda Metro, pemberian tunjangan operasional untuk TNI dan Polisi yang bertugas di Ibu Kota, serta penggratisan bus Transjakarta untuk TNI/Polri.

"Dengan semakin meningkatnya sentimen antipati dari warga terhadap Ahok akibat beberapa kebijakannya, Ahok akan sangat membutuhkan perlindungan dan dukungan dari TNI/Polri. Kita bisa lihat itu ketika pemprov melakukan pengusuran dengan melibatkan tentara, juga dalam operasi pembersihan sungai beberapa waktu lalu," katanya.

Melihat keterkaitan semua peristiwa ini, kata dia, sulit rasanya untuk tidak menduga ada motif dan kepentingan politik di balik kebijakan gubernur dan pengaruhnya terhadap netralitas TNI/Polri. "Padahal sesuai ketentuan, TNI/Polri harus netral dalam pemilu. Klausul itu kan belum berubah sampai sekarang," tegasnya.

Kemarin akun @TMC Polda Metro mengunggah berita permohonan maaf Gubernur DKI

Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terhadap umat muslim di Indonesia yang diambil dari salah satu *media online*. Langkah yang menunjukkan keberpihakan tersebut langsung memaneakritikan. Sejumlah netizen mempertanyakan langkah yang admin akun Twitter TMC Polda Metro Jaya @TMC Polda Metro tersebut.

Akun @TofaLemon, misalnya berkicau, @TMC Polda Metro sebaiknya fokus di Lalu Lintas., @TMC Polda Metro sebaiknya fokus di Lalu Lintas. Tapi ya sudah. Kita jadi tahu. Tak kalah kerasnya, akun @MoMo_Snakepit mengatakan @TMC Polda Metro wkwkwkw ngakak akun Lalu lintas ngurusin Ahok!! Dpt uang brp min!! Selanjutnya akun @rdnderi, wow cuma kasus Ahok yg bisa masuk akun LALU LINTAS POLDA METRO @TMC Polda Metro. Akun @ZaraZettiraZR menulis status @TMC Polda Metro Karjeng Dimas jugaminta maaf sy denger admin? Mau umumin ngga? k emudian, akun @justpambudi menulis @TMC Polda Metro kenapayng tweet akun traffic management polisi, lahakundiyg bermasalahga adu update samasekali.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga mengingatkan aparat penegak hukum, khususnya TNI, Polri, dan intelijen, bersikap netral dalam pilkada (9/10). Harapan ini disampaikan agar aparat negara tidak menciderai demokrasi dan semangat reformasi.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan meminta seluruh jajaran bersikap netral pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Dia menegaskan tidak ada anggota kepolisian yang memihak kepada salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. "Harus netral, kalau tidak netral itu tidak benar," katanya.

Kepada jajarannya, Iriawan mengingatkan bahwa tugas pokok kepolisian adalah melakukan pengamanan saat pilkada nanti. "Buat kami siapa pun gubernurnya, yang jelas ibu kota negaranih harus aman," ujarnya. Pihaknya juga telah menyiapkan personel untuk mengamankan para cagub dan cawagub secara melekat.

Ahok Minta Maaf, Proses Hukum Jalan Terus
Ahok akhirnya meminta

maaf atas ucapan terkait Surah Al Maidah 51 yang disampaikan di Pulau Seribu. Pernyataan yang tersebar melalui YouTube Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 5 Oktober 2016 oleh banyak pihak dianggap sebagai bentuk penistaan agama. Namun di sisi lain, proses hukum terkait kasus tersebut masih berjalan.

"Yang pasti, saya sampaikan kepada semua umat Islam, ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam ataupun Alquran," cetus Ahok kemarin.

Dia mengaku juga telah meminta maaf kepada MUI DKI, bahkan lembaga tersebut telah menyurati dirinya dan memberi peringatan keras untuk fokus terhadap kemaslahatan umat dan tidak usah mengomong tafsiran agama yang sifatnya sensitif. "Karena sesama agama pun bisa menafsirkannya berbeda. Ya sudah, saya minta maaf untukku," tuturnya.

Walaupun minta maaf, Ahok membantah melakukan penghinaan agama. Dia mengaku telah melihatnya dari video yang ditayangkan oleh sejumlah stasiun televisi dan tayangan tersebut tidak dianggap bukan sebuah pecehan. Ahok pun menandakan selama menjabat gubernur, dirinya melalui Pemprov DKI konsisten terhadap masalah sekolah-sekolah Islam, dari membantu menyelesaikan izin, kartu jakarta pintar (KJP), madrasah, hingga membangun masjid.

"Makanya saya minta maaf untuk kekaduhan ini, jangan sampai saya pikir komentar ini jangan diteruskan lagi. Iniatu mengganggu keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara," tutur Ahok, sembari menjelaskan bahwa saat ini masyarakat Pulau Seribu tidak ada yang merasa terhina.

Permintaan maaf Ahok tersebut dipastikan tidak serta merta menghentikan proses hukum terkait dugaan penistaan agama tersebut. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar menegaskan, penanganan pelaporan kasus tersebut di Bareskrim Polri akan tetap berlanjut. "Secara proporsional akan tetap dilanjutkan dan diproses oleh pihak kepolisian sebagaimana aturan yang ada. Proses hukum ada langkah-langkah yang harus diikuti yang berkaitan dengan

pembuktian alat bukti pelapor," ungkapnya di Mabes Polri, Jakarta, kemarin. Bareskrim Mabes Polri telah menerima delapan laporan Ahok atas kasus dugaan penistaan agama tersebut.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Agus Andrianto mengatakan ada empat laporan terhadap Ahok yang masuk ke Bareskrim, salah satunya adalah Novel Bakmumin. Sementara satu laporan masuk ke Polda Sumatera Selatan. Sedangkan di Polda Metro Jaya ada tiga laporan yang masuk. Dua di antaranya melaporkan Ahok, satu lagi melaporkan Si Buni. Yang karena memosting potongan video Ahok.

"Totalnya laporan yang masuk ada 8 laporan, LP-nya di beberapa tempat. Kita akan satukan karena orangnya sama, objeknya sama, fokusnya sama, jadi artinya berapa pun laporan pasti dijadikan satu. Tidak akan mungkin orang dihukum dalam satu perbuatan, misalnya ini di hukum dalam satu perbuatan, orang lapor terus perbuatannya, makanya kami satukan LP-nya," ungkap Agus di Mabes Polri, Jakarta, kemarin.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Awi Setiyono membenarkan pelaporan terhadap Ahok diserahkan sepenuhnya kepada Bareskrim Mabes Polri. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih. "Yang diserahkan ada dua laporan dari organisasi masyarakat yang mengadakan Ahok terkait dugaan penistaan agama yakni Forum Anti Penistaan Agama (FUPA) dan Pemuda Muhammadiyah."

Selain kasus hukum terus bergulir, pertarungan antarpemilihan pun hingga kemarin masih memanas. Kemarin, Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) melapor balik Komunitas Advokat Ahok Djaro (Kotak Adja) ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya. Laporan terkait pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Kotak Adja terhadap pemilik akun Facebook Buni Yani.

● binti mufarida/yan yusuf/helmi syarif/dita angga/r ratna purnama/solichan arif/mula akmal/sindonews.com

Penutupan Diskotek Mille's Sudah Tepat

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan, penutupan diskotek Milles, Lokasari, Taman Sari, Jakarta Barat sudah sesuai prosedur.

"Diskotek *kan* kita sudah buat peraturan. Kalau kamu ketemu ada yang memakai, bukan jualan. Pokoknya kalau di dalam diskotek ada yang pakai narkoba, ketemu dua kali, pasti kami tutup. Dan, enggak boleh buka usaha yang sejenis lagi. Sama kasusnya seperti Stadion," ungkap Ahok di Balai Kota DKI Jakarta kemarin. Mantan bupati Belitung Timur ini mengaku, surat perin-

tal penutupan diskotek itu akan dikeluarkan hari ini. "Sudah diperintahkan. Dari Jumat lalu, supaya hari ini dikeluarkan surat ditutup," jelas Ahok. Sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta Catur Laswanto mengaku telah memproses surat pencabutan izin operasional diskotek tersebut. Surat itu akan disebar hari ini (kemarin) termasuk ke

pengelola diskotek. Namun, hingga berita ini ditulis surat yang dimaksud tak kunjung diterima pengelola diskotek. "Belum ada *kok*," ujar humas diskotek Mille's, Yuki, kemarin.

Pantauan *KORAN SINDO*, aktivitas di diskotek Mille's masih berjalan normal, karyawan bekerja seperti biasa. Pelang segel maupun garis polisi tidak kunjung dipasang. Sebaliknya, untuk memaksimalkan pelayanan, pengelola melakukan *fogging*. Yuki menilai, rencana penutupan diskotek Mille's oleh Pemprov DKI Jakarta salah alamat. Oknum perwira polisi AKP Sunanto yang ditangkap Tim Pamilal Polres Metro Jakarta

Barat tidak mengonsumsi narkoba di diskotek Mille's. "Kami juga enggak tahu kapan ditangkanya," tuturnya.

Mengenai pemberantasan narkoba, Yuki mengaku sangat berkomitmen mengenai masalah tersebut. Termasuk melakukan pelaporan bila ada pelanggaran yang ke depannya akan ditindaklanjuti. "Dua tahun terakhir ini sudah 25 karyawan kami pecat karena narkoba," sebutnya.

Dia menyebutkan, ada 350 orang yang bekerja di Mille's mulai dari pelayan, *security*, *office boy*, hingga pemandu lagu wanita. Karena itu, Yuki mengaku bing-

ung harus bagaimana bila nanti diskotek ditutup. "Akan banyak pengangguran," ucapnya.

Yuki berharap Dinas Pariwisata DKI Jakarta lebih bijak dalam memberikan sanksi, apalagi harus menutup izin operasional. Terlebih, transaksi narkoba yang terjadi bukan dilakukan oleh pegawainya, melainkan pengunjung. Yuki menyadari, mengawasi pengunjung agar tidak mengonsumsi narkoba sangat sulit. Selain terburuk hak mereka datang dari masyarakat, pihaknya juga tidak bisa melakukan pemeriksaan hingga ke kantong celana pengunjung. "Kalau proteksi, kita Cuma dari pemeriksaan tas saja," ucapnya.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asija) Gea Hermansyah mengklaim pemberian surat peringatan (SP) terhadap manajemen tempat hiburan tidak jelas. "Kalau transaksinya sama pegawai, baru kita salah. Tapi, kalau pengunjung, bagaimana? Akan terburuk hak mereka datang *dong*," ucap Gea.

Staf personalia diskotek Mille's, Nico Ludianto, mengaku pasrah dengan penutupan tempat kerjanya tersebut. Pria yang sudah 14 tahun bekerja di diskotek tersebut mengklaim penutupan ini akan mengganggu ekonomi keluarganya. "Yang jelas, kami kecewa, di mana lagi

kami kerja," ucapnya.

Kepala Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat (THR) Lokasari, Raya Siahaan menilai, pengelola diskotek Mille's bandel. Selain sering kena tegur, pengelola juga tidak mau melakukan introspeksi diri. Pihaknya sudah memanggil beberapa pengelola tempat hiburan malam. Namun, hanya Mille's yang terkenal nakal karena kerap membiarkan narkoba beredar bebas. Meski meyakini ada peredaran, Raya tidak dapat berbuat banyak lantaran kapasitasnya terbatas. "Penindakan dan pencabutan izin *kan* ada di dinas," ucapnya.

● **yan yusuf/helmi syarif**

NETRALITAS PILKADA

DPR Desak Kapolri Klarifikasi dan Minta Maaf

JAKARTA - DPR menilai Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian perlu mengklarifikasi dan minta maaf kepada publik atas indikasi keberpihakan Polri dengan memuat permintaan maaf Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada akun *Twitter* TMC Polda Metro beberapa hari lalu. Sebagai penegak hukum, institusi Polri seharusnya netral dan independen.

"Harusnya diperiksai situasi pengelolaannya. Jika dia dikelola oleh swasta atau privat, Kapolri harus mengganti itu dengan yang profesional dan netral, sebab bahaya sekali kalau ini adalah suatu preseden dari suatu kepemilikan," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Menurut Fahri, yang penting dari pejabat negara adalah sensitivitas dan etika mengenai apa

hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. "Karena penegak hukum ini sensitif terhadap keberpihakan, *lifestyle*, kecocokan, pantas tidak pantas itu memang tuntutan hari-hari," ujarnya.

Wakil Ketua DPR bidang Polhukam Fadli Zon menyatakan kepolisan atau lembaga negara mana pun merupakan lembaga negara yang diperuntukkan untuk melayani kepentingan publik, termasuk TMC Polda Metro.

"Saya kira tidak boleh ya, *kan* Polda Metro melayani kepentingan publik masyarakat Jakarta, bukan bagian dari konsultan Ahok atau PR (*public relation*)nya Ahok," tandas Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu.

Fadli mengimbau Polri, polda, dan aparat negara lainnya untuk bertugas sebagaimana tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya sebagai lembaga penegak hukum, apalagi kalau

sampai terindikasi kuat menjadi tim sukses salah satu calon.

Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suntana membantah pihakannya memihak calon petahana Gubernur Ahok. "Twitter Polda Metro Jaya itu milik umum. Setiap orang boleh menggunakan fasilitas media tersebut untuk menyampaikan imbauan. Termasuk kehilangan anggota keluarganya, terkait tindak pidana dan memohon bantuan bencana alam itu bebas," katanya di Jakarta kemarin.

Terkait akun *Twitter* TMC Polda Metro Jaya yang memuat permintaan maaf Ahok, polisi pun tidak memiliki kepentingan apa pun. "Karena itu suatu sarana untuk menyampaikan informasi secara cepat. *Lillahit taala* polisihanyamenjagastuasikonduktivitas," tegasnya. Dia pun menegaskan bahwa pihak kepolisian netral dalam Pilkada DKI.

Penistaan Agama

Setelah melalui kajian mendalam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan Gubernur Ahok telah melakukan penistaan agama dan ulama. Karena itu, MUI meminta aparat penegak hukum proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, profesional, dan memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

Menurut Ketua MUI KH Maruf Amin, langkah tersebut harus diambil oleh aparat hukum agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum. "Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Alquran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku," paparinya dalam rilisnya kemarin.

Untuk diketahui, sikap MUI ini muncul untuk merespons pernyataan Gubernur Ahok yang kontroversial dan menyinggung perasaan umat muslim dengan mengutip Surah Al-Maidah ayat 51, di Pulau Seribu beberapa waktu lalu. Pernyataan Ahok tersebut dinilai banyak kalangan merupakan penistaan terhadap Alquran dan agama Islam. Ahok pun akhirnya mengakui kesalahannya dan sudah meminta maaf kepada publik terkait ucapannya tersebut.

Dalam salah satu sikap keagamaannya, MUI menekankan bahwa ucapan Gubernur Ahok yang menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil Al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap

ulama dan umat Islam. "Berdasarkan hal di atas maka pernyataan Ahok dikategorikan melakukan penistaan agama dan menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum," tegas Maruf Amin.

Pasalnya, Alquran surah Al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin. Dan, ulama wajib menyampaikan isi Al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib. "Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah Al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin," ungkapnya.

Meski begitu, MUI meminta masyarakat untuk tetap tenang dan menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum.

Terkait pernyataan MUI itu,

Ahok enggan berkomentar. Dia memilih untuk fokus menangani masalah kerjanya. "Sudah lah nggusah ngomongin pilkada. Kerja saja," ujarnya. Hal senada juga diungkapkan Ketua Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Prasetyo Edi Marsudi. "Sudah lah," ujarnya singkat.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf menyatakan kepolisan harus segera bertindak untuk melakukan pemeriksaan atas pelaporan berbagai kelompok terhadap ucapan Gubernur Ahok. "Karena desakan yang massif, kita tidak bisa mengabaikan laporan itu. Jika sudah dinyatakan pada delik penodaan agama maka tidak cukup minta maaf, polisi harus memutuskan secara hukum," ucapnya.

● **kiswondari/bima setiyadi/helmi syarif/mula akmal**

Sembilan Diskotek Terancam Ditutup

JAKARTA—Setelah menutup Diskotek Mille's di kawasan THR Lokasari, Taman Sari, Jakarta Barat, kemarin, Pemprov DKI Jakarta kembali mengancam menutup sembilan diskotek lainnya karena melakukan pelanggaran.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan ada beberapa diskotek di kawasan Taman Sari yang tercatat telah mendapatkan surat peringatan pertama (SP1) karena keadapan melanggar peraturan. "Paragon masih sisa satu (peringatan) lagi. Kalau dia keadapan, habis dia," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, kemarin.

Mantan bupati Belitung Timur ini menyebutkan masih ada sembilan diskotek lainnya yang sudah mendapatkan surat peringatan tersebut. "Sisanya saya tidak ingat. Yang jelas, mereka sudah kena SP 1," tambah Ahok.

"Udah diingetin terus, pemerintah udah keras. Saya yakin Jakarta sarang narkoba. Kalau kamu tempat hiburan kamu nggak mau ditutup, kamu geledah dong orang yang datang."

BASUKI TJAHAJA PURNAMA
Gubernur DKI Jakarta

Ahok juga mempersilakan pemilik diskotek Mille's jika ingin menuntut Pemprov DKI. Ahok menilai, langkah yang

diambil telah sesuai prosedur. "Kalau mau tuntutan, tuntutan aja. Nantikan tunggu di pengadilan, ya kalau dia mau tuntutan silakan. Kan kita udah sampaikan peraturan jangan ada pakai narkoba karena narkoba ini merusak generasi gitu loh," ujar Ahok.

Ahok mengatakan, penutupan diskotek karena adanya penggunaan narkoba merupakan bentuk ketegasan Pemprov DKI dalam memberantas peredaran narkoba.

Apalagi, peredaran dan penggunaan narkoba di wilayah DKI saat ini termasuk kategori tinggi. Melihat adanya diskotek yang dijadikan tempat penyalak narkoba, pihaknya tak segan untuk menutup.

"Udah diingetin terus, pemerintah udah keras. Saya yakin Jakarta sarang narkoba. Kalau kamu tempat hiburan kamu nggak mau ditutup, kamu geledah dong orang yang datang," kata Ahok.

Seperti diketahui, penutupan diskotek Mille's ini berawal dari tertangkapnya seorang perwira polisi AKP Sunarto oleh Tim Paminsal Polres Jakarta Barat saat sedang mengonsumsikan narkoba jenis sabu di tempat hiburan malam tersebut.

Dari tangan oknum polisi yang menjabat sebagai Kasubnit II Ekonomi Sateintelkam Polres Metro Tangerang ini, polisi mengamankan dua butir pil ekstasi dan satu paket sabu sisa pakai.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Aspija) Gea Hermansyah mengatakan,



Petugas gabungan melakukan penyegelan Diskotek Mille's di kawasan Lokasari, Taman Sari, Jakarta Barat, kemarin. Penutupan dilakukan terkait persangkaan Kasubnit II Ekonomi Sateintelkam Polres Metro Tangerang AKP Sunarto oleh Paminsal Polres Metro Jakarta Barat karena membawa narkoba di diskotek tersebut. Petugas mendapatkan dua butir pil ekstasi dan satu paket sabu sisa pakai dari tangan Sunarto.

pemberian SP1 terhadap tempat hiburan sangat mengada-ada, selain karena tidak ada pegawai yang terlibat. Banyak pemilik tempat hiburan yang tidak bisa menjamin barang bawaan pengunjung.

Aspija sejauh ini sudah melakukan berbagai upaya agar tidak ada peredaran narkoba di tempat hiburan malam. Salah satunya menggeledah dan mengecek setiap tas yang dibawa pengunjung saat masuk ke tempat hiburan. "Masa kita harus memeriksa semua kantong celana dan baju pengunjung," keluhnya.

Sementara itu, 500 personel gabungan dari unsur TNI, Polri,

dan Satpol PP dikerahkan untuk menutup Mille's kemarin. Tidak ada perlawanan dalam penyegelan tersebut. Namun demikian, Humas Mille's, Yuki, sempat berteriak lantang menolak penyegelan. "Kalau terjadi kebakaran bagaimana? siapa yang mau bertanggung jawab barang-barang di sini?" teriak Yuki.

Yuki juga menolak menandatangani berkas surat penyegelan, bahkan meminta petugas tidak menutup paksa diskotek tersebut lantaran masih banyak barang-barang yang tersimpan di gedung.

Kasatpol PP DKI Jakarta Jupan Royter Tampubolon me-

ngatakan, pihaknya tidak akan segan-segan melakukan penyegelan paman jika masih ada diskotek yang melanggar aturan.

"Ini jadi warning juga bagi pemilik tempat hiburan lainnya. Untuk yang sudah mendapatkan surat peringatan pertama, jadi peringatan keras," kata Jupan saat memantau langsung proses penutupan.

Jupan menegaskan, tempat hiburan di Jakarta harus menaati Perda Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 90 yang menyebutkan bahwa Pemprov DKI Jakarta hanya memberikan kelonggaran bagi tempat hiburan hanya dua kali peringatan jika ter-

dapat kasus. "Tolong camkan. Kalau sudah dua kali, tutup. Kamitelah sepakat untuk menolak peredaran narkotika," tutupnya.

Pengamat sosial budaya Universitas Indonesia Devie Rahmawati menyambut baik upaya penutupan Mille's. Hal itu dilakukan untuk memberantas peredaran narkoba. "Akan lebih baik juga kalau masyarakat dilibatkan untuk meningkatkan pengawasan," kata Devie.

Menurut Devie, peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam hal ini, karena laporan masyarakat tentu saja akan mempercepat proses kerja apa-

rat. Setiap tindakan penutupan tersebut, diharapkan menjadi terapi kejut bagi para pedagang obat-obatan terlarang. Artinya, ini akan membuat para pedagang mengalami guncangan terus menerus," ungkapnya.

Devie juga setuju jangan sampai para pedagang ini merasa aman dan nyaman bertransaksi, sehingga perlu dilakukan upaya secara terus menerus dan simultan dengan tindakan-tindakan lain. "Agar para pedagang ini mengalami roller coaster psikologis. Ini semua demi menjamin kehidupan masyarakat yang damai dan tenteram," ucapnya.

yan yusuf/
r ratna purnama

Sikap MUI Tak Bertendensi Politik

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan netral dalam Pilkada DKI Jakarta. Reaksi keras MUI atas pernyataan Gubernur Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang mengutip ayat Alquran tidak bisa dilihat sebagai sikap politik.

Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin mengatakan, pernyataan MUI bahwa Ahok telah melakukan penistaan terhadap agama Islam dilakukan tanpa ada tekanan, intervensi atau pengaruh dari pihak mana pun. Maruf menekankan bahwa MUI tidak ikut poros manapun yang bertarung di Pilkada DKI.

Alih-alih memiliki tendensi politis, MUI menilai sikap tersebut merupakan sikap keagamaan yang harus disebarluaskan. "Ini dalam rangka menjag umat serta keutuhan bangsa dan negara. Itu menjadi tugas MUI," kata Maruf dalam konferensi pers di Kantor MUI Pusat, Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan, pernyataan MUI terkait Ahok yang mengutip Al Maidah 51 itu tidak bisa dibenarkan. Alasannya, Ahok dinilai tidak saksama dalam melakukan tafsir surat.

Kendati demikian, Ma'ruf mengatakan MUI tidak mel-

rang anggotanya untuk melakukan aktivitas demokrasi dengan mendukung calon tertentu.

"Orang boleh memilih mana saja. Di MUI ini kami warnanya banyak," ucap Ma'ruf. Warna yang dimaksudkan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut adalah anggota MUI memiliki latar belakang yang bermacam-macam, termasuk sikap politis.

Tentang permintaan maaf Ahok kepada umat Islam atas kesalahannya dalam mengutip Al Maidah 51, Ma'ruf mengatakan pihaknya sudah memaafkan mantan bupati Belitung Timur tersebut. Meski demikian, proses hukum di kepolisian terkait dengan dugaan penistaan agama akan tetap berlanjut.

Namun dia mengajak umat Islam untuk tidak merespons secara anarkis terkait penafsiran kontroversial Ahok terhadap



Ketua Umum MUI Pusat Maruf Amin (tengah) beserta jajaran pengurus MUI memberikan keterangan pers mengenai dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta kemarin.

ayat Alquran tersebut. Kendati demikian, dia tidak mencegah umat Islam untuk mengerahkan massa selama dalam koridor aman, tertib dan tidak anarkis.

Bagi Ma'ruf, MUI sudah menyerahkan persoalan dugaan penistaan agama itu kepada kepolisian dan tidak sampai melaporkan ke polisi dan menge-

luarkan fatwa. Pihak yang melaporkan Ahok ke polisi adalah ormas dan LSM. MUI hanya akan menunggu proses kasus itu di kepolisian.

Maruf juga mengakui telah bertemu dengan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin pada Rabu (12/10). Secara umum, kata dia, pemerintah mengapresiasi MUI

karena menyerahkan persoalan ini ke ranah hukum. "Menag juga menyampaikan apresiasi karena mengarahkan inkeja hukum tidak kepada jalur yang lain," ucap Ma'ruf Amin.

Wakil Seleksi MUI Tengku Zulkarnain menambahkan Alquran tidak boleh ditafsirkan secara serampangan. Di lain pihak, dia tidak setuju dengan

menyerahkan tafsir Alquran adalah hak prerogatif Allah saja. Dia mengatakan Alquran diturunkan untuk manusia sebagai petunjuk. Bagaimana dapat mengetahui kandungan kitab suci umat Islam jika tidak dapat menafsirkan Alquran.

"Kalau Alquran ditafsirkan Allah saja, maka untuk apa diturunkan?" kata dia.

Pernyataan Ahok yang dinilai menistakan Islam dilontarkan saat melakukan dialog dengan warga di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu. Saat itu dia mengutip ayat dari kitab suci Alquran yang dikaitkan dengan pilihan masyarakat di pilkada. Ahok telah meminta maaf kepada umat Islam atas pernyataan yang mengundang banyak kecaman tersebut.

Saat dikonfirmasi mengenai dirinya yang dilaporkan sejumlah pihak ke polisi, Ahok memperlakukan penegak hukum untuk memprosesnya. Menurutnya, Indonesia merupakan negara hukum dan penistaan agama ada undang-undangnya. "Kan ada undang-undangnya, iya kan? Silakan bagian hukum memproses," ujarnya singkat.

Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangsi Syarwi Chaniago,

meminta aparat penegak hukum tak berhenti memproses laporan terkait dugaan penistaan agama oleh Ahok.

Menurut Pangsi, penegakan hukum jangan sampai memandang tokoh atau jabatan seseorang. Sikap MUI yang mengeluarkan fatwa agar penegakan hukum tetap berjalan meski Ahok telah meminta maaf dinilai langkah yang tepat.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Ryamizad Ryacudu berharap pelaksanaan pilkada serentak 2017 tidak diwarnai isu negatif suku, agama, ras, dan antargolongan yang bisa berpotensi disintegrasi bangsa. "Tidak boleh *dong* (memunculkan isu SARA dalam pilkada)," kata Ryamizad di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan masyarakat Indonesia sudah dewasa dalam menghadapi perbedaan sehingga keragaman harus dimaknai sebagai keniscayaan bagi bangsa Indonesia. Menurut dia, sesama anak bangsa dalam kontestasi pilkada seharusnya menunjukkan keunggulannya dalam memajukan daerahnya, bukan dengan menampilkan SARA di setiap kampanyenya.

• bima setiyadi/
okezone/ant

Calon Gencar Sosialisasi ke Warga

JAKARTA – Calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta gencar menyosialisasikan diri ke masyarakat. Mereka pada umumnya fokus pada pembangunan Ibu Kota.

Seperti yang dilakukan cawagub Sylvia Murni dengan menghadiri talkshow "Jakarta Menuju Ibu Kota Ramah Perempuan dan Anak" di Graha Gusdur, DPP PKB, Raden Saleh, Senen, Jakarta Pusat, kemarin. Dalam kesempatan itu, Sylvia menyindir Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang jarang turun ke lapangan. Inilah yang membuat pembangunan di DKI menjadi tidak sempurna. "Apalagi Ahok suka sekali mendeatangi proyek saat peletakan batu pertama dan peresmian, padahal dua kegiatan itu APBD DKI akan terbangun sia-sia lantaran acara seremoni membutuhkan dana yang tidak sedikit," katanya.

Menurut mantan wali kota Jakarta Pusat itu, sebagai seorang pemimpin, menjadi hal yang wajib untuk turun langsung ke lapangan. Inilah yang tidak dilakukan gubernur saat ini. Gubernur hanya memantau dari jauh sehingga kualitas proyek kerap kecolongan. "Sejak

menjabat posisi *leader*, termasuk saat jadi wali kota, saya selalu usahakan sidak dadakan. Membawa ahli bangunan untuk mengecek spesifikasi proyek yang ada," ujarnya.

Jika memimpin DKI nanti, dia akan berkolaborasi dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu bakal tegas melakukan manajemen ke bawah. Sementara Sylvia bertugas mengawasi sejumlah proyek yang ada. Pasangan Agus-Sylvia ini diusung Partai Demokrat, PPP, PAN, dan PKB atau dikenal koalisi Cikeas.

Sylvia juga mengklaim cukup hafal dengan permasalahan di Jakarta, mulai masalah sosial, ekonomi, hingga transportasi, termasuk menyediakan sarana dan pelayanan publik maksimal terhadap rakyat. Pasalnya, dia percaya diri dengan pengalamannya membuat Jakarta lebih baik.

Pasangan cagub Anies Bas-



wedan-Sandiaga Uno yang diusung Partai Gerindra dan PKS ini juga rutin berkunjung ke berbagai lapisan masyarakat. Menurut cawagub Sandiaga Uno, terjadi ketidakmerataan pembangunan di Jakarta. Karena itu, untuk menyelesaikan pembangunan, dia turun langsung ke lapangan demi menyerap aspirasi masyarakat. Tak tanggung-tanggung, Sandiaga menggelontorkan dana pribadi Rp29,3 miliar yang sebagian besar digunakan untuk mengunjungi 267 kelurahan dan 44 kecamatan.

Menurut dia, Rp29,3 miliar yang dikeluarkan dari kantong

pribadinya itu bagian dari perjuangannya untuk membawa Jakarta menjadi lebih baik. Jika menjabat, dia tidak akan berupaya mengembalikan modal puluhan miliar tersebut. Bahkan, dia bakal menyumbangkan semua gajinya dan mencoba terus terbuka terhadap setiap pemasukan. "Saya siap transparan tanpa ada yang dilebihkan atau dikurangi sedikit pun. Hal ini sudah komitmen saya sejak awal," ujarnya.

Dia mengatakan, keterbukaan soal pendanaan bertujuan menciptakan situasi demokrasi yang baru. "Ini adalah positif untuk membangun demokrasi

yang lebih dewasa. Kita perlu transparansi guna menjaga demokrasi yang sehat. Para kandidat-kandidat lain diharapkan melakukan transparansi ini," ungkapnya.

Mengenai pembangunan Ibu Kota, cawagub Djarot Saiful Hidayat justru lebih banyak berkeliling Jakarta untuk memastikan program-programnya berjalan atau tidak. Kemudian, dia menghadiri seminar-seminar terkait Pilkada DKI 2017. "Pembangunan Jakarta tidak boleh sepotong-sepotong, itu harus tuntas," kata politikus PDIP itu.

Untuk kemajuan pemba-



Cagub DKI Anies Baswedan (tengah) berbincang dengan warga di Kampung Magesen, Manggarai, Jakarta Selatan, Minggu (9/10). Kedatangan Anies untuk menyerap aspirasi masyarakat seperti permasalahan di Jakarta (foto atas kiri). Cawagub DKI Sylvia Murni menghadiri talkshow "Jakarta Menuju Ibu Kota Ramah Perempuan dan Anak" di Graha Gusdur, DPP PKB, Raden Saleh, Senen, Jakarta Pusat, kemarin. Dia menyindir Ahok yang jarang turun ke lapangan untuk memantau progres pembangunan (foto kanan). Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat bermain bersama anak-anak di lapangan untuk memantau progres pembangunan (foto kanan). Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat bermain bersama anak-anak di lapangan untuk memantau progres pembangunan (foto kanan). Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat bermain bersama anak-anak di lapangan untuk memantau progres pembangunan (foto kanan). Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat bermain bersama anak-anak di lapangan untuk memantau progres pembangunan (foto kanan).

ngunan di DKI, pasangan cagub Ahok-Djarot pun menyempatkan bersilataturahmi dengan mantan Presiden BJ Habibie. Menurut Ahok, BJ Habibie menyampaikan beberapa pesan, saran, dan masukan agar pembangunan Jakarta ke depannya lebih baik dan tertata.

Di bagian lain, Ahok mengatakan saat ini lebih banyak menerima kedatangan tokoh-tokoh politik yang telah mendukungnya, mulai Ketua Umum PPP Djan Fardiz hingga salah satu juru bicarannya, Sophia Latjuba. "Ya, namanya teman, silakan saja datang. Ngobrol biasa saja. Ada politik juga, ya

dukungan saja," ujar petahana.

Sophia Latjuba yang keluar dari ruangan kerja Ahok menuturkan, kedatangannya ini hanya untuk mengenal lebih dekat dengan Ahok, khususnya program-programnya. Menurut dia, strategi pemenangan belum dibicarakan secara detail. "Sebagai jubiir harus kenal dengan Pak Ahok, bagaimana kerjanya dan sebagai pribadi bagaimana orangnya gitu, jadi tadi hanya informal saja, enggak ada yang detail-detail. Kita harus sejalan sehat," ucapnya.

@yan yusuf/ bima setiyadi

Lautan Massa Protes Ahok



Ribuan orang menggelar longmarch dari Masjid Istiqlal menuju Kantor Bareskrim dan Balai Kota DKI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambar, Jakarta Pusat, kemarin. Dalam aksinya mereka meminta kepolisian memproses dan mengulot Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait pernyataannya yang berbau SARA beberapa waktu lalu.

JAKARTA - Ribuan orang menggelar aksi unjuk rasa memprotes Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dinilai menyinggung perasaan umat beragama.

Meski berlangsung damai, namun aksi tersebut membuat arus lalu lintas di kawasan Monas, Jakarta Pusat nyaris lumpuh.

Pantauan KORAN SINDO, sebelum berunjuk rasa ribuan orang yang tergabung dari berbagai organisasi massa (ormas) berkumpul di Masjid Istiqlal, untuk melaksanakan Salat Jumat. Kemudian, massa melakukan long march ke Kantor Bareskrim Mabes Polri dan Balai Kota DKI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Banyaknya pengunjung rasa dalam aksi tersebut membuat arus lalu lintas di sekitaran Monas harus ditutup. Di antaranya, Jalan Ridwan Rais dari arah Tugu Tani maupun dari arah Kantor Pusat Pertamina. Penutupan juga dilakukan di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah menuturkan kemacetan akibat demonstrasi

di Balai Kota DKI Jakarta kemarin terjadi sekitar pukul 15.00 WIB-16.00 WIB. Sebab, sejak pukul 13.00-15.00 WIB, massa melakukan long march.

Adapun titik kemacetan yakni di kawasan Masjid Istiqlal, Gereja Katedral, Lapangan Banteng Utara, Stasiun Gambar, Jalan Medan Merdeka Timur dan Medan Merdeka Selatan (Balai Kota DKI). Selain itu, Cawang-MT Haryono, Ottista-Jatinegara-Matraman Raya-Salemba Raya, Cempaka Putih-Letjen Suprpto, Senen Raya-Pejambon.

"Nah ketika seluruh massa berkumpul depan Balai Kota, kemacetan tidak bisa dihindari. Kami bersama kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas dengan menutup ruas jalan yang mengarah ke Balai Kota," kata Andri di Balai Kota DKI Jakarta kemarin.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Awi Setiyono menegaskan, aksi demonstrasi yang terpusat di depan Balai

Kota DKI Jakarta kemarin dihadiri oleh 6.000 orang. Penanganan persuasif dari Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan bersama Pangdam Jaya Mayjen Teddy Lhaksamana yang turun langsung ke lapangan membuat aksi demonstrasi kondusif. "Anggota yang diterjunkan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa sekitar 3.592 personel. Kami hanya konsentrasi untuk pengamanan. Kasusnya sendiri ditangani Mabes Polri," ungkapnya.

Awi mengakui kemacetan yang terjadi akibat demonstrasi tersebut tidak bisa dihindarkan. Sebab, ruas jalan menuju ke Balai Kota ditutup. Pengendara dari arah kawasan Senen diputar ke Tugu Tani lalu ke Jalan Wahid Hasyim. Begitu juga pengguna jalan dari arah Medan Merdeka Barat diputar ke arah Stasiun Gambar.

Sementara itu, Gubernur Ahok enggan mengomentari demonstrasi yang dihadiri ribuan umat Islam dan membuat macet ruas jalan tempat kerjanya. Dia menilai para demonstran tidak mau dirinya mengikuti Pilkada DKI 2017. Sebab, sebagian orang dari gerakan-gerakan itu sebelumnya telah menyeret-nyeret kasus RS Sumber Waras,

reklamasi dan sebagainya. Mantan Bupati Belitang Timur itu berstikeras tidak pernah berniat menghina Alquran atau menghina Islam.

"Tahap awal pemeriksaan saksi sudah dilakukan dan juga kewarga masyarakat Kepulauan Seribu yang saat itu hadir. Jadi proses penyelidikan dan pemeriksaan saksi sedang berjalan."

IRJEN POL BOY RAFLI AMAR
Kadiv Humas Mabes Polri

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar menegaskan, video pernyataan Ahok mengenai isi Alquran yang dianggap sebagai penistaan agama akan diselidiki. "Penanganan kasus laporan dugaan adanya penistaan agama yang telah dilaporkan pada

Bareskrim sejauh ini proses masih berjalan," ungkapnya.

Boy menyebutkan, sudah ada lima saksi yang sudah diperiksa termasuk isi rekaman video pidato Ahok di Kepulauan Seribu pada Maret 2016 lalu. Penyidik juga berupaya melakukan pemeriksaan secara forensik video tersebut. Mantan Kapolda Banten ini membantah pihak-pihak yang menyebut bahwa pelaporan tersebut tidak diproses. Menurutnya, polisi tetap melakukan pemeriksaan atas kasus tersebut sesuai prosedur yang berlaku.

"Kalau ada kata-kata yang bilang tidak diproses itu tidak benar. Jadi proses hukum terhadap laporan yang disampaikan kepada pihak penyidik ataupun sentra pelayanan terpadu baik Polda Metro dan Bareskrim itu semua ditangani Bareskrim dan sedang berproses," jelas Boy.

Disinggung soal pemeriksaan terhadap terlapor, Boy mengaku, sejauh ini pemeriksaan belum pada terlapor. Sejuah ini penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti minimal dua alat bukti. "Tahap awal pemeriksaan saksi sudah dilakukan dan juga ke warga Kepulauan Seribu yang saat itu hadir. Jadi

proses penyelidikan dan pemeriksaan saksi sedang berjalan," tegasnya.

Kabareskrim Komjen Pol Ari Dono yang menemui ribuan pengunjung rasa di depan Kantor Bareskrim Mabes Polri menegaskan, akan memeriksa Ahok. "Kami sudah menerima laporan dari saudara kita dan sudah memeriksa saksi-saksi sesuai dengan aturan hukum. Selanjutnya dengan diminta saudara kami akan memeriksa Ahok," ungkapnya.

Ari mengatakan pihaknya bekerja secara profesional mengikuti aturan hukum yang berlaku. "Kami imbu pada masa agar mematuhi juga proses hukum, Pak Ahok juga pasti ada pengacara dan harus kita hormati. Jika bukti dan saksi mencukupi untuk diperiksa, pasti kami lakukan sesuai koridor," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab sebagai pemimpin aksi demonstrasi mengatakan, telah membentuk delegasi agama untuk mengawal Kabareskrim menangani kasus dugaan penistaan agama ini.

"Delegasi ulama sudah dibentuk untuk mengonfirmasi ulang dan menanyakan sampai sejauh mana proses yang ber-

jalan. Nah, kalau prosesnya berjalan kita ikuti. Andaikata tidak berjalan, Jumat yang kedua kami akan menghadap Kapolri, kami minta komitmen Kapolri memproses persoalan ini," tegasnya.

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Hurriyah menilai dalam negara demokrasi, aksi unjuk rasa adalah hal yang wajar sebagai salah satu bentuk ekspresi kebebasan berpendapat sepanjang aksinya tidak anarkis. "Menurut saya tidak ada yang salah dengan demo itu," katanya.

Begitu pula dengan tuntutan hukum yang disampaikan. Menurut Hurriyah, sah-sah saja sekelompok masyarakat ataupun sekumpulan organisasi masyarakat (ormas) mengajukan tuntutan lewat demonstrasi atau menyampaikan pengaduan kepada polisi ketika merasa dirugikan dan ada pelanggaran hukum. "Tapi bukan berarti tekanan publik menjadi alasan untuk dilakukannya tuntutan hukum," ungkapnya.

Menurut dia, sudah menjadi tugas kepolisian untuk menindaklanjuti pengaduan perkara dari masyarakat.

**@ bima.setiyadi/
binti.mafarida/
r.ratna.purnama**

Cagub-Cawagub Adu Program untuk Rakyat

JAKARTA - Pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta mempresentasikan program untuk rakyat jika terpilih nanti. Mereka terus berupaya menggaet hati rakyat Jakarta.

Cawagub Sandiaga Uno yang datang ke Meruya Utara, Jakarta Barat, kemarin diberondong pertanyaan mengenai program-programnya. Sandiaga berjanji akan memprioritaskan warga kecil dalam pembangunan. Dia bersama cagub Anies Baswedan telah sepakat menyelesaikan masalah dari akarnya. Artinya aspirasi masyarakat yang dijarah dengan turun langsung ke lapangan harus segera diselesaikan melalui berbagai programnya jika diberi amanat oleh warga menjadi pemimpin DKI Jakarta periode 2017-2022.

"Sebagian program besar yang kami susun berasal dari aspirasi warga. Saya sudah mengunjungi 267 kelurahan. Saya akan fokus pada ekonomi dan infrastruktur. Adapun Pak Anies *concern* pada bidang pendidikan dan membangun jiwa warga," ujar Sandiaga kemarin.

Dalam setiap kali bersosialisasi, warga selalu bertanya soal program yang berpihak terhadap warga. Menurutnya, dengan empat K, yakni kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas, segala program yang dijanjikan akan mudah terwujud. Dia juga berjanji tidak akan menghilangkan program yang sudah ada seperti petugas prasarana dan sarana umum (PPSU). Dia justru akan meningkatkan kesejahteraannya.

Terpenting para pekerja dapat bekerja ikhlas.

"Pak Anies akan memajukan pendidikan mulai dari usia dini. Tenaga pengajar akan diperhatikan kesejahteraannya. RT-RW pekerja sosial bukan pejabat negara harus difungsikan sebagaimana mestinya. Saya akan menciptakan lapangan pekerjaan di setiap kecamatan. Nantinya warga tidak lagi mencari kerja, tapi menciptakan," paparnya.

Pasangan Anies-Sandiaga saat ini juga didukung mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja. Proses penawaran Adnan untuk masuk menjadi tim pemenang Anies-Sandiaga dimulai sejak pekan lalu. "Mereka berdua orang baik dan santun. Itu saya suka," katanya. Atas dasar itulah dia merasa cocok dengan karakter kepemimpinan Anies-Sandiaga.

Menurut dia, hanya pasangan ini yang sudah terbukti memiliki karakter santun dalam berpolitik. Kesantunan tersebut dibarengi dengan integritas yang tinggi. Adnan mengaku akan membantu Anies-Sandiaga sesuai dengan bidangnya, yakni pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Kemarin Anies-Sandiaga meresmikan posko relawan di Pengajian KH Abdul Rosyid As Syafiyah, Bali Matraman,

Tebet, Jakarta Selatan. Anies yang meresmikan langsung posko tersebut. "Kita menentukan pilihan bukan sekadar nama orang. Kita tadi mendengarkan harapan dari para ulama. Kita juga sudah mendengar harapan dari seluruh masyarakat," ujar Anies.

"Pak Anies akan memajukan pendidikan mulai dari usia dini. Tenaga pengajar akan diperhatikan kesejahteraannya. Saya akan menciptakan lapangan pekerjaan di setiap kecamatan."

SANDIAGA UNO
Cawagub DKI Jakarta

Anies bersama Sandiaga ingin selalu hadir di tengah-tengah masyarakat Jakarta. Bahkan dia mengharapkan dapat memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi warga Ibu Kota. Dia mengajak masyarakat untuk berkampanye damai secara beradab. "Jakarta pusat perekonomian dan menjadisorotan. Mengubah Jakarta adalah ikhtiar kita," ucap cagub yang diusung Partai Gerindra dan PKS ini.

Pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni

juga gencar bersosialisasi dengan turun langsung ke warga dan kerap mendapatkan pertanyaan mulai dari program kesejahteraan pendidikan anak usia dini, penataan permukiman sampai penataan pedagang kaki lima (PKL).

Cagub Agus Harimurti Yudhoyono memastikan akan melanjutkan program-program yang prorakyat. Tidak menutup kemungkinan program-program yang telah dijalankan Pemprov DKI selama ini akan dilanjutkan. "Akan melanjutkan program yang prorakyat. Jangan khawatir kalau saya terpilih saya orang yang rasional. Malah akan kita perbaiki," ujarnya.

Untuk merealisasi program tersebut, dia mengajak warga DKI bekerja keras membuat suatu perubahan yang mengarah pada Jakarta yang lebih baik. Menurut dia, tidak ada sesuatu yang baik dicapai tanpa kerja keras. Pasangan Agus-Sylviana ini diusung Partai Demokrat, PPP, PKB, dan PAN.

Cawagub Djarot Saiful Hidayat mengatakan, apa yang sudah dilakukan dirinya bersama cagub Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah terbukti dan akan terus dikembangkan. "Kami persilakan warga untuk memilih sesuai dengan keyakinannya," ujar politikus PDIP itu.

Menurut dia, membangun Jakarta membutuhkan waktu selama 15 tahun. Dia berharap agar dukungan kepada petahana terus mengalir agar dapat membantu menjadikan Ibu Kota yang setara dengan negara majulainnya.

● **bima setiyadi**



Cagub DKI Jakarta Anies Baswedan menyapa warga saat blusukan di Kampung Waru Doyong, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, kemarin (foto atas). Cagub DKI Agus Harimurti Yudhoyono bersalaman dengan warga saat menghadiri Deklarasi Barisan Teman Agus-Sylvi (BATAAS) di Jakarta (foto tengah). Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bersama warga dan petugas PPSU melakukan kerja bakti di Kramat Jati, Jakarta Timur (foto bawah).

Ratusan Gedung di Kawasan Jakarta Tidak Aman



TERANCAM DIROBOHKAN

Merespons pembongkaran Gedung Bank Panin di Bintaro, Tangsel, Pemprov DKI Jakarta segera menyelesaikan audit gedung-gedung mangkrak di Ibu Kota. Jika tidak ada kejelasan dari pemilik, Pemprov mengancam bakal merobohkan.

Beberapa Fakta Gedung Tinggi di Jakarta

13 Pencakar Langit (ketinggian di atas 200 meter, terhitung hingga akhir 2015)

± 700 (gedung 8 lantai atau lebih)

175 (25%) (merupakan gedung terbelengkal)

Krisis Moneter (kebanyakan gedung terbelengkal karena proses pembangunan terhenti akibat krisis moneter 1998)

Beberapa Gedung Mangkrak/Berbahaya

- Gedung BDN1 Jalan Sudirman (Jakpus)
- Apartemen di Kemanggis (Jakbar)
- Parkiran bawah tanah TIM (Jakpus)
- Menara Jakarta, Kemayoran (Jakpus)
- Menara Saidah (Jakarta Timur)
- Kuningan Persada (Jaksel)

Alasan Gedung Dirobuhkan

- Membahayakan karena berpotensi roboh sewaktu-waktu.
- Demi keindahan/estetika kota



Dinas tata kota lagi mengaudit yang membahayakan. Kemudian sudah diberikan surat peringatan kepada yang bersangkutan. Kalau enggak, ya kami robohkan.

DIJAROT SAIFUL HIDAYAT Wagub DKI Jakarta

Sumber: Litbang KORAN SINDO, berbagai sumber, dilah



KORAN SINDO/ANDREAS WINTER

Ratusan Gedung di Kawasan Jakarta Tidak Aman

((dari Hal 1

Menurut Nirwono, audit bangunan gedung itu bertujuan untuk melindungi pekerja dan warga sekitar gedung dari bahaya yang terjadi. Artinya, wajib bagi Pemprov DKI, dalam hal ini DPK, untuk menyampaikan hasil audit terhadap kondisi gedung kepada pengelolanya. Apabila pengelola dalam tenggat waktu yang diberikan tetap enggan memperbaiki, DPK sebaiknya segera mengumumkannya ke publik dan mengambil tindakan selanjutnya. Contoh penerapan kebijakan ini adalah Menara Saidah yang sudah lama dibiarkan terbelengkal.

Pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menilai terbelengkalnya bangunan tak lepas dari lemahnya pengawasan DPK. Ini berakibat banyak bangunan gedung dan ruko dibiarkan terbelengkal. Selain mengancam warga sekitar, lanjut Yayat, mangkraknya bangunan juga mengindikasikan lemahnya penindakan di saat DKI gencar menertibkan sejumlah kawasan. Padahal, bila dikelola dengan baik, sangat mungkin bangunan itu bisa dimanfaatkan kembali. "Kalau perlu diambil alih, percantik, lalu sewakan ke swasta agar terawat," katanya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa pemerintah siap mengambil alih gedung mangkrak, termasuk Menara Saidah, jika tak ada kejelasan penanganannya. Kondisi gedung yang tak terawat sangat menganggu dan membahayakan lingkungan. "Saidah itu sudah sengketar ramai dan katanya miring. Waktu itu kami undang Dinas Penataan Kota, katanya konstruksinya masih oke. Tapi enggak dimanfaatkan, akhirnya jadi rumah hantu. Kalau masalah gedung seperti itu se-



(foto atas) Pekerja beristirahat saat proses perobohan Gedung Bank Panin di Bintaro Sektor 7, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (16/10) dini hari. (foto kiri bawah) Menara Saidah setinggi 21 lantai yang tidak berfungsi di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Kemarin. Apartemen Central di Kemanggis, Jakarta Barat yang tertunda pembangunannya.

JAKARTA—Para pekerja yang beraktivitas di gedung-gedung tinggi di DKI Jakarta patut waspada. Saat ini diperkirakan ada seratus lebih gedung perkantoran di Ibu Kota yang masuk kategori berbahaya.

Lemahnya pengawasan dan tidak adanya audit gedung secara berkala oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selama ini membuat tingkat keamanan seperti peralatan antisipasi kebakaran, banjir, dan gempa bumi, beberapa gedung di wilayah Jakarta Utara diperkirakan mengalami penurunan muka tanah sekitar 9 cm per tahun.

Beberapa gedung tinggi yang mangkrak seperti Menara Saidah di Jalan MT Haryono dan apartemen di Kemanggis, Jakarta Barat, juga menambah lemahnya jaminan keamanan dan keselamatan terhadap warga sekitar. Pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mendesak Pemprov DKI Jakarta mengaudit seluruh gedung yang ada saat ini. Gedung di kawasan Sudirman-Thamrin, Gatot Subroto, MT

Haryono, dan Kuningan rata-rata berusia lebih dari 20 tahun. "Bahaya atau tidak itu harus diaudit dulu. Sampai saat ini sebagian besar pekerja di gedung sendiri tidak tahu. Dinas Penataan Kota (DPK) belum melakukan audit," kata Nirwono.

Audit gedung adalah sebuah keharusan. Ini juga merujuk amanat dari Undang-Undang Nomor 28/2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 7/2010 tentang Bangunan Gedung. (Hal 15)

Silakan komentar headline ini di @MNCKaransindo dengan hashtag #GedungBahaya

benarnya bisa kita manfaatkan," ujar Jarot.

Pada Februari lalu Jarot mengakui Pemprov belum pernah mengaudit gedung-gedung yang ada di seluruh Jakarta. Meski demikian, dari pemantauan yang langsung dilapangan, setidaknya ada 25% bangunan di Jakarta yang masuk kategori tak aman. Total gedung tinggi di seluruh wilayah Jakarta saat ini diperkirakan mencapai 700 hingga 900 bangunan.

Anggota Komisi DPRD DKI Jakarta Rikardo berjanji segera memanggil DPK untuk meminta penjelasan kondisi gedung-gedung di Jakarta. Wakil rakyat juga akan mengkritik proses perizinannya. Sebab, diduga banyak bangunan baru di Jakarta yang tidak memperhatikan analisis dampak lingkungan (amdal). Akibatnya, daerah sekitar gedung kerap mengalami banjir. Kasus seperti itu terjadi di kawasan Cawang, Jakarta Timur, misalnya.

"Selama ini Dinas Penataan Kota hanya menjelaskan rencana-rencana pembongkaran. Tapi tidak menjelaskan pemeliharaan dan persyaratannya. Saya kemarin lewat Cawang, banjir sampai setengah meter. Dulu sebelum ada gedung baru sekitar situ tidak pernah banjir," ujarnya.

Politikus PDIP itu juga meminta agar DPK segera menghancurkan gedung-gedung yang tidak dihuni seperti Menara Saidah jika memang tidak bisa dinikmati.

Dia berharap Pemprov DKI tidak bertindak ketika gedung telah runtuh seperti yang terjadi di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan (Tangsel). "Dinas Penataan Kota komputasinya arsip. Dilihat lagi saja, mana gedung yang sudah tua. Cek ke lapangan dan segera ambil tindakan bila hasilnya membahayakan," ujar Rikardo.

Bahayakan Warga

Dari pantauan KORAN SINDO di Menara Saidah Jalan MT Haryono, kesan tak terawat nyaris tak terlihat jika diamati dari jauh. Namun bila memasuki pagar, kesan horor dan mencekam sungguh terasa berada di gedung berlantai 30 tersebut. Dari dalam menara bersar-sar Romawi ini terlihat mengkhawatirkan. Kondisi gedung yang miring terlihat jelas, lampu-lampu gedung sudah tak berfungsi, rerumputan maupun tanaman liar setinggi 1 meter lebih banyak terdapat di halaman dan lahan parkir.

Aspal jalan menuju menara juga sudah banyak yang pecah. Taman-taman tak terawat. Tembok gedung yang dilapisi marmer terlihat kusam dan beberapa di antaranya berlubang. Tak adanya penerangan dari dalam gedung membuat suasana gedung tampak mencekam. Penerangan hanya terlihat dari lampu-lampu senter yang berasal dari milik penjaga. Sementara lampu yang ada di gedung, sudah banyak hilang. "Sudah lama hilangnya, saya juga tidak tahu. Saya cuma berjanji di sini," tutur Rizki, 36, penjaga Menara Saidah, Minggu (16/10) lalu.

Seorang warga sekitar, Yanto, 36, mengaku tidak ingat siapa kapang gedung itu tak beroperasi. "Mungkin sejak 2007-an, kalau enggak salah," tuturnya.

Meski demikian, dulu gedung ini cukup ramai aktivitas. Bahkan pada periode 1990-an hingga awal 2000-an gedung ini sempat menjadi "markas" bagi jamaah yang hendak berhaji dari Jakarta.

Selain Menara Saidah, gedung tak terawat juga ada di kawasan Jalan Gili Sempeng, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kawasan itu tercatat dua gedung dengan 20 lantai milik pe-

ngembang apartemen Centro Kemanggis tak terawat. "Sudah hampir tiga tahunan," tutur Razi, 65, salah satu pedagang kelontong kawasan itu.

Bangunan itu kesannya juga sangat mengkhawatirkan. Tahanan liar memenuhi seisi bangunan dengan tinggi nyaris 2 meter. Beberapa material bangunan seperti pasir, batako, hingga fondasi ruangan terlihat ditaruh seadanya. Belum ada pemasangan listrik, namun kondisi bangunan retak nyaris terlihat di beberapa tembok. Sementara di atas bangunan, besi-besi balkon terlihat miring dan sewaktu waktu dapat jatuh membahayakan penjaga yang sesekali melakukan patroli.

Komandan regu penjaga gedung itu, Dedi, 40, mengatakan hampir setahun terakhir dia bersama 12 orang bekerja menjaga keamanan kawasan itu. "Kami memastikan kawasan itu aman," tuturnya.

Reni, 48, warga sekitar, menyanggah tak dilanjutkannya pembangunan apartemen tersebut karena bangunan yang sudah ada sekarang terancam roboh dan menimpa rumah-rumah yang hanya dibatasi tembok.

Beberapa bangunan rusunawa di Tambora, rusunawa di Kompleks Kebersihan, dan rusunawa di Muara Baru juga tampak tak terawat.

Kepala Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Gedung Dinas Penataan Kota DKI Jakarta Budi Widianto memastikan tidak ada gedung di Jakarta yang rawan roboh, terkecuali terkena bencana alam yang begitu besar.

Sebab, kata Budi, selama bangunan itu sudah berdiri di atas delapan lantai, konstruksinya sudah cukup memenuhi syarat. Ini juga berlaku pada gedung-gedung yang tak lagi dipakai. "Menara Saidah itu sudah ada kajannya. Kemungkinan roboh ge-

dung di Jakarta itu kecil," kata Budi di kantor Dinas Penataan Kota DKI Jakarta kemarin.

Budi menjelaskan, untuk mengawasi gedung di Jakarta, dimasnya berpatakan pada lima tahun masa berlakunya sertifikasi layak fungsi (SLF). Artinya, setiap kali SLF gedung habis, Dinas Penataan Kota akan mengecek dan merekomendasikan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (TPSP) sebagai pihak yang mengeluarkan STP.

Setiap tahun ada 50-60 gedung yang masa berlakunya habis STP-nya dan telah diperpanjang. Sejahtu ini, kata dia, dalam pengawasan setiap kali STP diperpanjang, tidak ada satu pun yang tidak layak fungsi. "Meskipun gedung itu berusia 20 tahun atau mengalami penurunan muka tanah, tetap masih layak," jalminya.

Terkait gedung mangkrak atau terbelengkal, Budi menegaskan tidak memiliki jumlah pastinya lantaran DPK sendiri baru dibentuk pada 2015.

Sementara itu, sejak dirutuhkan pada Jumat (14/10) Gedung Bank Panin di Bintaro, Sektor 7, Kota Tangsel, belum juga roboh hingga kemarin. Pihak kontraktor, PT Wahana Infonusa, akan kembali menimbun pasir di atas gedung tersebut untuk menambah 400 ton. "Hingga saat ini sudah ada 180 ton di atas sana, kami akan membebaninya hingga 400 ton," ujar Ari Yudhanto, Project Manager PT Wahana Infonusa yang ditunjuk Bank Panin sebagai perusahaan yang melakukan peruntukan gedung tersebut.

Peruntukan gedung itu menggunakan metode dinamis. Artinya, selain membebaninya dengan pasir, akan digunakan juga penarik beton yang ada di bagian paling atas gedung.

© yan yusuf/bima setiyadi/dennyirawan

Pertarungan Artis di Pilkada DKI Jakarta

MAGNET SELEBRITAS

Di tengah kerasnya persaingan Pilkada DKI Jakarta, sejumlah selebritas muncul sebagai magnet pendulang suara. Kehadiran para bintang diyakini akan memberikan pengaruh besar untuk menarik dukungan massa.

SOPHIA LATJUBA
Juru bicara pasangan Ahok-Djarot Saiful Hidayat

ANNISA POHAN
Istri cagub Agus Harimurti Yudhoyono.

OLLA RAMLAN
Pernah diminta cawagub Sandiaga Uno untuk bergabung dalam tim kampanye. Namun Olla belum memutuskan.

AHOK-DJAROT
Ketua Tim sukses : Prasetio Edi Marsudi (PDIP)
Artis mendukung : Maia Estianty, Sandra Dewi
Parpol pengusung :

AGUS-SYLVY
Ketua Tim sukses : Nachrowi Ramli (Partai Demokrat)
Artis mendukung : Eko Purnomo, Dessy Ratnasari
Parpol pengusung :

ANIES-SANDI
Ketua tim sukses : Mardani Ali Sera (PKS)
Artis mendukung : Pandji P (Jubir), Glen Fredly
Parpol pengusung :



PILKADA DKI JAKARTA
Pemungutan suara : 15 Februari 2017
Daftar Pemilih Tetap : 6.983.692 pemilih
2017 : Ditetapkan Desember 2016

Sumber: Litbang KORAN SINDO

JAKARTA – Pilkada DKI Jakarta 2017 bukan melulu cerita tentang pertarungan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Agus Harimurti Yudhoyono, Anies Baswedan, beserta pasangan masing-masing. Pertarungan juga melibatkan tim kampanye mereka, termasuk di dalamnya sejumlah artis cantik yang menempati posisi penting dalam tim. Sejahter munculan beberapa nama yang melekat pada masing-masing kandidat. Di tim Ahok yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat, munculan nama Sophia Latjuba. Dia bahkan sudah didapuk menjabat posisi yang sangat

strategis, yakni sebagai juru bicara. Belakangan dia terlihat intens mendampingi Ahok turun ke lapangan. Apalagi Annisa Pohan. Artis dan presenter ini hampir selalu mewarnai kemunculan Agus Yudhoyono yang tak lain suaminya sendiri. Dia memperlihatkan semangatnya mendampingi sang suami, terutama pada momen bertatap muka dengan publik. Sementara di pihak Anies Baswedan-Sandiaga Uno, munculan Olla Ramlan sebagai lawan yang mendukung kemenangan pasangan tersebut. Keberadaan artis-artis cantik ter-

sebut tentu diharapkan bisa menjadi daya tarik publik sekaligus *votegetter* untuk kandidat. Hal ini diakui oleh elite tim kampanye. Ketua Bidang Media Tim Pemenangan pasangan Ahok-Djarot, Martin Manurung, misalnya, mengaku parhainya, mengukuhkan Sophia masuk tim kemenangan dengan harapan membawa keuntungan bagi Ahok-Djarot. Dalam pandangannya, Sophia memiliki kemampuan menarik orang-orang nonpolitik untuk mendukung Ahok. Termasuk mengajak artis lainnya untuk sama-sama peduli dengan ke-

lanjutan pembangunan DKI Jakarta. "Sophia tentu memiliki *appeal* ke kelompok-kelompok masyarakat yang belum tersentuh oleh partai. Kami yakin sosok Sophia mampu membawa itu," kata Martin di Jakarta kemarin. Ketua Tim Pemenangan Agus Yudhoyono-Sylviana Murni, Eko Hendro Purnomo, meyakini kehadiran Annisa akan berpengaruh positif pada Agus. "Ada yang bilang bahwa hebatnya seorang suami karena di belakang ada istri yang hebat. Apa pun kami lakukan agar dekat dengan masyarakat," ujarnya.

Ke Hal 15

FOTO: FOTO DOK KORAN SINDO

KORAN SINDO/BOSSIE

Pertarungan Artis di Pilkada DKI Jakarta

((dari Hal 1

Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandiaga, Mardani Ali, mengakui pihaknya menggunakan artis untuk menarik simpati publik. Namun, untuk posisi seperti dimainkan Sophia, pihaknya menggunakan Panji Pragiwaksono, sedangkan Olla Ramlan belum masuk tim, namun hanya sebatas relawan.

"Relawan Sandi masuk saya tim sukses. Tapi karena relawan di tim sukses perwakilan saja. Sosok seperti Sophia Latjuba di tim diperankan Panji Pragiwo Stand Up Comedy. Dia salah satu yang diusulkan menjadi jubiir," ujarnya.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan bahwa hasil survei kedai kopi yang bisa dilihat dalam laman www.kedaikopi.co, hanya 1% dari warga Jakarta yang terpengaruh selebritas. "Sedangkan 76% lainnya menyatakan pilihan politik adalah pilihan sendiri," ujarnya.

Intens Mendampingi

Kehadiran para artis cantik tersebut mendapat perhatian karena mereka menunjukkan intensitasnya mendampingi kandidat dalam sejumlah momen acara. Sophia, misalnya. Setelah ditunjuk menjadi juru bicara tim kampanye Ahok-Sai-ful, dia terlihat beberapa kali menemui Ahok di Balai Kota. Bahkan, dia juga kerap mengikuti kegiatan kerja Gubernur.

Seperti yang dilakukan kemarin pagi saat Gubernur Ahok beresmikan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) di kawasan Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara. Kedatangan Sophia rupanya menjadi daya tarik tersendiri bagi warga sekitar. Tak jarang, ibu-ibu dan anak-anak kecil berfoto bersamanya.

"Iya tadi jadi hiburan warga setempat untuk foto-foto. Saya sudah perkiraan akan ramai. Tapi tidak seramai itu. Luar biasa antusias warga," kata Sophia di Balai Kota DKI Jakarta kemarin.

Sophia menjelaskan, dirinya menjadi juru bicara Ahok-Djarot lantaran ditunjuk oleh Partai NasDem. Dia mengakui kariernya di dunia politik belum terbilang lama lantaran baru satu bulan menjadi kader Nasdem. Kendati demikian, dia melihat menjadi juru bicara itu tidak memerlukan orang yang bisa terjun ke politik.

"Yang diperlukan menjadi juru bicara adalah orang yang kritis, mengerti perubahan arus dan yang *concerns* sama *citizens*. Termasuk mengerti Jakarta dan Indonesia secara keseluruhan," katanya.

Dia pun meyakini kontribusi artis dalam kampanye sangat berpengaruh sebab media kerap mengikuti artis dan sejalan. Namun, dia membantah bila kegiatannya seharian penuh kemarin mengikuti kegiatan Gubernur Ahok sebagai bentuk kampanye. Dia beralasan hanya untuk lebih mengenal sisi Ahok dan program-programnya.

"Satu-satunya artis yang terdaftar di KPU DKI cuma saya. Banyak teman-teman artis pendukung Ahok-Djarot. Tapi tidak bisa disebutkan namanya. Saya *kan* jadi jubiir harus kenal lebih dekat dengan Pak Ahok," ungkapnya.

Adapun Annisa Pohan sudah terlihat mendampingi Agus Yudhoyono sejak tes kesehatan di RSAL Mintohardjo. Kehadirannya sudah terbukti bisa menarik perhatian. Hal ini terlihat dia selalu menjadi pusat perhatian warga ketika sang suami bersosialisasi ke lingkungan warga.

Annisa saat dikonfirmasi mengatakan, langkahnya mendampingi Agus Yudhoyono merupakan bentuk dukungan kepada suami. "Ini awal dari segala perjuangan. Saya berharap semuanya akan berjalan lancar dan damai," kata Annisa. Dia berharap suaminya selalu dalam keadaan sehat meski harus menjalani kegiatan yang padat.

Menantu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga menjaga kondisi sang suami. Dia, misalnya, tak bosan me-

minta suami agar banyak minum air putih, karena aktivitas berkeliling Jakarta tiap hari begitu menguras energi. Selain minum yang banyak, Annisa berpesan agar Agus tidur yang cukup. "Walaupun susah untuk diwujudkan, ya tiap malam sama cuma tidur tiga jam," ujarnya.

Annisa juga berharap niat baik dari suaminya bisa diterima oleh masyarakat Jakarta. Pasalnya, langkah Agus yang maju sebagai cagub merupakan niat tulus untuk mengabdikan kepada warga.

Kehadiran Olla Ramlan baru menyeruak ketika Sandiaga beberapa hari lalu memposting fotonya di media sosial Instagram bersama Olla. Namun, posisi Olla sejatinya belum masuk tim kampanye Anies-Sandiaga. Hal ini ditegaskan Ale selaku manajer pribadi Olla. Menurut dia, Olla belum memberi kepastian sebelum mendapatkan izin sang suami, AUFAR HUTAPEA.

"Sejauh ini Olla Ramlan belum mengiyakan menjadi tim sukses atau jadi juru kampanye tim Anies-Sandiaga Uno. Pernah sempat terlibat obrolan dengan Sandiaga, namun belum menyerempet masalah itu, hanya obrolan lebih kepada perluasan ekonomi kreatif daerah, terutama di daerah Jakarta," ujar Ale ketika di hubungi KORANSINDO kemarin.

Ale kemudian menuturkan, bakal calon Anies-Sandiaga memang lebih memilih untuk menggandeng artis-artis guna menggenjot pariwisata di Ibu Kota. Daripada menjadikan artis sebagai jurubicara, Anies dan Sandiaga memilih untuk membentuk "film fund" atau penggalangan dana untuk proyek promosi wisata Jakarta.

"Mas Sandiaga selaku bakal calon wakil gubernur DKI punya ide Jakarta punya *film fund*. Jadi, ada dana khusus diciptakan untuk ekonomi kreatif untuk membiayai pembuatan film bertemakan Jakarta," kata Ale.

● **bima setyadi/
thomas manggalla**

Terima Komputer, Netralitas KPU Bisa Terganggu

JAKARTA – Pemberian puluhan komputer ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dari perusahaan swasta bisa mengganggu netralitas lembaga tersebut. KPU sepatutnya menolak dan harus mengembalikan bantuan tersebut.

Pengamat politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan, ada dua analisis yang mencerminkan pemberian hibah itu. Pertama, waktu pemberian yang menjelang Pilkada DKI 2017 merupakan bahasa nonverbal yang berdampak tidak baik terhadap proses penghitungan suara. Seharusnya pemberian hibah dilakukan ketika KPU belum bekerja atau saat baru dilantik.

Kedua, pemberian berupa komputer. Dia menilai sistem komputer merupakan hal yang rentan di-*instal* program tertentu sehingga mengelompokkan data sesuai yang diinginkan pembuat program. Apalagi, pemberian komputer lengkap dengan *software*-nya. "Berdasarkan dua analisis itu, seharusnya KPU DKI menolak pemberian komputer dari perusahaan swasta. Relasi seseorang tidak bisa dilihat dengan kasatmata," ucap Emrus kemarin.

Menurut dia, pemberian bantuan dari seseorang, perusahaan swasta, atau instansi pemerintah terhadap lembaga negara tidak ada yang salah.

Terpenting waktu pemberian, bentuk barang, dan transparansi harus disesuaikan dengan kondisi. Artinya, meskipun hibah diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada KPU DKI saat menjelang pilkada, KPU harus menolak itu.

"Kita sudah rapatkan dan finalakan kita kembalikan seluruh komputer yang dipinjam-pakaikan."

DAHILIAH UMAR
Komisioner KPU DKI Bidang
Pencalonan dan Kampanye

KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi menerima bantuan hibah dari Pemprov DKI Jakarta. Untuk KPU, lembaga tersebut menerima 46 unit komputer yang dipinjam-pakaikan. Atas pene-

rimaan komputer yang dipersoalkan ini, Komisioner KPU DKI Bidang Pencalonan dan Kampanye Dahliah Umar mengatakan, pihaknya akan mengembalikan puluhan komputer itu. Hal ini sebagai bentuk netralitas KPU DKI terkait banyak informasi negatif yang beredar. "Kita sudah rapatkan dan final akan kita kembalikan seluruh komputer yang dipinjam-pakaikan," ungkapnya.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Riano P Ahmad mengapresiasi rencana pengembalian komputer ke Pemprov DKI. Namun, pihaknya berharap pengembalian tidak mengganggu proses pilkada yang sedang berlangsung. "Apalagi ini untuk menjaga netralitas," ucapnya.

Komisi A DPRD akan meminta penjelasan eksekutif terkait alokasi kewajiban pihak swasta untuk keperluan KPU. Hal ini agar sejumlah sarana prasarana maupun barang yang diberikan dipastikan sesuai ketentuan yang berlaku. Apalagi KPU DKI hanya boleh menerima barang dari Pemprov DKI.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memastikan semua hibah yang diberikan untuk KPU DKI maupun Bawaslu provinsi berasal dari Pemprov DKI. Dia juga mengakui hibah tersebut dari perusahaan swasta yang diserahkan kepada Pemprov DKI, kemudian diserahkan lagi kepada KPU DKI untuk pinjam pakai.

● **bima setiyadi**

Bareskrim Polri Periksa Staf Ahok

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri memeriksa satu orang staf Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kemarin.

Pemeriksaan tersebut sebagai tindak lanjut dari laporan dugaan penistaan agama oleh Ahok saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu.

Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Agus Andrianto mengatakan, satu orang staf Ahok telah diperiksa oleh penyidik terkait pernyataan Ahok yang dianggap menistakan agama. "Sudah satu. Alhamdulillah kita sudah periksa. Sudah kita klarifikasi. Masalah penistaan agama, dia tidak berani komentar. Artinya memang ada kejadian seperti itu. Ada di sana, kurang lebih bahasanya seperti itu, cuma masalah menista atau enggak, dia enggak ngerti," ungkapnya kemarin.

Agus mengatakan, akan melakukan koordinasi untuk mengambil hasil analisis Laboratorium Forensik (Labfor) Polri terhadap video dan pernyataan Ahok. "Hari ini saya akan koordinasi dengan Kalabfor, mudah-mudahan minggu ini Labfor sudah selesai analisisnya. Minggu depan kita bisa melaksanakan klarifikasi dengan ahli bahasa, ahli agama, dan ahli pidana," katanya.

Penyidikan kasus dugaan penghinaan agama oleh Ahok akan terus dilanjutkan oleh Bareskrim Mabes Polri meski yang bersangkutan mencalonkan diri kembali menjadi gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017. "Ya, *wong* kalau ini ber-

jalan juga tidak menghambat beliau. Misalnya sampai putusan ada banding, ada kasasi, tunggu *inkracht*-nya panjang. Jadi tidak akan menghambat beliau, proses *inkracht*-nya kan panjang," ucap Agus.

Terkait rencana pemanggilan Ahok, Agus mengaku, masih menunggu perintah Kabareskrim Komjen Pol Ari Dono Sukmanto. "Kalau pada waktunya, apa yang disampaikan Pak Kaba akan kita laksanakan. Proses izinnya akan kita buat. Kita siapkan saja. Karena Pak Kabareskrim sudah menyampaikan itu (pemanggilan Ahok), artinya pada saatnya juga akan kita laksanakan itu," ungkap Agus.

Hingga saat ini Bareskrim Mabes Polri sudah memeriksa delapan saksi terkait kasus tersebut. "Sudah delapan orang yang diperiksa. Mereka orang-orang yang berada di lokasi saat kejadian saat Ahok berpidato. Seperti pihak dinas, lurah, dan masyarakat sekitar. Juga ada satu orang staf Ahok. Akan dianalisis dan membandingkan keterangan-keterangan saksi untuk memberikan gambaran situasinya seperti apa, keadaan yang sebenarnya, ceritanya gimana, kita bandingkan hasil video yang kita ambil dari dinas. Kita putar," ungkap Kabareskrim Komjen Pol Ari Dono Sukmanto.

Ari mengatakan, saat ini video tersebut masih diperiksa

oleh Laboratorium Forensik untuk diambil secara teknis guna dipelajari.

"Dibuka nanti dan dipelajari, dan dibuka kembali dengan saksi yang melihat apakah ada yang berkesesuaian. Penyidik akan memperlihatkan video tersebut kepada ahli tafsir, ahli bahasa Indonesia, ahli hukum pidana untuk melihat ada tidaknya perbuatan pidana. Minggu ini pasti ada langkah lanjutan pemeriksaan saksi lain," kata Ari.

"Sudah delapan orang yang diperiksa. Mereka orang-orang yang berada di lokasi saat kejadian saat Ahok berpidato."

**KOMJEN POL
ARI DONO SUKMANTO**
Kabareskrim

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengapresiasi sikap profesionalisme pihak kepolisian yang mengusut kasus penistaan agama oleh Ahok dengan memeriksa stafnya. Dia yakin polisi tidak akan membiarkan kasus ini terhenti meski jelang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017.

Penistaan agama yang dilakukan Ahok tidak ada hubungannya dengan politik. Penistaan itu keluar dari perkataan Ahok sendiri, bukan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Kami percaya polisi profesional. Ini tidak ada hubungannya dengan politik. Orang Ahok sendiri yang ngomong," katanya kemarin.

Sementara itu, Gubernur Ahok tidak mauberkomentar terkait pemeriksaan terhadap salah satu stafnya oleh Bareskrim dalam kasus penistaan agama. "Saya enggak tahu," ujarnya.

Pakar hukum pidana Faisal Santiago meminta kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk profesional dalam menangani perkara dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. "Saya meminta Polri netral dan profesional dalam menangani kasus Ahok agar Polri tidak dituduh sebagai alat politik oleh pihak tertentu," kata Faisal.

Ketua Program Doktor Hukum Universitas Borobudur ini mengatakan, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian harus mengacu pada Surat Edaran Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor SE/7/VI/2014 yang dikeluarkan era kepemimpinan Jenderal Polisi (Purn) Badrodin Haiti. Dalam aturan tersebut, ketika sudah memasuki tahapan pemilu, apalagi masa pendaf-taran, semua laporan terhadap calon kepala daerah baik bupati, wali kota, maupun gubernur ditangani selesai pilkada.

Ketua Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) Laksono Utomo mengatakan, masyarakat harus menyerahkan sepenuhnya kepada Polri untuk menangani kasus Ahok. "Mari kita percayakan kepada Polri penanganan proses hukumnya," katanya.

● **binti mufarida/
bima setiyadi**

Anies-Sandiaga Berani Kontrak Politik

JAKARTA – Pasangan calon gubernur (cagub)-calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta makin sering berkunjung ke masyarakat.

Ada yang melakukan kontrak politik, ada yang hanya menyempatkan aspirasi, bahkan ada yang memastikan berbagai programnya berjalan.

Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang diusung Partai Gerindra dan PKS ini berani membuat kontrak politik dengan warga untuk mendapatkan kepercayaan atas jabatannya. Menurut Anies, kontrak politik menjadi sebuah bukti bahwa dirinya bersedia membawa aspirasi masyarakat apabila terpilih nanti. Selanjutnya kita melakukan diskusi dan berkomitmen untuk merealisasikan aspirasi tersebut.

Dia mengatakan, cara melihat janji bagi seorang calon yang bukan petahana yakni melihat ke belakang. "Apakah Anies-Sandi telah menjalankan yang telah direncanakan dan dijanjikan. Kalau melihat ke belakang, jawabnya ya," ujar Anies sesuai menghadiri *launching* logo Salam Bersama di rumah pemenangan Anies-Sandi, Jalan Cicurug 6, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.

Selama hampir dua tahun menjabat menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud), dia sudah mewujudkan 40 program yang direncanakan, mulai pemberhentian budaya perploncoan, tidak menjadikan ujian nasional sebagai penentu kelulusan, program Indonesia Pintar, gerakan Indonesia Membaca-Menulis, beasiswa unggulan, menuju Wajib Belajar 12 Tahun, pembangunan sa-



(Foto dari kiri searah jarum jam) Pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta Anies Baswedan (kin) dan Sandiaga Uno melepaskan selubung saat peluncuran logo Salam Bersama di Menteng, Jakarta Pusat, kemarin. Cagub DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono didampingi istri, Annisa Pohan, membatik di sela kunjungan dan silaturahmi di Kampung Batik Terogong, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (19/10). Petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) didampingi Business Executive Manager Beverages Nestle Indonesia Pravitaya Soemadjo (kiri) dan Direktur Nestle Indonesia Debora Tjandrakusuma (kanan) saat peresmian Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) Marunda di Kelurahan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (18/10).



rana pendidikan, dan lainnya. Dengan begitu, dia yakin apa yang telah dijanjikan dalam sejumlah kontrak politik dengan warga akan terealisasi, khususnya dalam pengurusan. "Nantinya kami akan melakukan penataan, bukan pengurusan. Penataan kawasan kumuh di kota-kota besar dunia bukan sekadar memindahkan warga, melainkan mengubah lingkungan menjadi kampung-kampung yang nyaman untuk ditinggali. Kita harus belajar dari pengalaman kota-negara lain," ungkap Anies. Cawagub Sandiaga Uno juga telah membuktikan janji-janjinya, mulai dari pembuktian

transparansi dana kampanye, janji berlari di lima wilayah DKI, tidak mematok posisi dengan memilih menjadi cagub, dan janji lainnya. "Insya Allah semua akan dibangun melalui aspirasi warga. Saya sudah mendengarkan suara warga dengan mengunjungi 267 kelurahan," ucapnya. Berbeda dengan Anies-Sandi, pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni justru enggan mengobrol janji, bahkan melakukan kontrak politik. Mereka tidak mau menyebutkan program-programnya apabila terpilih nanti. Terpenting bagi Agus, semua permasalahan di Jakarta akan diatasi secara

komprehensif. "Saya bukan obrol janji. Saya memilih bekerja dan membuktikan langsung. Bagi saya, kontrak politik itu ketika dilantik sebagai gubernur," ujar Agus yang diusung Partai Demokrat, PPP, PAN, dan PKB. Agus-Sylviana juga bakal intensif turun ke masyarakat untuk meningkatkan elektabilitas. Agus mengaku memiliki cukup waktu untuk menyaingi elektabilitas petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat. "Saya tetap optimistis. Saya dan Bu Sylvi bisa terus menyapa masyarakat, semakin mengenalkan profil dan pemikiran kita berdua," katanya.

Sementara itu, Ahok menyatakan sudah tidak perlu lagi mengumbar janji karena sebagai petahana dirinya hanya perlu memastikan program-program yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi warga. Salah satunya memastikan pembangunan 100 ruang publik terbuka ramah anak (RPTRA) tahun ini. Kemarin petahana yang meresmikan sembilan RPTRA mengatakan bahwa program ini dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan warga, mulai dari tidak punya tempat berkumpul, tidak ada fasilitas anak-anak bermain, hingga penambahan ruang terbuka hijau (RTH).

"Tinggal di Jakarta mah gampang, bapak saya suka cerita. Orang Jakarta rumahnya jelek, tapi mobilnya bagus. Itu kata orang zaman dulu. Memang rumah di Jakarta terlalu mahal. Enggak semua bisa punya taman luas. Target satu kelurahan yang padat punya satu RPTRA," ucap Ahok. Pengamat politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrush Sihombing menuturkan, janji-janji politik para kandidat sangatlah wajar untuk mengganggah konstituen. Justeru kandidat yang tidak punya janji itu bisa jadi belum siap atau tidak memiliki program.

Namun, janji-janji politik harus rasional dan terukur misalnya menghilangkan pengangguran dari angka sekian menjadi sekian. Kemudian, meningkatkan kesejahteraan rakyat dari sekian sekian sehingga janji-janjinya terukur. "Untuk dapat lebih dipercaya, kandidat perlu melakukan kontrak politik yang ditandatangani dan disegel dengan meterai lalu dipaparkan di tempat strategis. Nanti ketika terpilih janji-janji tersebut bisa dipaparkan pencapaiannya sehingga warga bisa lebih percaya dan dapat diajak membangun bersama," papar Emrush.

● bima setiyadi